



SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

PANEL SEJARAH LOKAL

Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1982/1983

MILIK DEP. P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN



959.8

DEP

5

SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

PANEL SEJARAH LOKAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1982/1983

KATA PENGANTAR

Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 1981, di Hotel Wisata Internasional, Jakarta, telah berlangsung Seminar Sejarah Nasional III, hingga tanggal 15 Nopember 1981, dengan tema "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal kita bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa".

Dalam hal ini penelitian dan penulisan Sejarah Nasional dan Sejarah Lokal hendaknya kita lihat pada konteks yang luas, yaitu dalam rangka pembinaan kebudayaan, termasuk pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Itu mengandung arti, bahwa Pemerintah berkewajiban mewujudkan identitas nasional berlandaskan aneka ragam kebudayaan Indonesia; dan juga mewujudkan pedoman pola tingkah laku yang akan menyatukan bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam itu.

Di sini perlu kita perhatikan adanya kenyataan, bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Di samping itu, dengan pengembangan kebudayaan nasional itu diharapkan akan menjadi pegangan ataupun pedoman tingkah laku pergaulan sosial antar warga negara ke luar batas lingkungan suku atau daerah. Kemudian, masih perlu diperhitungkan, bahwa terdapat pula beberapa masalah sebagai akibat pembangunan yang pada hakekatnya merupakan proses perubahan di segala bidang.

Kesemuanya itu berlangsung dalam lingkup ruang dan waktu, yang perlu kita buat inventarisasi dan dokumentasinya sebagai dukungan data yang memadai. Data dan informasi kesejahteraan itu pada khususnya diperlukan antara lain untuk menyusun kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ke-

budayaan nasional dalam rangka usaha pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula diperlukan untuk melihat berbagai kecenderungan yang terjadi dalam proses integrasi nasional secara menyeluruh. Dan yang lebih utama ialah agar masyarakat terbina kesadaran sejarahnya sebagai satu bangsa.

Di dalam Seminar Sejarah Nasional III itu dapat ditemukan berbagai fihak yang menaruh minat dalam kesejarahan. Didalam forum Seminar itulah dipersembahkan hasil penelitian para sejarawan, dan mereka memanfaatkannya untuk mempertajam konsep, menyempurnakan metode dan metodologi untuk mempertinggi kemampuan mengungkapkan kembali sejarah bangsa di tingkat nasional maupun daerah. Juga diharapkan untuk mencapai keseragaman bahasa dan penafsiran berbagai peristiwa sejarah bangsa, sehingga dapat menjernihkan berbagai masalah kesejarahan dan mempermudah penanaman kesadaran sejarah pada masyarakat.

Manteri kesejarahan dalam Seminar Sejarah Nasional III itu meliputi keseluruhan sejarah nasional Indonesia, yang dibagi ke dalam enam panel, yaitu : prasejarah; sejarah kuno; sejarah pasca kuno meliputi masa sejarah masuk dan berkembangnya Islam; sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, sejarah awal abad ke-XX dan pergerakan nasional; dan sejarah mutakhir.

Kesemua materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan (Jakarta, Bali, Banda Aceh, Bandung, D.I. Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Riau, Banjarmasin, Palembang, Bima, Ujung pandang, Sulawesi Utara, Medan dan Samarinda). Demikian pula tulisan tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal, berskala nasional ataupun lokal; dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya, dengan diterbitkannya bahan hasil Seminar Sejarah Nasional III ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, 21 Agustus 1982

PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PEMBUKAAN SENIMAR SEJARAH NASIONAL III

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saudara-saudara sebangsa, sebahasa dan setanah air.

Kita berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama melalui seminar sejarah nasional yang ketiga kalinya. Pembahasan tentang sejarah merupakan suatu aktifitas intelektual yang tidak pernah basi walaupun andaikata tema pembahasan yang dipilih tetap sama. Secara naluri selalu ada kecenderungan pada diri manusia untuk mengetahui masa lalu dan berdasarkan pengetahuan tersebut berharap mendapat pelajaran guna menduga, bahkan membangun masa depan yang dikehendaki.

Pengamatan umum ini kiranya tercermin juga pada tema yang ditetapkan oleh seminar kali ini. Tema ini berupa "melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal Kita Bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Dari bunyi tema ini segera dapat diketahui bahwa para peserta seminar tidak hanya menganggap bahwa penelitian merupakan aktifitas yang berguna, tetapi bahwa sejarah layak dijadikan objek penelitian karena ia mengandung suatu arti (sense). Arti yang dikandung oleh sejarah ini harus digali melalui penelitian untuk kemudian dimasyarakatkan melalui penulisan dan selanjutnya dijadikan modal bagi pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Baik seminar sebagai aktifitas intelektual maupun tema yang dipilih oleh seminar sejarah ini, sangat saya hargai. Melalui semua ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak ingin dikutip oleh sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Sebab memang acapkali justru dari sejarah kita belajar bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Namun harus diakui bahwa usaha untuk menarik pelajaran dari sejarah bukanlah pekerjaan yang sederhana. Usaha memperoleh angka yang tinggi dari

studi sejarah, bahkan usaha meraih *judicium* yang membanggakan dari ujian mata pelajaran sejarah pasti jauh lebih mudah dari usaha memahami arti (*sense*) dari sejarah manusiawi. Betapa tidak. Dengan bermodalkan diktat orang lain atau "singkatan" dari bahan kuliah yang dibuat oleh teman, seorang mahasiswa dapat saja mendapat angka yang lumayan dari ujian yang ditempuhnya. Namun untuk menggali, apalagi dapat menemui arti dari sejarah, si pelajar sejarah dituntut untuk menghayati, sesedikitnya membiasakan diri dengan, falsafah. Falsafah dalam artian pengusutan tentang hakikat dari realitas, baik sebagai keseluruhannya ataupun mengenai salah satu atau beberapa aspek dari sekian banyak aspek yang dikandungnya. Mengingat arti esensial dari falsafah adalah pemikiran yang sistematis sedangkan bekerjanya pikiran manusia pada dasarnya sama, apapun obyek yang dijadikan bahan pemikiran itu, kiranya dapat dikatakan bahwa tidak ada satu falsafah tertentu yang secara khusus disediakan hanya bagi pemikiran sejarah.

Realitas berkaitan erat dengan fakta dan setiap ahli sejarah pasti akan menggunakan fakta tanpa ragu-ragu. Memang bagi ahli sejarah fakta-fakta mengenai masa lalu manusia merupakan perbendaharaan dari bahan pekerjaannya. Tetapi ada baiknya ahli sejarah bertanya pada diri sendiri apakah yang disebut fakta yang dianggapnya sebagai realita itu dan dimana ia dapat atau telah memperolehnya. Apakah yang dianggapnya sebagai fakta-realitas itu adalah obyek di luar dirinya, seperti batu atau kayu yang dapat ditemui atau dikutip disepanjang jalan? Apakah fakta-realitas itu sebenarnya bukan hasil ciptaan pikirannya sendiri yang tidak ada bandingnya (*counterpart*) di luar dirinya?

Pertanyaan seperti ini perlu diajukan mengingat, menurut hemat saya, yang disebut sebagai fakta-realitas itu tidaklah seluruhnya subyektif dan tidak pula seluruhnya objektif, tetapi merupakan benda separuh-buatan, sesuatu "semi-manufactured article". Andaikata benda yang terdapat di luar diri-

nya itu memang tidak bersesuaian dengan apa yang ada di dalam benak pikiran manusia, si pemikir tidak akan dapat mengenalnya dan lalu mengambilnya sebagai fakta. Di pihak lain, si pemikir telah memilih sejempuit bahan faktual ini dari sekumpulan massa yang mungkin kurang disadarinya bahwa jumlahnya melimpah ruah tidak terbatas. Tetapi kalau dia tidak mengadakan pemilihan dan tidak mempelajari beberapa contoh yang telah dipilihnya itu, dia tidak akan memperoleh fakta yang dapat diolahnya secara mental.

Didalam melaksanakan proses pengolahan intelektual inilah perlu adanya penghayatan cabang falsafah yang dikenal sebagai "epistemologi", yaitu teori pengetahuan. Sebab pertanyaan mengenai hakikat dari fakta pada gilirannya menimbulkan persoalan tentang hubungan antara hipotesa dengan generalisasi disatu pihak dan di lain pihak tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan hipotesa dan generalisasi tersebut. Hipotesa dan generalisasi tidak begitu saja timbul dalam pikiran. Kehadirannya dalam pikiran karena desakan, suggesti, dari pengamatan atas fakta, tetapi perlu disadari bahwa fakta yang cukup suggestif ini belum tentu, bahkan jauh dari, konklusif. Kalau hipotesa dan generalisasi ini perlu dikukuhkan, validitasnya perlu diuji melalui lebih banyak lagi fakta yang relevan yang dapat dikuasai oleh si pemikir. Tetapi berapa banyak yang dapat dikuasainya? Setiap saat perbendaharaan fakta yang telah dimiliki dapat saja diragukan oleh lain-lain fakta yang selama ini belum diketahui atau belum dipertimbangkan dan berkat kehadiran fakta-fakta baru ini mungkin saja koleksi fakta yang suggestif tersebut runtuh berantakan. Memang pikiran manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mutlak memperoleh pengetahuan tertentu. Gambaran yang dibuatnya mengenai sesuatu gejala dalam batas cakrawalanya sendiri merupakan tidak lebih dari suatu pendekatan terhadap kebenaran yang mutlak.

Hal ini tidak hanya berlaku terhadap pemikiran manusia tentang hal non-manusia, tetapi juga tentang studi mengenai

hal-ikwal manusiawi. Data yang dapat dikumpulkan oleh orang-orang yang mempelajari hal-hal yang lain dari manusia memang sulit untuk dapat dikatakan lengkap dan pemilihan data itu sendiri juga dapat dikatakan arbitrair dan kebetulan. Jadi sejauh mengenai seleksi dan kontruksi intelektual di bidang studi bukan-manusia, kita betul-betul tergantung pada faktor kebetulan. Namun sejauh mengenai studi tentang hal-ikhwat manusia, kita masih tergantung pada beberapa faktor tambahan lainnya, seperti prasangka, pilih-kasih, kekacauan yang disadari atau tidak disadari. Hal ini karena pelajar tentang hal-ikhwat yang bukan-manusia merupakan pengamat yang tidak terlibat pada hal yang dipelajarinya sedangkan orang yang mempelajari hal-ikhwat manusia merupakan sekaligus peserta dan peninjau. Di samping benda di pentas dia berada pula di auditorium. Dia melakukan peranan ganda dan ini pula yang mempersulit situasi kerja intelektualnya.

Pelajar hal-ikhwat manusia sulit untuk melepas diri karena ia terlibat, secara emosional dan moral, dalam setiap perbuatan makhluk manusia yang dapat diketahuinya. Mungkin saja ia tidak akan mengutuk seekor harimau yang membantai habis seorang manusia karena mengetahui bahwa binatang buas ini bertindak mengikuti naluri yang berjalanan erat dengan susunan psikosomatik hewani. Tetapi ia pasti mengutuk atau sesedikitnya mengulas sesuatu tindakan seorang manusia dan penilaian moralnya diiringi dengan perasaan yang bobotnya berubah sesuai dengan derajat kebaikan atau keburukan dari tindakan yang berada dalam pengamatannya itu.

Inilah sebabnya mengapa tadi saya katakan betapa perlunya seorang pelajar sejarah menghayati falsafah dan khususnya epistemologi atau teori pengetahuan. Adalah bijaksana apabila seorang pemikir tentang apapun mempelajari lebih dahulu bagaimana bekerjanya pikiran manusia. Apabila hal ini diabaikannya ia tidak akan menyadari keterbatasan dari kekuatan pemikiran manusia. Bahkan disamping kelemahan-kelemahan yang umum terdapat pada pemikiran manusia,

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Biar bagaimanapun kita yang hidup dewasa ini sangat jauh lebih beruntung dari nenek moyang kita dahulu. Apakah manusia pertama di bumi pertiwi ini diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuknya yang sempurna seperti makhluk manusia dewasa ini atau tumbuh secara evolutif seperti yang kita lihat dari fosil di lapisan-lapisan lumpur sepanjang tebing dan beting Bengawan Solo, dari manapun mereka berasal dan datang, dapat kita bayangkan betapa sulit dan beratnya hidup mereka itu. Walaupun secara berangsur-angsur mereka mampu membangun perlindungan dan meramban makanan, mereka tidak mempunyai keluarga yang dapat memberikan tuntutan ataupun yang dapat dipakai sebagai contoh. Namun yang paling terasa tidak mereka punyai adalah suatu masa lalu. Mereka tidak mempunyai buku sejarah yang dapat menceritakan bagaimana manusia hidup sebelumnya. Mereka tidak mempunyai musik atau cabang kesenian lainnya, tidak mempunyai falsafah, tidak mempunyai konsep yang seragam tentang waktu.

Kita dewasa ini lebih berbahagia dari mereka karena kita kini mempunyai satu masa lalu, mempunyai satu sejarah. Bagi kita sejarah ini merupakan satu warisan nasional. Sekarang kita berkumpul untuk menyimak, menggali "arti" dari warisan kita ini. Dan arti ini, kalau saya tidak keliru menangkapnya, adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukankah tema seminar kita ini adalah, saya ulangi, melalui penelitian dan penulisan sejarah nasional dan lokal kita bina semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahwa seminar sejarah ini dengan tema seperti ini di mulai pada tanggal 10 Nopember, sungguh merupakan satu ke-sengajaan yang membanggakan. Tanggal 10 Nopember, yang dengan setia kita peringati setiap tahun, adalah hari pahlawan, hari yang dihiasi dengan semangat patriotik. Sedangkan membina semangat persatuan dan kesatuan bangsa, saya kira dapat digolongkan pada usaha yang didorong oleh semangat patriotik.

pemikiran manusia tentang hal-ikhwal manusia mempunyai keterbatasan okkupasionalnya sendiri. Orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia harus menyadari akibat dari kedudukannya sebagai peserta yang sekaligus peninjau. Keadaan seperti ini intrinsik dengan objek studinya, yaitu sesama makhluk manusia seperti dirinya sendiri juga, dan apabila hal ini kurang disadarinya ada resiko ia akan membuat kekeliruan yang mudah sekali dihindarkan oleh orang yang mempelajari hal-ikhwal yang tidak mengenai makhluk manusia.

Para peserta seminar yang terpelajar.

Falsafah, atau sesedikitnya epistemologi, juga diperlukan didalam menggali atau berusaha menemui arti dari sejarah. Hal ini mengingat adanya ambiguitas dalam perkataan "arti", yaitu arah atau pengertian.

Secara poetis orang seringkali mengatakan tentang "arus" atau "gelombang" sejarah dan sebagai arus atau gelombang, sejarah membawa, menghanyutkan atau mengantarkan seseorang ke satu realitas dan meninggalkan atau membiarkan yang lain dalam kebingungan. Bila "arti" dari sejarah ini ditafsirkan sebagai "arus" atau "gelombang", kiranya ia ditanggapi sebagai "arah". Artinya, kita seperti melihat di dalam rangkaian momen yang berkesinambungan itu adanya satu arah yang berkelanjutan, yang ditentukan satu dan lainnya oleh kejadian kausal. Tetapi arah, orientasi atau arus ini tidak hanya sekedar diterima sebagaimana adanya. Orang cenderung pula untuk menilainya, bahkan dijadikan sumber dan ukuran dari setiap nilai. Bila demikian pada waktu yang bersamaan "arti" dari sejarah ini diberikan satu tafsiran yang lain, yaitu pengertian, makna atau dasar pengakuan (*raison d'être*). Dengan perkataan lain mempunyai "arti" sekaligus ditanggapi sebagai lawan dari "tanpa arti", lawan dari "non-sens". Jadi "tujuan" secara implisit dimasukkan dalam pengertian "arti" ini.

Soalnya lalu, apakah cukup bahwa sejarah mengandung suatu orientasi atau arah untuk dapat dinyatakan mempunyai

arti? Sebaliknya, apakah satu sejarah tanpa arah tidak mungkin dinyatakan mempunyai arti?

Menjawab pertanyaan seperti ini menjadi mudah selama kita menggunakan suatu waktu yang berdimensi tunggal, yang disimbolkan melalui satu garis lurus. Disini sejarah berjalan sepanjang satu garis lurus yang mengarah dari masa lalu ke masa depan. Kesesuaiannya, walaupun ada, membuktikan adanya kesinambungan dari momen yang beruntun saling menyusul, satu arah yang jelas terbaca dari keseluruhan kejadian. Arah yang berkelanjutan ini, walaupun tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai suatu "arti" yang berupa dasar pengakuan, sesedikitnya dapat ditanggapi sebagai suatu kondisi.

Agar supaya kesinambungan tersebut pada waktu yang bersamaan dapat ditafsirkan sebagai "pengertian", kita terpaksa untuk memasukkan "tujuan", yang juga bersifat lineair. Artinya, momen yang berkesinambungan dari sejarah tidak hanya merupakan satu rangkaian yang berkesesuaian, satu arah yang berkelanjutan, tetapi juga satu penyelesaian. Dengan perkataan lain, pada "arah" atau "orientasi" ini perlu dibubuhi satu tujuan, yang juga terletak pada garis lurus yang sama, dan yang dalam dirinya merupakan "raison de'etre" dan sumber nilai bagi keseluruhan proses sejarah yang bersangkutan.

Bila demikian, bila pengetahuan kesejarahan telah mencapai tingkat perkembangan yang seperti ini, studi mengenai morfologi sejarah menjadi sama pentingnya dengan studi mengenai momen dan kejadian yang kita awasi kaitan yang satu dengan lainnya. Morfologi dari sejarah menjadi semakin penting dengan semakin meluasnya cakrawala pandangan ahli sejarah.

Usaha untuk membuat suatu rekonstruksi dari jalannya kejadian-kejadian masa lalu pada mulanya dibatasi pada penuturan atau cerita dari satu periode tertentu. Memang semua rekonstruksi kesejarahan terpaksa dilakukan dalam bentuk penuturan karena semua hal ikhwal manusia terus terjadi dalam dimensi waktu. Apabila kita berusaha menyetop jalan-

nya kejadian-kejadian untuk sekedar memisahkannya agar tidak bertumpang tindih sebagai benang kusut, kita sebenarnya sudah mengganggu, walaupun tidak merusak, realitas sejarah. Sejarah dapat dilukiskan sebagai suatu arus kejadian-kejadian yang secara metaphorik dapat disamakan dengan suatu arus dari aliran air dan sebagai hal ini, ia mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan dianalisa.

Apakah sejarah merupakan suatu gerakan yang kacau balau di mana arusnya tidak mempunyai suatu arah tertentu, atau, apakah arusnya ini jelas mempunyai satu orientasi, sama halnya dengan arus sebuah sungai? Apabila arus sesuatu sungai dapat disamakan dengan arus sesuatu sejarah, apakah sejarah berjalan (mengalir) dengan kecepatan yang sama, atau apakah kecepatan ini berubah-ubah menurut liku dan relung yang dilewatinya, atau apakah sejarah mempunyai kecenderungan umum untuk semakin lama semakin cepat jalannya atau secara bergantian semakin menurun? Dengan cara yang sama kita juga dapat bertanya apakah ia selalu bergerak dalam satu jalur atau selalu bergerak dalam berbagai cabang jalur yang paralel atau kadangkala bersatu atau kadangkala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manakala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manapun ia berada, atau berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang di lampauinya, begitu rupa sehingga memudahkan atau mempersulit kita untuk membuat persamaan atau perbedaan di antara bentuk-bentuk tersebut. Cara mempelajari sejarah seperti inilah yang tadi saya sebutkan sebagai "morphologi" dari sejarah, yang agak berbeda dari epistemologi, tetapi biar bagaimanapun, dalam mempelajarinya, tetap diperlukan pemikiran yang sistematis, jadi artinya, tetap memperlakukan pengahayatan falsafah. Lebih-lebih bila studi morphologi sejarah ini dilakukan demi menggali "arti" yang dikandungnya itu.

Tadi saya katakan bahwa bagi kita sejarah bangsa yang cukup tua ini merupakan satu warisan nasional. Dan satu warisan dalam dirinya merupakan satu hak-kelahiran. A heritage is in itself a birthright. Pada saat dan suasana di mana internasionalisme merupakan satu mode, dimana patriotisme dianggap sebagai satu nilai yang kolot, melalui seminar sejarah ini kita tunjukkan bahwa sejarah nasional dan lokal merupakan dasar dari patriotisme yang tidak kunjung padam. Maka itu marilah dengan penuh ketekunan dan melalui keteraturan berpikir, dari sejarah kita, dari warisan nasional ini, kita gali arti yang berguna bagi usaha pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan harapan seperti ini, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada Hari Pahlawan ini, Selasa – tanggal 10 Nopember 1981, Seminar Sejarah Nasional ke-III, dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. Daoed Joesoef.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
SAMBUTAN MENTERI P DAN K	
DI SEKITAR SEJARAH LOKAL DI INDONESIA	
Oleh Taufik Abdullah	1
BEBERAPA ASFEK PENELITIAN SEJARAH LOKAL	
Oleh: Taufik Abdulah	47
SEBUAH CATATAN TENTANG BAGAIMANA LOKAL- NYA SEJARAH LOKAL	
Oleh: T.Ibrahim Alfian	69
CATATAN SINGKAT TENTANG KONSEP SEJARAH LOKAL	
Oleh: Teuku Ibrahim Alfian	77
SEJARAH LOKAL	
Oleh: Onghokham	81

DI SEKITAR SEJARAH LOKAL DI INDONESIA

Oleh : Taufik Abdullah

1. PENDAHULUAN

Berapakah banyaknya definisi yang telah diberikan pada "sejarah?" Tidak ada yang pernah menghitung dan mengadakan klasifikasi, seperti yang pernah dilakukan oleh Kroeber dan Kluckhohn tentang "kebudayaan". Tetapi mungkin tak perlu. Sebab sejarah atau hari lampau itu sangat mudah mengundang tanggapan-tanggapan yang filosofis dan bahkan skeptis dan sarkastik. Herder bisa mengatakan bahwa sejarah adalah proses ke arah tercapainya Kemanusiaan (*Menscheit*) yang tertinggi, tetapi Voltaire dengan enaknya menghamburkan ejekannya dengan mengatakan sejarah tak lebih dari "tableau ketololan manusia". Seorang Hindu mengidamkan untuk keluar dari sejarah yang dianggap sebagai samsara, sedangkan seorang Marxist meluluhkan dirinya dalam sejarah. Sejarah dengan iramannya yang dialektis, bagi si Marxist, adalah proses ke arah terciptanya masyarakat ideal tanpa kelas. Berbagai sikap dan pandangan filosofis lain bisa diajukan.

Tetapi masalah kita tidaklah sehebat dan setinggi itu. Bukanlah persoalan filsafat sejarah, yang spekulatif, yang akan dibahas tetapi hal-hal yang bersifat kritis-ilmiah. Maka dalam hal ini kita melibatkan diri sejenak pada persoalan metodologis. Begitulah, kita segera bertemu dengan sifat serba-dua, ambivalen, dari pengertian "sejarah". Sebagai sasaran studi kita bertemu dengan terkaburnya pengertian sejarah sebagai kejadian di waktu lampau dan sejarah sebagaimana ia diceritakan.¹

1. W.H. Walsh-An Introduction to the Philosophy of History, London Hutchinson's University Library, 1956, hal. 14.

Pada pengertian pertama sejarah adalah sesuatu yang terlepas dari jamahan ahli sejarah. 'Ia terjadi', dikatakan atau tidak, diceritakan atau tidak. Pada pengertian yang kedua telah terlekat di dalamnya usaha untuk menceritakan dan menerangkan apa yang terjadi itu. Dalam arti ini, maka sejarah pada dasarnya mengambil seluruh kegiatan dan aktivitas manusia dan akibat yang ditimbulkannya sebagai daerah perhatian. Dan betapa beragamnya aktivitas itu dari perang, yang mengancam kehancuran, sampai agama, yang menjanjikan kebahagiaan, tetapi kadang-kadang muncul sebagai sumber perang; dari manifestasi kekuasaan, yang kadang-kadang mengejek kemanusiaan, sampai ke lirik cerita yang menjanjikan hidup yang serba indah.²

Pada usaha penderitaan inilah sering kita bertemu betapa telah terbaurnya "peristiwa sebagaimana-ia-terjadi-sesungguhnya" dengan "peristiwa sebagaimana-ia-dimengerti". Suatu kejadian dianggap "peristiwa" dalam pengertian sejarah tidak selalu terlekat pada dirinya, tetapi pada nilai yang dikenakan padanya. Begitulah umpamanya, kejadian pembunuhan A, mungkin hanya akan berhenti pada dirinya – ia hanyalah kejadian. Ia hanya tetesan dari lautan kejadian. Ia terlarut di dalamnya. Tetapi kejadian lain seperti pembunuhan B, mungkin menjadi "peristiwa sejarah" jika ia, menurut rekonstruksi ahli sejarah, telah terkait pada kejadian lain dan jika ia dianggap berarti dari suatu proses yang sedang dipelajari. Dari sudut pengertian historis kejadian "pembunuhan B" itu telah lulus dalam seleksi. Ia telah dianggap memenuhi persyaratan ukuran penting berlandaskan pengertian mendasar yang dimiliki ahli sejarah tentang dinamik kehidupan sosial. Bukan itu saja,

2. Lihat antara lain Allan Nevins-The Gateway to History, Revised Edition, New York : Daubleday Company, 1952, hal. 13-64. A.L. Rowse-The Use of History (New Revised Edition) New York Collier Books, 1963, hal 26-42.

suatu kejadian bisa pula menjadi peristiwa-historis jika ia "di-perkirakan" ataupun "dianggap" relevan dengan masalah yang dihadapi. Demikianlah sebagai contoh dapat diambil suatu lukisan yang dari kaca mata estetis bernilai sangat tinggi. Lukisan ini sebagai peristiwa kebudayaan ataupun sebagai hasil suatu kejadian kebudayaan mungkin sekali tidak akan termasuk kategori relevan ataupun penting dalam usaha seorang ahli sejarah untuk meneliti pergolakan kekuasaan atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi lukisan itu bukan tak mungkin dipakai sebagai salah satu petunjuk, sebagai salah satu indikator jadi relevan dalam usaha untuk mengerti dinamik sosial dan kebudayaan. Lukisan itu berarti menjadi penting dalam konteks atau kerangka suatu pengertian teoretis tentang sejarah, yang melihat adanya hubungan yang tak terlepas antara bentuk ekspresif dengan sistem dan manifestasi kekuasaan ataupun sistem serta kecenderungan ekonomis.

"Ahli sejarah mengira" dan "ahli sejarah menganggap". Apakah kedua hal ini mengatakan serba kuasanya ahli sejarah? Tidak harus, dan bahkan sesungguhnya jauh dari itu. "Ahli sejarah mengira" adalah suatu ungkapan untuk mengatakan sifat aktifnya sikap sejarawan "Ia memperkirakan". Tetapi dalam "memperkirakan", ia dibimbing oleh patokan-patokan teoretis yang dimilikinya, yang dianutnya dan yang dijadikannya sebagai kerangka dalam melihat dan mengerti realitas. Mungkin ia ikut serta memupuk dan memperkuat patokan itu, tetapi itu bukanlah ciptaannya yang murni. Patokan itu adalah "tradisi" ilmiah yang dihayatinya. Patokan itu adalah kerangka penglihatan yang telah ada, yang telah bertumbuh, yang sesuai dengan diri dan kecenderungan pemikiran dan lingkungannya. Jadi dalam ke-rasional-an dan hasrat ilmiahnya serta dalam ke-inginannya untuk memberikan "cap" dirinya pada usaha pembentukan patokan teoretis dan/atau metodologis tertentu, ia bergerak dalam tradisi ilmiah yang sedang berkembang. Ke-

bebasan mutlaknya, atau, kalau mau, subjektivisme ilmiahnya, hanya mungkin dan bisa dipertanggung jawabkan pada batas-batas yang telah "disepakati", pada batas paradigma yang telah dan masih dianggap berfungsi.

"Ahli sejarah menganggap" adalah ungkapan yang pada kesempatan ini diartikan sebagai keadaan terleburnya ia pada dunia anggapan yang mengitarinya. Ia, lebih daripada contoh di atas, menimbang "kejadian" berdasarkan nilai dan praanggapan kultural dari masyarakatnya. Realitas historis yang ditunjukkannya bukanlah terutama berdasarkan patokan teoretis, yang secara kritis telah disediakan masyarakatnya. Jika, umpamanya, alam anggapan dari masyarakat seorang ahli sejarah mengingkari kemungkinan adanya hubungan antara dua kejadian yang bersifat temporal dan duniawi, maka bisalah diharapkan ia akan mencari "sebab" dari suatu "peristiwa" pada hal-hal yang bersifat adikodrati, yang supernatural. Bisa pula diharapkan ia akan menjadikan suatu kejadian sebagai "peristiwa sejarah" -- jadi yang telah lulus seleksi -- berdasarkan patokan-patokan yang metahistoris, di luar sejarah (dalam pengertian kritis ilmiah).

Dari sudut metodologis, pengerjaan sejarah yang kritis-ilmiah, seleksi itu diberikan oleh apa yang disebut imajinasi.

Imajinasi kesejarahan ialah "kemungkinan untuk memasuki kelampauan untuk mengertinya dan untuk memunculkannya lagi", kata seorang ahli sejarah Inggris.³ Terlepas dari ke-

3. Ahli sejarah itu ialah Wight, yang pendapatnya disinggung oleh H.P. Rickman dalam "General Introduction"-nya Willem Dilthey, *Pattern and Meaning History : Thoughts on History and Society* (eds. Introduction) New York : Harper Torchbook, 1961, hal. 43. Dilthey dianggap sebagai pentolan neo-idealisme, kadang-kadang juga historis. Tetapi terlepas dari soal filsafat, dari sudut metodologis, Dilthey mengajukan suatu konsep yang penting, yaitu *verstehen*, pengertian. Jika imajinasi historis bisa membuka prinsip-prinsip dari seleksi, maka *verstehen* memberikan pandangan tentang hidup

inginan Ranke, dengan slogannya yang telah jadi klasik itu (yaitu sejarah menceritakan "apa yang sesungguhnya terjadi", "wie es eigentlich gewesen") rekonstruksi dari peristiwa sejarah diwarnai oleh kadar dari imajinasi kesejarahan yang dimiliki dan dihayati. Kadang-kadang kita menghadapi keadaan bahwa rekonstruksi dari peristiwa-sejarah tidak saja bukanlah salinan yang murni dan polos dari kenyataan yang dibicarakan, tetapi juga, pada tahap yang lebih ekstrim, dapat dianggap sebagai manifestasi dari imajinasi kesejarahan itu sendiri. Malah bisa juga hasil tinjauan kritis-ilmiah dari suatu peristiwa atau situasi sejarah dijadikan sebagai pembenaran dari konsep teoretis tentang dinamik dan perkembangan masyarakat. Sikap ilmiah dari para penganut aliran dialektik-materialisme dalam tinjauan sejarah yang dektreiner, umpamanya, adalah contoh yang jelas dari kecenderungan ini.⁴ Sikap yang sama, tetapi dengan latar belakang ideologi yang berbeda, terpantul pula pada pemikiran sejarah Muhammad Yamin, dengan gagasan Indonesia-centris-nya. Sejarah Indonesia dilihatnya sebagai proses ke arah terwujudnya Indonesia yang bersatu dan berdaulat.⁵ Nilai yang kini sedang dihayati yaitu kesadaran akan

dan tentang seleksi tersebut. Verstehen adalah kemampuan untuk memasuki alam pikiran aktor sejarah di kelampauan itu. Tentang Dilthey, lihat juga antara lain Sartono Kartodirdjo "Max Weber dan Dilthey" dalam Lembaga Sejarah 6, 1970, hal. 61-73 dan Beerling Filsafat Dewasa ini, Jakarta : Balai Pustaka, 1958, jilid I.

4. Contoh dari penulisan sejarah seperti ini yang paling jelas dan bagus adalah W.F. Wertheim, *Indonesia Society in Transition*, The Hague/Bandung : w.v. Hoeve, 1959. Seluruh aspek dari perkembangan sosial diuraikan dari dinamika yang sifatnya dialektis - these antithese - sinthese - dan dilandaskan pada analisa selalu adanya pertentangan kelas.
5. Lihat prasaran M.Yamin dalam seminar sejarah nasional I, 1958, di Yogyakarta : Laporan Seminar Sejarah pada tanggal 14 s/d 18 Desember 1957, di Yogyakarta, Universitas Gajah Mada. Lihat juga uraian Muhammad Ali, "His-

kesatuan Indonesia, dipantulkan oleh Yamin dan para pengikutnya, ke dalam uraian dan rekonstruksi sejarah Indonesia dari dulu sampai sekarang.⁶

Dalam telaah ilmiah terhadap penulisan sejarah hal-hal seperti itu perlu mendapat perhatian. Bukan untuk mempersoalkan benar atau salah, murni atau palsu, tetapi untuk memperjelas tumpukan peninjauan. Tanpa kejelasan ini kita akan dapat terjerumus dalam pengindentikan nilai dengan realitas, antara konsep sejarah dengan sejarah-sebagai-realitas.

Jadi pada tahap yang ekstrim, kita bisa bertemu dengan keadaan ketika peristiwa-peristiwa tidak lagi hasil seleksi oleh imajinasi kesejarahan tetapi telah terlepas dari sifatnya yang empiris.⁷ Bukanlah apa yang terjadi yang menjadi patokan, tetapi makna, atau arti, dari "peristiwa" empiris itu yang ingin dicari. Kejadian atau peristiwa dalam hal ini tidak diperlakukan sebagai "peristiwa" yang otonom tetapi sebagai patokan dari sesuatu yang lebih hakiki. Peristiwa adalah aktualisasi simbolik dari yang diyakini sebagai hakiki itu.

torical Problems" dalam Soedjatmoko, et. al. (eds). *An Introduction to Indonesian Historiography*, Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1965, hal. 1-23.

6. Sikap ilmiah Yamin, sebagai sejarawan dan intelektual, bisa dimengerti dan dipahami. Indonesia ketika itu, 1950-an, baru saja terlepas dari belenggu penjajahan dan bahkan masih memperjuangkan sebagian dari tanah air kita, Irian Jaya (waktu itu disebut Irian Barat). Sejarah dan ilmu sejarah jadinya bukanlah sesuatu yang harus selesai pada dirinya, tetapi harus berfungsi dalam kehidupan sosial dan intelektual-ia harus memperteguh penjajagan ideologi kebangsaan Indonesia. Terlepas dari fungsi idili ini, yang memang penting, dari sudut sejarah-sebagai-ilmu corak berpikir ini disebut "tafsiran Whigg" dalam sejarah, yaitu kecenderungan dari kini dipakai untuk menerangkan hari lampau. Lihat : H. Butterfield. "The Whig Interpretation of History", New York, W.W. Norton, 1965.
7. Karl Lowith-Meaning of History, Chicago : Phoenix Books, 1962. Lihat juga : J.H.P. Plumb. The Death of the Past. London : Mc. Millan, 1969.

Makna, sifat hakiki, dan tujuan sejarah adalah masalah spekulatif yang biasa mengugah para pemikir sejarah. Masalah ini bertambah kuat diperoleh ketika orang menghadapi suasana sosial yang dirasakan tidak lagi begitu ramah. Suasana krisis, ketika hidup yang normal terasa terganggu, dan pegangan hidup terasa geyah, maka renungan dan studi tentang bagaimana dan mengapa, dari mana dan hendak ke mana manusia, masyarakat dan kemanusiaan⁸ makin kentara. Atau, yang lebih sering, ketika situasi peralihan sedemikian dirasakan sehingga keharusan mempertanyakan dan mencari identitas diri dan bangsa makin diperlukan.⁹ Dalam sejarah pemikiran Indonesia modern hal-hal ini, walaupun tidak terlalu menonjol, bukan tidak pernah memainkan peranan. Perkembangan historiografi Indonesia modern tidak terlepas dari pengumpulan intelektual mengenai hal-hal ini.¹⁰

Betapapun pentingnya masalah hubungan manusia dengan sejarahnya, ilmu sejarah, sebagai disiplin yang mempelajari dinamik dan perkembangan kehidupan manusia dan masyarakatnya, mempunyai problem-problem yang tak kurang

8. Pitirim A Sorokin-Modern Historical and Social Philosophy, New York Dover Publication, 1963, hal. 4. Bertolak dari anggapan tentang adanya hubungan yang erat antara tipe kebudayaan (yang menurut pengertian Sosokin sifatnya lebih merupakan jiwa jaman) dengan filsafat sosial yang muncul. Scrokin mengatakan bahwa abad 20, suatu abad krisis, tidak melahirkan filsafat yang evolusionis. Yang muncul ialah yang bersifat "siklis", "kreativitis", "eskatologis" atau "mesianis".
9. Lihat umpamanya David C. Gordon Self-Determination and History in the Third World. Princeton University Press, 1971.
10. Secara ringkas dibicarakan oleh Taufik Abdullah - "The Study of History", dalam Koentjaraningrat (ed). The Social Sciences in Indonesia, Jakarta : Indonesian Institute of Sciences, 1975, hal. 96-100. Selanjutnya lihat tulisan-tulisan M. Ali dan Soedjatmoko dalam Soedjatmoko et.al (ed). An Introduction to Indonesian Historiography. Ithaca, New York, 1964, hal. 1-23, dan hal. 404-415.

penting. Walaupun pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bersifat mendasar atau fundamental tersebut mempunyai pengaruh yang langsung terhadap pembentukan kerangka teoretis, ilmu sejarah harus lebih dulu menjawab hal-hal yang lebih langsung mengenai sasaran pokok disiplinnya. Masalah itu menyangkut metodologi, yaitu patokan dalam meneliti dan menceritakan kisah sejarah, yang akan memberikan batasan dan sasaran yang jelas dalam usaha untuk melukiskan hari lampau. Sering terjadi bahwa bukan saja "rekonstruksi" yang telah diberikan harus selalu ditinjau lagi, kerangka konseptual-pun harus pula selalu digugah. Bagaimana secara metodologis, sejarah, yang selalu mengalir, yang berjalan tanpa kenal batas geografis, harus dilihat? Bagaimanakah dimensi waktu dikenakan kepada situasi yang mengalir itu? Keharusan ini disebabkan oleh tuntutan zaman yang berubah, yang mempertanyakan masalah yang berbeda, dan karena perkembangan ilmu sejarah sendiri. Sebagai ilmu dan sebagai cermin dari pengalaman masa lalu sejarah bersifat selektif – ia harus memilih. Karena itu skala dari ukuran "penting", "significance" bisa berubah, sesuai dengan perkembangan dan peralihan perhatian. Sebagai ilmu maka sejarah diharuskan untuk memberikan "keterangan" (explanation) dan ini berkembang sesuai dengan pertumbuhan kesadaran ilmiah dan peningkatan kemampuan metodologis. "Sejarah dari Penulisan Sejarah" berkisar dari perkembangan dan perubahan dari ukuran "penting" dalam seleksi faktor yang tanpa batas dan dalam usaha "menerangkan" fakta-fakta tersebut. Pernah sejarah pergerakan nasional cukup bisa diterangkan dari sudut perjuangan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Tetapi sekarang betapa dangkalnya "keterangan" yang hanya seperti itu. Kesadaran struktural, imajinasi kesejarahan, dan usaha penghapusan cara berpikir yang anakronistik, yaitu yang mencampurbaurkan dimensi waktu yang berbeda-beda dalam satu helaan nafas, menghendaki keterang-

an yang lengkap dan tak terbatas pada penilaian normatif belaka.¹¹

Salah satu masalah konseptual yang sering muncul ialah apa yang disebut oleh seorang ahli sejarah Polandia, Halecki, "batasan dan pembagian sejarah". Apakah batasnya, ketika sejarah Barat berakhir dan sejarah Timur mulai? Apakah arti "Barat" dan "Timur" dari sudut sejarah? setelah dipertimbangkan semua pola-pola perkembangan sejarah, apakah bisa pula dipertahankan secara ilmiah pembagian sejarah atas kuno, pertengahan dan modern? Penentuan batasan geografis dan politis dari sejarah tidaklah mudah ditentukan. Sebab sejarah, sebagai gambaran dari dinamik manusia, pada dasarnya tidak terlalu mempersoalkan batasan alamiah ataupun buatan, seperti batas-batas negara. Juga pembagian sejarah atas periode-periode, atau periodisasi, bukanlah hal yang dengan begitu saja bisa ditentukan. Sebab sejarah adalah suatu kontinum, suatu proses yang tanpa henti. Tulisan beberapa ahli sejarah terkemuka memperlihatkan bahwa masalah ini memang hal yang tak mudah untuk dijawab.¹² Tidak mudah, apalagi jika konsistensi il-

-
11. Mungkin sejarawan sebagai sejarawan, bukan sebagai intelektual, dl. menjalankan profesi ilmiahnya tak perlu lagi menghadapkan dirinya kepada tantangan politik kontemporer atau perdebatan filsafat, seperti di th. 1950-an. Dl. kapasitas lain, sbg. seorang terpelajar, bisa terlihat, tetapi kesadaran bahwa ada batas keterlibatan yang subyektif dengan usaha pencarian jawab yang "obyektif" (kata "jujur", barangkali lebih tepat) perlu selalu dipupuk. Keterlibatan semestinya mempertajam pengertian ttg. "relevance", bukannya pemberi warna terhadap penilaian. Kemajuan historiografi di Eropa antara lain disebabkan oleh usaha yang keras untuk membedakan kedua hal ini. M.M. Postan = *Fact and Relevance : Essays on Historical Methods*. Cambridge : The University Press, 1971, hal. 52-60.
 12. Masalah ini merupakan topik pembicaraan para ahli sejarah Eropa dl. konferensi yg. diadakan tiap tahun antara 1953-1958. Lihat Edward Brukly & E.H. Dance, *Une Historie de l'Europe*, Leyde, A.W. Sythoff, 1960.

miah harus dipertahankan dan bila kesewenangan konsep harus dibendung.

Kalau demikian sulit mengadakan pembatasan dan mengajukan pembagian dan jika sejarah sesungguhnya menyangkut manusia umumnya, maka mungkin juga "sejarah universal" adalah sejarah yang sesungguhnya, karena menyangkut masalah manusia sebagai keseluruhan. Mungkin pula Toynbee tidak terlalu berlebih-lebihan untuk mengatakan bahwa "sejarah nasional" yaitu kisah tentang "asal, tumbuh dan mundur serta pecahnya" suatu bangsa — bukanlah "lapangan studi yang bisa dimengerti". Baginya peradaban (civilization), atau lebih tepat kelompok peradaban, bukannya bangsa, yang harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bisa dipelajari.¹³ Ia bukan sendirian dalam hal ini; para filosof sejarah, yang mengambil sejarah empiris sebagai bahan, juga cenderung untuk melihat keutuhan sejarah universal (walaupun harus dicatat ke-universilan itu lebih ditentukan oleh latar belakang kebudayaan).¹⁴

Mungkin. Namun andaipun titik tolak pandangan yang menekankan sejarah universal itu bisa diterima, beberapa masalah praktis harus diajukan. Mungkinkah dikerjakan secara langsung sumber-sumber sejarah yang sifatnya serba sangat fragmentaris itu? Toynbee tidak melakukannya, Spengler pun tidak, dan yang lain juga tidak. Sebab memang tak mungkin. Mereka harus tergantung kepada studi-studi, yang menurut kla-

13. Secara sangat ringkas A. Teynbee menguraikan pokok-pokok pikirannya dalam *Civilization on Trial*, New York : Meridian Books, Inc., 1958. Dalam buku yang sama D.C. Somervell memuat dalil-dalil pokok dari magnum-opus Toynbee, *A Study of History* yang sebelas jilid itu. Kritik pedas terhadap teori Toynbee antara lain oleh Pieter Geyl, *Debates with Historians*, New York : Meridian Books, 1962.

14. Tentang hal ini lihat umpamanya, Fritz Stern (ed. & Int.) — *The Varieties of History*, New York : Meridian Books, 1959.

sifikasi Toynbee, bukanlah termasuk "lapangan studi yang bisa dimengerti", dan studi-studi yang bersifat tematis, yang menyoroti aspek-aspek tertentu dari sejarah. Penulisan dan pengerjaan karya sejarah tergantung dari kesaksian atau testimoni yang dipancarkan oleh sumber-sumbernya. Ahli sejarah diharuskan untuk sanggup menangkap "significance" dari kesaksian itu. Dengan kata lain ia harus memberi arti terhadap kesaksian itu. Jika tidak, kesaksian apakah yang bisa dikerjakannya? Relevance apakah yang dapat ditentukannya terhadap data yang telah diberikan kepadanya? Apakah dasar dari pemberian kategori "relevance" itu? Jadi betapapun baiknya — dan "sejarah universal" mempunyai fungsi yang penting dalam usaha mengerti nasib manusia dan menimbulkan kesadaran "satu dunia" ia terbentur pada hal-hal yang praktis. Hasilnya sangat ditentukan oleh dialog antara penulis sejarah dengan yang lain, yang jadi perantara. Seleksinya lebih ditentukan oleh sikap a priori filosofis penulisnya.

Penulisan sejarah muncul bukan saja didorong oleh keinginan tahu filosofis yang mempertanyakan asal dan arah tujuan manusia atau cita kemanusiaan. Ia juga bermula sebagai usaha untuk menempatkan diri ditengah alam semesta dan di dalam untaian waktu. Dalam sejarah historiografi tampak bahwa ia mendekati kedewasaannya ketika keinginan untuk menemukan ataupun meneruskan identitas diri sebagai bangsa, dalam kaitannya dengan bangsa-bangsa lain, bertambah keras.¹⁵ Kematangannya bertambah lanjut, ketika makin dirasakan bahwa pengetahuan tentang corak dan pola gerak dari hubungan sosial-politik-ekonomi akan lebih memungkinkan orang me-

-
15. Lihat umpamanya HE Barnes, *A History of Historical Writing*, Second Edition, New York : Dover Publication, Inc. 1962. Tentang peranan penulisan dan studi sejarah dl. pergerakan nasional di Eropa, lihat Hans Kohn-The Idea of Nationalism : A Study in Its Origins and Background, New York : The MacMillan Company, 1961, terutama hal. 455-576.

ngerti dan menyadari berbagai kekuatan yang menguasai masyarakat.¹⁶

Kesemuanya ini memperkecil kemungkinan adanya suatu sejarah universal, betapapun idealnya, tanpa lebih dulu didukung oleh studi yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas. Suatu kesewenangan, mungkin, dari sudut filsafat, tetapi adalah suatu kewajiban dari sudut metodologi. Ruang lingkup dan permasalahan ilmu sejarah tidak saja ditentukan oleh logika ilmu dan oleh sifatnya yang universal, tetapi juga oleh perjanjian yang mungkin tampaknya seakan-akan "dipaksakan" oleh para pemeliharanya. Hal ini ditentukan oleh kemungkinan pengerjaannya dan oleh lingkungan sosial-kultural yang mengitari para pemelihara ilmu tersebut. Lingkungan sosial-kultural memberikan padanya patokan-patokan dalam mengatasi daerah penjela-jahannya dan menentukan fokus perhatiannya.

Ke-universil-an sesungguhnya berada dalam lapangan konseptual yang tertinggi, sedangkan hidup dan gerak manusia di-lingkungi oleh realitas-realitas yang lebih bersifat partikular,

-
16. Karl Marx dan Max Weber, dengan dasar tolak yang berbeda-beda termasuk tokoh ilmuwan yang paling awal yang menyadari hal ini. Marx lebih menampakkan pengaruhnya pada analisa dan sikap politik yang radikal, dan sedangkan Max Weber pada awalnya lebih berarti pada disiplin ilmu sosial yang mencari sifat yang umum, sosiologi. Duo Marc Bloch dan Lucien Febvre yang menjadi pendiri dari "mazhab" ilmu sejarah, *Annales* (dari nama majalah mereka) di Perancis, lebih jelas menggugah disiplin sejarah. Mengomentari terbitnya buku March Bloch (*Apologie pour l'histoire, ou Metier d'Historien* atau dalam terjemahan Inggris *The Historian's Craft*, New York, Vintage Books, 1953). Henri Febvre, dengan keras mengecam kecenderungan ilmu sejarah yang serba kaku dan sibuk dengan "diri sendiri". "Ini suatu mimpi buruk", katanya, "suatu kegilaan, pengebirian yang tidak semena-mena! Persetan dengan segala batas dan merek! Pada perbatasan, barangkali dengan suatu kaki tiap pihak, beginilah sejarawan harus bekerja dengan bebas, dengan berguna". Lucian Febvre, *A New History*, New York, Harper, 1973, hal. 31. Ia mengajukan agar ilmu sejarah juga memperhatikan hal-hal yang konvensional berada di luar bidangnya.

husus, dan sering unik. maka penentuan ruang lingkup yang terbatas dari studi sejarah bukan saja lebih praktis dan lebih mempunyai kemungkinan untuk diteliti secara empiris, tetapi juga secara metodologis lebih bisa dipertanggung-jawabkan. Masalahnya lebih banyak terletak pada bagaimana si sejarawan membuat pembatasan ruang lingkup studi itu dan merumuskan dasar-dasar yang dipakai untuk itu. Tanpa mengingkari bahwa setiap peristiwa sejarah, betapapun sederhananya, adalah suatu kulminasi dari hasil perkembangan berbagai aspek kehidupan, penulis sejarah dapat pula memastikan bahwa ia hanya ingin memperlihatkan secara khusus satu atau dua aspek saja. Mungkin bisa dipersoalkan apakah kecenderungan ilmiah dalam penceritaan sejarah, yang menjadikan "peristiwa" yang telah diseleksi sebagai fokus dan yang terkait pada pola "sebelum" dan "sesudah" tidaklah merupakan suatu kesewenangan. Di manakah batas "sebelum" bisa ditentukan. Jika peristiwa yang dijadikan fokus adalah "si A dibunuh oleh si B", maka, apakah ukuran untuk menentukan mana peristiwa sebelumnya? Dari segi mata rantai sebab-akibat, apakah sebabnya? Betapa banyak dan betapa beragam peristiwa yang berada dalam kategori "sebelum" itu. Di mana akhirnya dan demikian juga dengan "sesudah", "Sesudah" pembunuhan di Sarajewo terjadilah Perang Dunia I. Jika begini alangkah tanpa batasnya "sesudah" itu.

Tetapi inilah antara lain salah satu tugas ilmu untuk menentukan batas yang wajar, yang realistis, dengan batas yang tak bertepi. Ini pulalah fungsi dari imajinasi kesejarahan. Tanpa adanya kesadaran antara yang secara riil ada kaitannya dengan yang tidak maka sejarah akan tergelincir pada fallacy, kekeliruan, yang dibuat oleh pemeliharanya sendiri, yaitu sejarawan.¹⁷ Dengan tidak adanya kesadaran ini maka sejarah hanyalah air mengalir tanpa irama dan arti.

Jadi walaupun ruang lingkup daerah dan waktu terbatas suatu studi sejarah adalah ilmu sejarah yang sah. Betapapun disadari, adanya aspek kontinuitas dalam hidup manusia studi sejarah mempunyai arti penting selagi ia melihat adanya dinamik. Betapapun tingginya kesadaran tentang ke-universil-an ummat manusia, perhatian pada hal-hal yang partikular, khusus, akan lebih memperjelas sasaran ilmu sejarah; pergumulan manusia dengan realitas-nya¹⁸ Dan, adalah tugas utama dari ilmu sejarah, seperti cabang ilmu-sosial lainnya, untuk "menerangkan" dengan utuh penemuan atau gejala yang ditampilkannya?"¹⁹ Dengan ilmu ini pula sejarah secara langsung terlibat dalam pemakaian "ketentuan" (concept) yang lebih umum tentang pola tindakan manusia,²⁰ tidak hanya cerita "one damned thing after another", rentetan kejadian demi kejadian, atau sibuk menghamburkan pantulan-pantulan moral.

Jadi sejarah ummat manusia, atau apa saja, katakan umpamanya, sejarah kota, sejarah lokal ataupun hanya sejarah

-
17. Hal inilah yang disebut oleh Fischer – Interminable fallacy, kesalahan memperpanjang cerita pendek-suatu kecenderungan diuraikan melampaui batas yang semestinya. D.H. Fischer *Historian's Fallacies : Toward a Logic of Historical Thought*, New York : Harper Torchbooks, 1970, hal. 149–150.
 18. Dalam soal kemungkinan pendekatan sejarah dari berbagai disiplin ilmu sosial, seperti yang dianjurkan oleh Febvre dan lain-lain, Elton termasuk yang konservatif. Tetapi dalam hal ini ia benar. Lihat juga C.R. Elton *The Practise of History*, London : Collins-Fontana, 1972, hal. 20–24.
 19. Lihat umpamanya, George C. Hormans-The Nature of Social Science, New York : Harcourt, Brace & World, Inc., 1967. May Brodbeck mengatakan bahwa "Suatu keterangan yang lengkap adalah suatu argument logis yang syah, yang premise-nya mengajukan generalisasi dan kondisi yang relevant tertentu dan yang kesimpulannya menyatakan kejadian yang mesti diterangkan "Explanation, Prediction, and Imperfect Knowledge", dalam May Broadbeck (ed.) *Readings in the Philosophy of the Social Sciences*, New York, The MacMillan Company, 1968, hal. 337.
 20. Lihat William H. Dray – "Explaining What in History", dalam Brodbeck *Ibid*, hal. 343–348.

suatu kelompok kecil, adalah lapangan studi yang sah. Demikian pula halnya dengan penekanan pada satu atau dua aspek kehidupan dan dalam waktu yang tertentu, bukanlah sesuatu yang harus dianggap berada di luar disiplin ilmiah.

Bertolak dari patokan ini kita akan melihat masalah penelitian dan penulisan sejarah lokal.

2. Sejarah lokal : beberapa pengertian awal

Konsensus, yang dalam bahasa politik di negeri kita sering disebut mufakat, bukan saja jadi pegangan yang didegung-dengungkan dalam kehidupan bernegara, tetapi juga tampaknya dalam lapangan ilmu sosial, khususnya sejarah. Demikianlah umpamanya dengan pemakaian kata "sejarah nasional" dan "sejarah daerah" kita harus setuju saja bahwa maksud dari istilah yang pertama ialah sejarah dari wilayah yang kini disebut Republik Indonesia dan yang kedua ialah sejarah dari daerah-daerah administratif dari wilayah itu, jadi "propinsi". Bahwa "propinsi" itu suatu putusan administratif-politik, yang sejak mulai proklamasi kemerdekaan (1945) telah mengalami berbagai perubahan besar (mula-mula jumlah propinsi hanya delapan, sekarang, 1977, jumlahnya 27), tampaknya tidaklah terlalu merisaukan. Pokoknya "kita setuju saja". Walaupun begitu permasalahan ilmiah yang terletak di belakng konsensus, "supaya mudahnya itu", perlu disinggung juga.

Jika sekiranya "sejarah nasional" atau, seperti judul buku enam jilid, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah Nasional Indonesia (1975), diartikan sebagai sejarah dari bangsa Indonesia, kita berhadapan dengan suatu istilah yang anakronistik. Terlepas dari retorika ataupun kecenderungan berfikir sejarah yang agak metafisis, sesungguhnya secara historis, dalam pengertian emperis, "Indonesia"

atau "Nasional Indonesia" adalah sesuatu gejala yang baru muncul di abad ke 20 ini.²¹ Jika begitu maka semestinya "sejarah nasional" itu barulah secara ilmiah "syah" jika hanya membicarakan keadaan dari awal abad ini. Sebelumnya? Terang, bukan! Contoh, menjelang awal abad 20 perbatasan daerah sejarah "Sumatra" (yang menurut kenyataan "sekarang" adalah bagian dari Indonesia) dengan Semenanjung Malaya (bagian dari Malaysia) bukan saja kabur tetapi sesungguhnya saling berkaitan.²²

Jika kemudian, maka penataran "sejarah nasional" atau "sejarah Indonesia" yang mencakup zaman dari seluruh daerah yang kini disebut Republik Indonesia haruslah diterima tak lebih dari pada nama berdasarkan konsensus saja. Konsensus ini tak pula terlepas dari patokan normatif. Ia ditentukan bukan oleh keharusan logis dari "subject matter" atau sasaran studi, tetapi oleh tuntutan idiologis, maka pencampuran konsensus ini dengan pengujian berdasarkan disiplin ilmu sejarah akan menimbulkan kekacauan saja.

Tetapi kata "sejarah daerah" sebaiknya harus ditinjau lebih sungguh-sungguh. Sebab di dalamnya terdapat beberapa pengertian yang tidak mudah dirangkul begitu saja. Apakah yang dimaksud "daerah"? Dalam pengertian administratif "daerah" merupakan kesatuan teritorial yang ditentukan jenjang hierarkinya - "daerah" terbawah adalah bagian dari "daerah" yang atasnya (kabupaten adalah bagian dari propinsi). Sedang-

21. Hal ini tentu telah umum diketahui. Berbagai studi telah ditulis tentang ini. Studi khusus tentang proses pembentukan bangsa. Lihat : Harisa W. Bachtiar - "The Formation of Indonesian Nation", Thesis Ph.D, Harvard University, 1973. Tentang nama Indonesia lihat Russel Jones. "Earl, Logan and Indonesia" Archipel, 6 (1973), hal. 93-118.

22. Secara teoritis masalah "pembatasan" dalam sejarah yang juga terkait pada masalah kedaulatan diuraikan oleh G.J. Resink Indonesia's History Between the Myths, The Hague/Bandung : w.v. Hoeve, 1968, hal . . 281.

kan dalam pengertian politik "daerah" biasanya dipertentangkan dengan "pusat", yang dianggap "nasional"

Kesulitan sesungguhnya terletak pada kenyataan bahwa daerah sebagai unit administratif, sering tidak sesuai dengan "daerah" dalam pengertian etnis-kultural. Jika daerah administratif Bali masih dapat dianggap sebagai kesatuan etnis-kultural dan Aceh (walaupun Gayo mungkin akan keberatan) mungkin, dengan lebih hati-hati, bisa diperlukan begitu pula, maka "daerah" administratif Sumatera Utara adalah jelas kumpulan dari beragam "daerah" etnis-kultural. Ketidaksesuaian ini akan terus berlanjut apabila diperhitungkan pula bahwa daerah etnis-kultural sifatnya selalu bergerak, mobil, dinamis dan tidak ditentukan oleh suatu putusan yang telah dipertimbangkan. "Sejarah Minangkabau" umpamanya tidaklah identik dengan "sejarah Sumatera Barat", sebab yang pertama adalah konsep etnis-kultural yang selalu bergerak, sedangkan yang kedua ditentukan oleh politik administratif. "Daerah" dalam pengertian etnis-kultural adalah pula yang merupakan suatu unit kesadaran historis-dalam arti bahwa "daerah" itu masing-masing pada dirinya dan baginya adalah pusat perkisaran sejarah. Tiap daerah etnis-kultural bukan saja mengalami kesatuan historis, tetapi juga mempunyai konsep tentang kelampauan yang khas.²³ Jadi penamaan "sejarah daerah" menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang "apa yang dimaksud". Ketidakjelasan dari pengertian ini, di satu pihak menimbulkan harapan yang tidak sesuai dari sudut keragu-raguan dalam memutuskan sasaran studinya. Sebab itu pemakaian istilah "se-

23. Bandingkan umpamanya konsep hari lampau Bugis – Makassar dan Jawa seperti diuraikan J. Noorduyn dan C.C. Berg. dalam Soedjatmoko et al (eds). *An Introduction to Indonesian Historiography*, Ithaca, N.Y. Cornell University Press, 1964, hal. 87–136 dan hal 137–193.

jarah daerah", yang tidak diikuti oleh pembatasan yang jelas, sebaiknya ditinggalkan saja.

Dalam membicarakan soal "regio-centris" dalam penulisan sejarah, Resink²⁴ mengajukan adanya asumsi penulisan yang bersumber dari sikap "kedaerahan" dalam pengertian etnis-kultural. Jika regional masih bisa dipakai dalam arti ini, maka memang bisa dipakai istilah "sejarah regional" dalam arti yang lebih sempit dan tunggal daripada "sejarah daerah". Tetapi pengertian yang lebih populer dari regional sekarang melampaui batas politik "nasional", umpamanya konsep ASEAN, atau sesuatu "wilayah" yang dibatasi berdasarkan keperluan tertentu, seperti "Wilayah pembangunan", yang diperkembang oleh BAPPENAS. Dengan begini istilah "sejarah regional" hanyalah sekedar pengkromoan saja dari "sejarah daerah", yang bersifat serba dua itu.

Karena itulah buku ini dipakai istilah yang netral dan diharapkan berarti tunggal, yaitu "sejarah lokal". Pengertian kata lokal tidak berbelit-belit, hanyalah "tempat, ruang". Jadi "sejarah lokal" hanyalah berarti sejarah dari suatu "tempat", suatu "location", yang batasannya oleh "perjanjian" yang diajukan penulis sejarah. Batasan geografisnya dapat suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini mungkin telah mencakup dua-tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu (suku bangsa Jawa, umpamanya) dan juga dapat pula suatu kota, atau malahan suatu desa. Dengan begini "sejarah lokal" dengan sederhana dapat dirumuskan sebagai kisah di kelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada "daerah geografis" yang terbatas.²⁵ Tentu

24. G.J. Resink-Indonesia's History Between the Myths hal. 4-12.

25. Lihat H.P.R. Finberg & V.H.T. Skipp : Local History : Obyective and Pursuit, Newtown Abbot : David Charles, 1973. Bagi Finberg perbatasannya lebih khusus, yaitu "suatu Komunitas", township atau Village. Pierre Gon-

maksud dari "kisah dikelampauan" memancing pertanyaan, tetapi jika pertanyaan ini ditanggapi kita akan terlibat pula problem tanpa henti, "apakah sejarah"? Yang lebih ditekankan di sisi ialah ruang lingkup geografis, bukan problem teoritis-filosofis. Dengan begini soal dimensi waktu – apakah sejarah yang dibicarakan itu bermula dari zaman prasejarah sampai apa yang disebut sejarah "kontemporer" yang menyangkut hari ini tidaklah perlu dipersoalkan lagi. Juga tidak perlu harus digugah secara berlebih-lebihan apakah ia menyinggung atau tidak kemungkinan ada dua atau tiga kelompok etnis-kultural yang terlibat di dalamnya.

Tidak ada idialisme ilmiah yang berlebih-lebihan yang terkait pada pengertian sejarah lokal dan juga tak (mesti) ada perasaan rendah diri mendampinginya. Pengerjaan studi dan penulisan sejarah lokal tak perlu harus diliwati – dengan beban-beban dan janji-janji tentang sumbangannya bagi hal yang lebih "besar". Mengambil titik tolak bahwa studi dan penulisan sejarah lokal sebagai bahan pelengkap dari apa "yang untuk mudahnya" disebut sejarah nasional, seperti yang sering diajukan²⁶ hanyalah suatu sikap rendah diri yang tak perlu. Bahan

bert menyebut "desa" atau "beberapa desa", kota kecil atau kota ukuran sedang atau daerah geografis yang tak lokal besar dari" – "county" (kira-kira kecamatan kita) "Local History", Daedalus, Winter, 1971 – hal. 113. Tetapi pembatasan secara praktis tak bisa dipakai di Indonesia sebab sumber-sumber yang tersedia ditingkat "lokal" sangat langka. Kesangsian tentang pemakaian istilah "sejarah daerah" telah pernah saya sampaikan tetapi istilah sejarah lokal baru kali ini. Lihat "Masalah sejarah daerah dan kesadaran sejarah" yang diucapkan pada seminar "Sejarah Minahasa" (tanggal 24 Februari 1974 di Jakarta) dimuat dalam Taufik Abdullah "Sejarawan dan kesadaran sejarah", Jakarta, LEKNAS LIPI 1974, hal. 106–120.

26. Contoh R. Moh. Ali "Penulisan Sejarah Jawa Barat : Sekitar pemasalahannya", dalam R.Moh.Ali et. al. Sejarah Jawa Barat : Sekitar pemasalahannya, Bandung Proyek Penunjang Nasional Propinsi Jawa Barat, 1975, hal. 1–38.

hasil akhir dari suatu studi yang baik akan memberi bahan lagi pengetahuan yang lebih umum adalah benar. Malah lebih dari itu. Ia juga akan dapat menyumbang bagi keperluan khusus lainnya. Tetapi ini adalah suatu truisme yang tak perlu dielus-elus. Pembedaan yang tegas antara apa titik tolak pertama dari pengerjaan studi ilmiah dan apa hasil yang mungkin bisa juga dipetik dari padanya perlu diadakan. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam dan sosial hasil studi atau penemuan yang dimulai berdasarkan pada perhatian khusus kemudian malah ikut menjawab masalah lain adalah hal yang tidak jarang terjadi. Thomas Kuhn bahkan akan mengatakan bahwa suatu penemuan yang sangat mendasar dan fundamental dari suatu cabang ilmu, bukan saja akan dapat memecahkan masalah pokok dari ilmu tersebut, tetapi mungkin, dan pernah merobah seluruh apa yang disebut "normal science", asumsi pokok.²⁷ Memang bagi Kuhn perkembangan ilmu bukanlah terutama disebabkan tumpukan akumulatif dari berbagai penemuan, tetapi oleh revolusi yang menggugah secara fundamental paradigma ilmu yang sedang berlaku.

Masalah kita jauh lebih sederhana. Contoh di atas adalah suatu analogi yang serba membesar. Namun memakai titik tolak bahwa studi sejarah lokal adalah usaha menyumbang bagi sejarah nasional akan memancing kesulitan metodologis. Keduanya menuntut perumusan permasalahan yang berbeda-beda dan skala pentingnya peristiwa yang belum tentu sama. Mengharuskan studi sejarah lokal pada tahap awal sebagai bahan dan menyumbang sejarah nasional, seperti yang telah pernah dilakukan, hanyalah menghasilkan sejarah nasional versi lokal. Maka tak jarang kita melihat suatu tulisan tentang sejarah

27. Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (International Encyclopedia of United Science, Vol2) The University of Chicago, 1970. (Second edition).

suatu daerah (propinsi) menggapai-gapai seperti kehilangan akal untuk bercerita apa kegiatan "kebangkitan nasional" pada tahun 1910-an. Bukanlah pada tahun 1908 "resminya" kebangkitan nasional mulai? Dan berpuluh-puluh contoh bisa diajukan. Pertimbangan seleksi dan penempatan peristiwa pada skala penting tidaklah didasarkan oleh dinamik dan realitas keadaan lokal tetapi oleh skala nasional. Dengan begini hierarki yang tak syah dalam historiografi diperkenalkan. Apalagi "sejarah nasional" pada tahap ini, sebagai suatu pengalaman studi, masih memerlukan perumusan konseptual yang lebih utuh. Secara konseptual "sejarah nasional" barulah merupakan suatu keputusan ke arah tercapainya integrasi nasional.

Bahwa tiap pengerjaan ilmu harus dibimbing oleh suatu dorongan moral, suatu cita-cita, memang benar. Namun ini tak perlu diperpanjang soalnya. Jika bicara tentang penulisan sejarah di Indonesia maka etik nasionalisme Indonesia telah sejak awal 1950-an didengungkan sebagai dasar cita-cita.²⁸ Ia harus dibimbing oleh rasa cinta tanah air dan tanggung jawab intelektual. Ilmu tidaklah harus bermula dan berhenti pada dirinya. Ia bisa juga muncul berdasarkan sesuatu yang berada di luar dirinya. Tetapi serenta sikap etik itu dipatrikan dalam diri, maka dalam pengerjaan ilmiah permasalahan metodologis haruslah yang lebih nyaring berbicara. Maka dengan begini kita juga berhadapan dengan faktor lain, yaitu bahwa tiap masalah dibimbing oleh logikanya sendiri. Logika dari sejarah nasional bertolak dari pertanyaan pokok, "Apakah peristiwa atau proses ini memperjelas kita untuk mengetahui dan menerangkan dinamik Indonesia sebagai suatu bangsa?" dan "apakah pengaruh situasi (sosial kultural) dan corak hubungan sosial (dalam pengertian luas, societal) tertentu terhadap dinamik

28. Hal ini dengan jelas sekali diperdengarkan dalam seminar Sejarah I tahun 1957 di Yogyakarta.

bangsa yang baru ini?" Pertanyaan-pertanyaan ini memang bersifat simplifikasi tetapi tidaklah terlalu jauh dari inti permasalahan. Jika jawabannya positif maka ia masuk katagori "penting", jadi harus dipersoalkan. Dan pertanyaan selanjutnya, "apakah corak pendekatan disiplin yang harus dipakai?" atau "sektor kehidupan mana yang akan ditekankan" – politik?, ekonomi?, kebudayaan?, atau apa?

Apakah pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi dasar pilihan dalam studi dan penulisan sejarah lokal? Secara sederhana, tetapi kedengarannya ambisius, H.P.R. Finberg, yang terkenal sebagai pendiri dari "Mazhab Leicester" dalam studi sejarah lokal di Inggris, mengatakan bahwa sasaran sejarah lokal ialah "Asal-usul, Pertumbuhan, Kemunduran, dan Kejatuhan dari kelompok masyarakat lokal".²⁹ Tekanannya pada sebuah kelompok masyarakat (community), dan dengan menentukan irama sejarah bukanlah maksudnya untuk menunggu "kemunduran" dan "kejatuhan" itu.³⁰ Pikiran yang terpenting dari rumusan ini ialah bahwa problem-problem pokok haruslah bertolak dari realitas lokal tersebut. Atau dengan kata lain seleksi peristiwa ditentukan oleh "tingkat" pentingnya dalam perkembangan daerah yang dibicarakan itu, bukan dari kenyataan yang berada di luarnya. Dalam konteks sejarah tentang Indonesia, maka perbedaan lokal dan nasional tidaklah terletak pada tingkat abstraksi dan generalisasi makin nasional makin kurang detailnya tetapi pada orientasi. Jika sejarah nasional menuntut problematik yang menuju integrasi dari berbagai lokalitas, maka sejarah lokal tidak memerlukan ini. Masalah lokal adalah masalah lokal dan segala soal yang menyangkut berkisar pada dirinya. Karena itu pertanyaan pokoknya le-

29. Finberg & Skipp – *Local History*: hal. 25–44.

30. Ibid, hal. 52.

bih sederhana "Apakah hal-hal ini, proses dan kecenderungan struktural dapat menjelaskan perkembangan dari masyarakat di daerah ini?, di lokalitas ini?

Sekali lagi masalah pokok ialah bersumber pada logika yang dimunculkan oleh realitas lokal. Realitas ini memang tidak seluruhnya berasal dari dalam, ia bisa juga diberi warna, atau bukanlah dirobah, dari luar. Tetapi ia riil pada daerah yang tertentu itu. Berdasarkan pikiran ini maka bisa saja terjadi, bahwa sesuatu yang termasuk katagori "penting" dalam sejarah nasional, sama sekali tak berarti pada "sejarah lokal". Sejarah nasional ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang ekstra lokal, tidak hanya akumulasi peristiwa lokal ataupun hanya oleh kepentingan dari satu-dua lokal yang strategis, tetapi juga oleh perimbangan-perimbangan kekuatan pada tahap nasional (tahap pengambilan keputusan yang tertinggi) dan tekanan dari kekuatan internasional. Jatuh banggunya kabinet dari suatu sistim pemerintahan demokrasi parlementer mungkin penting dari sudut "sejarah nasional" tetapi belum tentu berarti apa-apa dari sudut lokal. Jadi, walaupun kedua tingkat sejarah ini bisa berkaitan tetapi keduanya secara metodologis harus terpisah, Simpang tindih keduanya barulah terjadi jika seandainya logika dari realitas yang dihadapi masing-masing bertemu.³¹ Hal ini tidak ditentukan oleh keharusan demi "kesatuan nasional", tetapi oleh logika yang terlekat pada penceritaan dari realitas yang sedang diuraikan. Pemberontakan di daerah, umpamanya, tentu sama sekali tak bisa diterangkan dengan baik tanpa memperhitungkan situasi politik ekonomi nasional.

31. Bandingkan dengan Sartono Kartodirdjo - "Menggali bahan-bahan Sejarah Regional "dalam Sejarah Jawa Barat : Sekitar Permasalahannya". Bandung Proyek Penunjang Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat, 1975, hal. 39-43.

Konsekwensi selanjutnya dari sikap ini ialah bahwa periodisasi sejarah lokal tidak harus sama dengan sejarah nasional. Terlepas dari kelemahan teoretis dari berbagai periodisasi atau pembabakan sejarah, yang pernah diberikan terhadap sejarah nasional/Indonesia, pemakaiannya pada sejarah lokal akan (dan telah) membawa kesalahan perspektif historis yang tak dapat dipertanggung-jawabkan. Bagaimanakah memakai periodisasi berakhirnya zaman prasejarah pada abad pertama Maehi dalam mempelajari sejarah lokal, katakan saja, Jayapura?.

Lebih daripada sejarah nasional sejarah lokal, tergantung dari perbatasan ruang-lingkup geografisnya, akan lebih menghadapkan kita kepada manusia secara lebih langsung dan intim. Bukan hanya tokoh besar dari peristiwa besar yang dihadapi, tetapi manusia biasa yang bergumul dengan masalah manusiawi ataupun alamiah. Kita berhadapan dengan manusia yang berjuang mengatasi segala macam hambatan yang mengitari dirinya. Bagaimana ia (dalam pengertian umum) mengatur masyarakatnya dan memberi gambaran serba ideal terhadap aturan itu. Bagaimana usahanya mengatasi realitas untuk mengejar impian serba ideal yang telah dibuatnya.

Karena itulah sejarah lokal haruslah mempunyai otonomi. Sebab dengan otonomi ini dapat diharapkan memberikan sesuatu yang berharga, baik untuk sejarah nasional, atau, lebih edialistis lagi, untuk memperdalam pengertian tentang "diri" dan manusia lain.

3. Masalah Metodologis

Karena tingkat yang dibicarakan begitu dekat dengan obyek yang sesungguhnya dari penelitian sejarah, yaitu manusia, maka pengertian sejarah lokal tidaklah dapat di dianggap sebagai sekedar "latihan" saja. Ia menuntut kemampuan tek-

nis dan daya analitis yang tinggi. Bahkan karena tingkat abstraksi-nya yang lebih rendah, pengerjaan sejarah lokal juga menuntut kecermatan dan ketelitian yang lebih tajam. Tak jarang bahkan sering terjadi bahwa penurunan tingkat abstraksi menuntut pula tambahan dari disiplin ilmiah lain. Karena jaringan-jaringan sosial dan kaitan-kaitan kultural, dan sering psikologis, yang menguasai hidup, pikiran dan tindakan serta lingkungan dari para aktor sejarah harus diteliti dengan baik. Tidaklah terlalu aneh jadinya untuk dimengerti mengapa sejarawan-sejarawan besar (terutama di Eropa) banyak yang membuat reputasi dengan penelitian sejarah lokal.

Dalam pengerjaan dan dalam perumusan sasaran pokok (subject matter) sejarah lokal, yang dengan jelas memberi pembatasan geografis dari ruang lingkungannya, sering sekali berkaitan erat dengan sejarah sosial. Malah dalam beberapa aspek terpenting dapat dianggap sebagai peletak dasar dari sejarah sosial. Sasaran pokok yang ideal dari sejarah sosial, kata Jean Hecht,³² ialah "struktur dan proses dari tindakan dan interaksi manusia sebagaimana terjadi dalam konteks sosial-kultural di masa lampau yang tercatat". Kecenderungan holistik, yang ingin melihat keseluruhan konteks sosial-kultural (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya ekonomi dan politik) dalam usaha untuk mengerti fenomena tertentu, seperti tergambar dari pembatasan ideal di atas juga dapat dikenakan dalam usaha untuk mengerti fenomena tertentu, seperti tergambar dari pembatasan ideal di atas juga dapat dikenakan pada corak-corak tertentu dari sejarah lokal. Sebab itu bisa dimengerti sering kali sejarah sosial akan lebih mendapatkan "rasa kepastian", yang lebih tinggi jika ia membatasi daerah geografis dari penelitiannya.

32. J. Jean Hecht, "Social History" – International Encyclopedia of Social the social Sciences, vol. 5. hal. 455 – 462.

Jika memakai pendekatan sejarah sosial maka suatu sejarah lokal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan baik ikatan struktural, yaitu jaringan peranan-peranan sosial yang saling bergantung, terhadap aktor sejarah. Dalam usahanya untuk mengerti dinamik sosial tertentu seorang ahli sejarah lokal akan mencoba melihat apakah kaitan dari peristiwa atau gejala yang ditelitinya itu dengan struktur sosial kebudayaan dan ekonomi? Jika ia sedang memperhatikan suatu atau serangkaian peristiwa maka ia tak akan puas untuk menerangkannya hanya dari sudut hubungan kausal sebab akibat, dengan peristiwa-peristiwa lain. Ia akan menerangkan pula dari sudut kerangka sosial kultural, dimana peristiwa itu terjadi. Ia akan menjadikan kerangka sosial kultural itu sebagai wadah dari peristiwa.

Begitulah umpamanya peristiwa pemberontakan di daerah A - jadi suatu peristiwa dalam konteks sosial-kultural tertentu dan pemberontakan di daerah B, mungkin mempunyai pola tindakan yang sama. Keduanya sama-sama menyerang dan mengancam kekuasaan yang ada, tetapi konteks yang menyebabkan dan memungkinkan kejadian itu mungkin berbeda. Dalam hal ini seorang ahli sejarah lokal tidak puas hanya akan melihat kemungkinan adanya rasa tak puas politik dan ekonomis dan kelengahan pemegang kekuasaan. Ia tak puas kalau hanya mencari motivasi serba umum dan universal. Ikatan kekerabatan, corak kekuasaan dan mekanisme kekuasaan, corak susunan stratifikasi sosial, kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara definisi peranan dari masing-masing pemegangnya dan harapan yang dikenakan kepada peranan lain dan seterusnya, harus terjadi perhatian. Karena itulah pendekatan yang memakai beberapa disiplin ilmiah makin dirasakan dalam penelitian sejarah lokal.

Baiklah, diambil sebuah contoh yang biasa, malah terlalu biasa, sehingga sering diapalkan, yaitu sikap terhadap penulis-

an sejarah lokal, yang tradisional, dan tak termasuk kritis-ilmiah, seperti yang kini dikenal.

Apakah namanya babad, hikayat, tambo, silsilah atau apa saja yang dihasilkan oleh berbagai daerah etnis-kultural, jika dilihat sepintas tidaklah lulus sebagai karya sejarah dalam pengertian modern. Bahkan lontara dari tradisi Bugis Makasar, yang telah dikenal oleh Noorduyn³³ sebagai corak penulisan yang "dingin", tak dapat diterima dalam kelompok karya kritis-ilmiah. Pada tahap yang berbeda-beda kecenderungan umum dari corak historiografi ialah mencari keterangan kepada sesuatu yang berada di luar sejarah. Sebab dan akibat hakiki tidaklah terletak pada rangkaian peristiwa-peristiwa, seperti A terjadi, maka B muncul, dan seterusnya tetapi pada kekuatan A_1 dan B_1 yang berada secara alamiah di luar "sejarah". A_1 dan B_1 dianggap dan dirasakan sebagai kekuatan utama yang menimbulkan A dan B. Suasana religio-magis, bukannya kritis-ilmiah, lebih menonjol dalam karya karya historiografis tradisional ini. "Nasib", "kutukan", "rahmat", bukannya "berhasil", "gagal dalam usaha" dan sebagainya yang lebih berbicara dalam suasana seperti ini.³⁴

Credibilities atau kadar kepercayaan yang bisa dikenakan kepada corak tulisan seperti ini jadinya lebih banyak ditentukan oleh penghayatan kultural dari si pembaca. Apakah ia, si pembaca, berada dalam alam anggapan yang sama dengan tulisan yang dihadapinya? Tanpa kesulitan yang total maka kredibilitas itu menjadi lebur atau hampir lebur.

33. Noorduyn – "origins of South Celebes Historical Writing", dalam Soedjatmoko, et. al, Introduction, hal. 137–155.

34. Mengenai hal ini, lihat antara lain Sartono Kartodirdjo "Tjatanan tentang segi-segi Missianistis dalam Sejarah Indonesia", Lembaran Sejarah, No. 7, 1971, Jogjakarta : Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada.

Tetapi yang ingin diperhatikan sekarang bukanlah soal ini. Masalah yang perlu lebih dulu diperhatikan bukanlah terletak pada evident atau benarnya "fakta" yang diajukan dari sudut sejarah sebagaimana ia terjadi dan bukanlah tentang harus diterima atau tidaknya "fakta" tersebut sebagai gambaran yang "syah" dari kelampauan. Yang perlu diperhatikan ialah sikap kita terhadapnya bagi keperluan penelitian. Corak tulisan ini tidaklah dapat dianggap sebagai karya yang selesai jadi sebagai sumber sekunder. Ia adalah bahan sumber primer, yang memerlukan penelaahan yang mendalam dan hati-hati.

Historiografi tradisional atau disebut juga sastra bersejarah³⁵ sering cenderung untuk mengaburkan dua macam realitas sejarah; yaitu realitas yang obyektif terjadi dan realitas yang riil dalam diri. Terkabur di dalamnya antara fakta yang merupakan pengalaman, yang aktuil, dengan "fakta" yang berupa penghayatan kultural kolektif.³⁶ Di samping keharusan adanya pengerjaan kritik intern, yang biasanya dikerjakan oleh para ahli filologi, dan ekstern, yang merupakan bagian-bagian terpenting dari penelitian sejarah (heuristik)³⁷ maka

-
35. A. Teew - "Some Remarks on the Study of so-called-Historical Texts Indonesian Languages", dalam Sartono Kartodirdjo (ed) Profiles of Malay Culture, Jakarta : Directorate General of Culture Department of Culture and Education, 1976, hal. 3-26.
 36. Plump mengatakan bahwa munculnya "sejarah" berarti berakhirnya "kelampauan" (the past) Ia menjadikan sejarah sebagai hasil usaha untuk merekonstruksikan peristiwa secara kritis ilmiah secara empiris. Sedangkan "kelampauan" adalah suatu konsep kultural tentang hari lalu, lihat : Plump The Death of the past.
 37. Tentang masalah ini lihat umpamanya G.J. Reneir History : Its Purpose and Method, New York : Harper Torchbook, 1965, hal. 106-118 Lihat juga Allan Nevins - The Gateway to History New York : Anchor Book, 1962 C.C. Berg, "Javaansche Geschiedschrjving" dalam Stapel (ed) Geschiedenis van Nederlands Indie, 1938, vol. 2 dan juga C.C. Berg dalam Soedjatmoko (et. al), hal. 87-136.

sangat pula diperlukan kesadaran dan pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang kultural dari masyarakat yang menghasilkan sastra bersejarah atau historiografi tradisional itu.³⁸ Bahkan dengan pengetahuan ini kemungkinan untuk membersihkan "fakta" yang disampaikan perbandingan sumber-sumber ekstern seperti, Tiongkok, Belanda dan sebagainya atau sumber dari tradisi lain, lebih terbuka. Usaha konstruksi tentang jatuhnya Sriwijaya dan munculnya Malaka, seperti yang dilakukan oleh Wolters³⁹ adalah salah satu contoh yang menarik dari prosedur kerja ini. Interpretasi dan pengertiannya tentang alam pikiran dan anggapan yang melatar belakangi Sejarah Melayu memungkinkannya untuk mengadakan perbandingan dengan sumber-sumber Tiongkok.

Sesuai dengan sifatnya maka dapatlah kita mengerti mengapa corak penelitian ini beragam-ragam dan kenapa beraneka pula gambaran hari lampau dan dunia yang terpancar dari padanya.

Namun dalam keragamannya ada yang lebih merupakan mentera bagi penguatan kekuatan magis pengusaha atau yang lebih menonjolkan titisan legimitasi ataupun yang lebih merupakan kisah terciptanya tata yang berlaku historiografi tradisional pada umumnya memperlihatkan apa yang disebut Raymond Williams "the myth of concern", yang berfungsi bagi kemantapan nilai dan tata. Keseimbangan dan kewajaran kosmos adalah tujuan utama. Dengan begini historiografi tradisional juga harus selalu memberikan kesyahan bagi struktur yang dapat selalu mendukung tuntutan kultural ini Struktur tersebut bisa diwakili oleh raja, bangsawan, atau kelas pemelihara,

40. Sebagai contoh lihat Taufik Abdullah - "Modernization in the Minangkabau World : West Sumatra in the early decades of the twentieth century" dalam Claire Holt et.al. (eds) *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, New York Cornell University Press, 1972

atau semua, yang penting ialah kemantapan kosmos. Struktur kekuasaan dan sosial harus ada bagi kepentingan kosmos yang teratur dan mantap.

Sejarah sebagai peristiwa adalah mungkin jika manusia berbuat atau bertindak. Dan perbuatan atau tindakan ini ditentukan coraknya antara lain oleh interpretasi manusia, si aktor sejarah, terhadap lingkungan atau situasi yang mengitarinya. Kemiskinan dari sudut penghitungan obyektif bukanlah hal yang langsung menyebabkan orang untuk mengadakan pemberontakan atau perlawanan. Kenyataan obyektif itu barulah merupakan motivasi yang sesungguhnya dari suatu pemberontakan, jika ia ditafsirkan sebagai "kemiskinan", "ketidakadilan", "penghinaan terhadap harkat manusia" dan sebagainya. Subyektivikasi dari kenyataan obyektif terjadi dan proses inilah yang menghasilkan tindakan. Dalam sejarah lokal sering tampak usaha yang sadar mempertentangkan antara kenyataan riil yang dihayati dengan patokan nilai yang dihayati. Situasi barulah merupakan dorongan atau hambatan dalam sistem perbuatan, setelah ia diberi makna, ditafsirkan.⁴⁰ Patokan dalam memberi tafsiran itulah yang diberikan oleh the myth of concern; diberikan antara lain oleh historiografi tradisional.

Walaupun dominan pada tingkat kelas masyarakat yang berbeda dan pada corak kebudayaan yang berlainan, historiografi tradisional dan tradisi lisan mempunyai beberapa kecenderungan yang sama. Keduanya tidaklah berhenti pada usaha penyalinan peristiwa, tetapi terlihat langsung dalam hal yang diceritakan. Pada historiografi tradisional hal ini lebih bersifat kultural peristiwa haruslah ada maknanya. Antara peristiwa dan konsepsi terhadap peristiwa itu terjalin oleh suatu pandangan dunia yang utuh. Begitulah umpamanya perjanjian Giyanti yang membagi dua kerajaan Mataram atas Surakarta

dan Yogyakarta menyebabkan harus ditinjau penulisan sejarah Jawa oleh para pujangga kraton. Konsep dari kosmos harus ditinjau lagi.⁴¹

Tak perlu sejarawan terlarut dalam ajaran Collingwood (semua sejarah adalah sejarah pikiran, katanya), tetapi dengan mengatakan interpretasi situasi dari si aktor ini sejarawan sadar dengan interpretasinya sendiri.⁴² Apa yang dilihat aktor sejarah belum tentu sama dengan apa yang dilihat sejarawan. Dengan menyadari dasar penglihatan si aktor, seorang sejarawan sejauh mungkin dapat mengelakkan penghimpitan pandangannya sendiri terhadap situasi si aktor. Sejarawan tak perlu terlalu jauh melibatkan diri dengan ide bahwa manusia pada dasarnya sama. Ia, si sejarawan, dalam kesadaran akan adanya "common sense" juga sadar bahwa "kenyataan" adalah sesungguhnya suatu bentukan kultural.

Dalam usaha untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari interpretasi aktor sejarah terhadap situasi, yang memberi corak dalam tindakannya, pengalaman terhadap bahan sastra lain cerita rakyat atau legenda, yang non formal, juga sangat perlu. Tak jarang kedua macam genre ini merupakan kritik terhadap "myth of concern" dan malah menjadi semacam perumus tak resmi dari counter-myth. Dengan pengenalan yang mendalam terhadap alam anggapan, yang terpancar baik dari perumus resmi dari "the myth of concern" ataupun dari yang menyangsikan kesyahannya yang mutlak, maka sejarawan akan mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dasar-dasar interpretasi situasi dari aktor sejarah.⁴³

41. Merie Ricklefs — *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749 – 1792* London : Oxford University Press, 1974.

42. Lihat tentang hal ini dalam Robert F. Brekhof Jr. *Behavioral Approach to Historical Analysis*, A Paperback Free New York, 1971.

43. Hal ini telah dibahas agak panjang dalam "Sastra dan Ilmu Sejarah di Indonesia" dan "Ke arah Pengenalan Sejarawan Terhadap Sejarah" dimuat an-

Tentu saja ini barulah salah satu aspek saja dari masalah sumber dan pendekatan terhadap sumber dari sejarah lokal. Hal ini sengaja ditonjolkan karena sejarah lokal lebih mendekatkan kita kepada aktor sejarah yang sesungguhnya manusia bukan tokoh yang telah disarati nilai (pahlawan, pemimpin dan sebagainya).

Karena itulah disamping kepekaan dalam menghadapi corak sumber tradisional yang tertulis, baik "resmi" ataupun tidak (cerita rakyat dan roman) serta ketelitian dalam kritik dan pemakaian sumber tertulis lain⁴⁴ diperlukan pula pengenalan terhadap tradisi lisan. Tradisi lisan terutama penting dalam masyarakat yang belum atau sedikit sekali mengenal kebudayaan tulisan. Hal ini terutama untuk mengisi kekosongan data dari sumber-sumber lain dan, tak kurang pentingnya, untuk mengetahui sikap dan pengertian yang diberikan masyarakat bawahan terhadap peristiwa tertentu. Tradisi lisan adalah bayangan dari realitas, kata Vansina.⁴⁵ Maka kemungkinan munculnya "realitas baru" dalam diri Masyarakat yang mengalaminya sebagai akibat suatu peristiwa menjadi terang. Sebagai suatu "gambaran realitas" tradisi bukanlah identik dengan realitas atau peristiwa itu sendiri, tetapi ia memperlihatkan bagaimana peristiwa itu di mengerti oleh masyarakat. Yang dimengerti adalah yang "realitas baru". Dan sebagai "realitas baru" ia memberi patokan dalam melihat peristiwa atau situasi yang kemudian. Tirani waktu yang diterapkan pada alam pikiran religio magis, adalah salah satu sebab dari mun-

tara lain dalam Budaya Djaja, No. 102 (Nov), 1976 dan No. 104/Thn. X (Jan), 1977 hal. 11-21.

44. Lihat Sartono Kartodirdjo - "Penggunaan Bahan Dokumenter", Lembaran Sejarah, 9 (juni) 1974, hal. 21-45.

45. Jan Vansina, *Oral Tradition : A Study Historical - Methodology*, Routledge & Regan Paul 1969.

culnya kecenderungan tersebut dari tradisi lisan. Metamorfose (perubahan bentuk) peristiwa, nilai, dan tokoh bisa terjadi. Seorang tokoh historis, yang pernah ada, secara perlahan dapat mengalami perubahan bentuk ia jadi legenda, dikelilingi mitos. Dengan begini ia telah menjadi lambang atau simbol dari ide atau nilai tertentu. Demikian pula bisa terjadi, bahwa suatu norma, demi kelanjutan berlakunya dapat mengalami personifikasi ide telah menjadi "tokoh" historis.⁴⁶ Metamorfose memang suatu hal yang agak ekstrim, tetapi jika ia terjadi, maka apa yang dimunculkannyalah yang menjadi "realitas baru" itu.

Dalam pengerjaan sumber seperti ini yang didapatkan barulah "fakta sementara". Sebab "fakta" itu harus pula dihadapkan dengan "fakta" dari sumber lain. Dengan kata lain kita harus pula mengadakan prosedur korobosasi (corroboration), sebab itu nyatalah betapa sangat perlunya sikap teliti dan hati-hati. Pada tingkat pertama saja si sejarawan mungkin dengan bantuan filologi atau antropologi, harus menentukan mana teks yang lebih otentik atau informan/pengkisah yang lebih bisa dipercaya. Selanjutnya ia akan terlibat pada prosedur kerja yang diuraikan di atas.

Ini barulah satu aspek saja dari usaha pengerjaan sejarah lokal. Dan ini barulah penekanan yang agak berat sebelah pada masalah kultural, yang menuntut ketelitian dalam pengenalan dan penafsiran simbol-simbol. Seterusnya, setelah masalah interpretasi kultural dari aktor sejarah selesai, ia, si sejarawan, tentu lebih melibatkan dirinya pada fakta-fakta yang konkrit, observable. Ia segera pula berhadapan dengan aspek proses dan dinamik dari sejarah yang sesungguhnya. Ketika itulah ia ber-

46. Lihat : Mircea Eliade — *Cosmos and History : The Myth of Eternal Return*, New York : Harper Torchbook, 1954.

temu dengan untai "sebelum" dan "sesudah", yang dijembatani oleh "peristiwa". Saat itu pulalah ia berjumpa dengan mata rantai "sebab-akibat". Selanjutnya ia harus pula bergelimang dengan masalah-masalah struktural, soal hubungan dan kaitan masyarakat. Bukan tak mungkin dalam penelitian sejarah lokal yang umum kita harus memperhatikan turun naiknya dan mobilitas penduduk. Bagaimana dinamik dari aspek ini mempengaruhi pada situasi sosial-ekonomi?

Begitulah sejarah lokal dapat membawa kita kepada berbagai masalah metodologis. Dari uraian yang serba ringkas di atas yang baru menyentuh satu dua problem saja, mudah-mudahan dapat kelihatan bahwa sejarah lokal tidak dapat dianggap hanya sekedar latihan bagi calon sejarawan. Ia menuntut keahlian dan kemantapan teoritis. Namun sebagaimana lapangan studi sejarah lainnya, seperti sejarah dunia sekali pun, sejarah lokal juga sanggup tersenyum menerima kedatangan para penggemar, para amatir. Ilmu sejarah kata Vansina⁴⁷ lagi, adalah : "ilmu dari kemungkinan-kemungkinan". Tak ada kepastian yang final yang bisa diberikannya. Yang membedakan hasil kerja para sejarawan, baik yang amatir ataupun yang profesional, ialah tingkat kemampuan dalam "menghitung" segala macam bahan hingga dapat mendekati perkiraan yang paling dekat dengan "kenyataan historis", pada tinggi rendahnya kadar imajinasi yang dimiliki, serta kepekaan dalam usaha untuk mengerti sumber.

4. Sejarah Lokal di Indonesia (sejak 1950)

Secara garis besar corak studi sejarah lokal yang pernah dilakukan tentang Indonesia dapat dibedakan atas empat golongan. Keempat corak itu ialah :

47. Jan Vansina – Oral Tradition, hal. 183–186.

1. Studi yang difokuskan pada suatu peristiwa tertentu (studi peristiwa khusus atau apa yang disebut *evenemental*, l'*evenement*)
2. Studi yang lebih menekankan pada struktur
3. Studi yang mengambil perkembangan aspek tertentu dalam kurun waktu tertentu (studi tematis), dan
4. Studi Sejarah umum yang menguraikan perkembangan daerah tertentu (propinsi, kota, kabupaten) dari masa ke masa.

Keempat corak ini tidaklah bersifat eksklusif, suatu corak bisa mengandung unsur-unsur corak yang lain. Corak ini lebih ditentukan oleh unsur dominan.

Studi yang dikerjakan oleh Sartono Kartodirdjo tentang pemberontakan petani di Cilegon (Banten), pada tahun 1888,⁴⁸ adalah contoh yang terpenting dari corak studi khusus yang pernah dilakukan sesudah Revolusi (1950). Bertolak dari suatu *accepted history*, peristiwa yang telah diterima kenyataannya, Sartono mengadakan rekonstruksi terperinci dari peristiwa itu dan memperlihatkan sumber dan pola dari dinamik sosial yang melatar belakangnya. Peristiwa itu sendiri kemudian lebih merupakan suatu alat dalam menerangkan masalah sosiologis-historis yang mendasar. Begitulah bukan saja untaian peristiwa, *sequence*, dan kaitan sebab akibat disampaikan dengan baik, tetapi juga terutama, konteks historis yang memungkinkan peristiwa itu terjadi diuraikan dengan panjang lebar. Dalam hal ini maka dipersoalkan pula struktur kekuasaan dan sistem sosial, jaringan kekerabatan, sistem ekonomi serta nilai-nilai kultural yang dihayati. Sampai di manakah pemberontakan itu adalah suatu letupan ketidak-puasan terhadap kekuasaan, yang kini dengan jelas di dominasi oleh orang asing? Apa-

48. Sartono Kartodirdjo — *The Peasants Revolt in Banten in 1888*, s'Gravenhage : Martinus Nijhoff 1966.

kah mungkin ini adalah pula suatu pantulan dari ketidak sesuaian antara status, yaitu kedudukan seseorang dalam hierarki kehormatan yang secara subyektif dirumuskan,⁴⁹ dengan realitas politik dan ekonomi? Sampai di mana Islam, baik dari sudut struktural, maupun kultural,⁵⁰ ikut berpengaruh? Bagaimanakah berbagai faktor, ekonomis, politis, sosial, meneruskan titik penyatuan (convergence) hingga menimbulkan tindakan pemberontakan? Apakah mekanisme yang memungkinkan itu semua? Inilah sebagian dari pertanyaan-pertanyaan pokok yang mendasari uraian dan analisa Sartono. Dapat dikatakan bahwa dengan menyoroti peristiwa pemberontakan itu dari segala aspek yang berkaitan, Sartono berusaha melihat pola dari ikatan yang melingkari hidup dari para aktor sejarah dan mencari kekuasaan, yang kini dengan jelas di dominasi oleh orang asing? Apakah dari para aktor sejarah dan mencari celah-celah yang memungkinkan perbuatan mereka terjadi.

Suatu studi yang bersifat evenemental dan melihatnya dalam kerangka struktural, tetapi dalam jangka waktu peristiwa yang lebih panjang telah dilakukan oleh John Smail.⁵¹ Ia mengadakan st7 di tentang revolusi Indonesia. Jika dilihat dari luar saja maka "revolusi Indonesia" tak lebih dari pada bentrokan bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Tetapi dengan melihat revolusi pada tingkat lokal, di Bandung, maka Smail memperlihatkan bagaimana revolusi itu dihidupi dan di-

49. Gareth Stedenan – "From Historical Sociology to Theoretical History", *British Journal of Sociology*, 27,3 (September) 1976, hal. 302.

50. Konsep dua muka dari agama, struktural sebagai ia muncul dalam susunan masyarakat dan kultural-sebagai ia dihayati-diperkenalkan antara lain oleh Clifford Geertz dalam konferensi kultural *Motivations to Progress in South and Southeat Asia* di Manila, 1963 Lihat juga C. Geertz, *Islam Observed*, New Haven, Yale University Press 1968.

51. John Smail-Bandung in the early Revolution 1945 – 1946 : A Study in the Social History of the Indonesia Revolution, Ithaca, Modern Indonesian Project, Cornell University, 1964.

lalui oleh manusia yang terikat oleh tradisi dan keharusan struktural. Dengan penelitian tingkat lokal ini revolusi menjadi sesuatu yang aktual bukannya sesuatu yang mungkin hanya secara kognitif disadari. Tampak pula bahwa aspek Indonesia—Belanda tak lebih dari pada salah satu aspek saja dari situasi proses revolusi tersebut ia hanyalah aspek hubungan luar negeri saja. Dalam pengerjaan sejarah lokal dari revolusi ini Smail menekankan cara penelitian sejarah lisan dengan memakai wawancara dari orang yang terlibat dan yang mengalami.

Sebagian terbesar dari studi sejarah peristiwa khusus di Indonesia sangat kurang memperhatikan masalah-masalah struktural. Studi-studi tersebut lebih terpaku pada soal-soal "apa, siapa, di mana, dan bila". Dari sudut lain, karena dorongan hasrat normatif ideologis studi evenemental lebih terpaku pada kisah-kisah kepahlawanan. Pemberontakan Peta di Blitar, perang Banjarmasin, dan banyak lagi yang lain, adalah contoh-contoh dari beberapa studi evenemental yang masih memerlukan studi yang mendalam.⁵²

Sejarah lokal yang lebih menekankan kepada struktur bukannya peristiwa yang dilahirkan oleh struktur, umpamanya telah dijalankan oleh C. Geertz dalam bukunya tentang sejarah sosial sebuah kota.⁵³ Karena penekanannya pada struktur ini bisa dimengerti bahwa metode penelitian yang dipakai oleh Geertz lebih bersifat antropologis daripada historis. Ia lebih tertarik pada masalah bagaimana anggota masyarakat dari lokasi yang ditelitinya, yaitu sebuah kota kecil di Jawa Timur, melihat diri mereka dalam sistem pelapisan sosial, dan dalam

-
52. Salah satu studi evenemental yang terbaru dan terbaik ialah tentang perang Diponegoro (1825–1830). Lihat P.B. R. Carey "Pangeran Dipanegara and the Making of the Java-War" – Ph.D. Thesis, University of Oxford, 1975
53. C. Geertz- *A Social History of an Indonesian Town*, dalam beberapa hal kategori sosial dan kultural yang dipakai dalam bukunya yang terkenal itu (*The Religion of Java*, New York : The Free Press, 1960) diperinci lagi.

kategori dari orientasi kultural. Kategori kultural itu, yang disebut oleh Geertz sebagai *variants*, ditentukan oleh penghadapan mereka terhadap ajaran agama dan sikap kehidupan sosial dan pribadi mereka. Disamping itu oleh Geertz juga diperhitungkan dimensi lain, yaitu lingkungan tempat tinggal (desa dan kota) serta tingkat keterbukaan terhadap pikiran baru tentang hidup (modern dan kolot). Dengan cara begini Geertz mencoba memberi wadah bagi peristiwa-peristiwa kontemporer yang terjadi di kota tersebut. (Tentu saja peristiwa-peristiwa itu pada gilirannya dipakai sebagai alat memperteguh keberlakuan, validitas dari wadah analisa yang dibangun itu).

Dengan mengambil permasalahan yang lebih khusus, yaitu kenegaraan dan kemampuan bernegara, tetapi menjangkau daerah yang lebih luas dan jangka waktu yang lebih panjang. Moertono melakukan studi struktural tentang kesultanan Mataram.⁵⁴ Dalam beberapa hal Moertono melanjutkan dan memperbaiki studi Schrieke⁵⁵ yang tidak sempat diselesaikan. Dari sudut sosiologis pertanyaan pokok yang ditujukan — ialah bagaimana hubungan antara penguasa dan rakyat diatur dan struktur dari kelas penguasa. Moertono mempersoalkan perwujudan dari kekuasaan, daya jangkau, dan, lebih penting legimitasi kekuasaan. Apakah faktor keturunan suatu sumber ataukah sebenarnya lebih merupakan saluran dari sumber legimitasi kekuasaan. Apakah faktor keturunan suatu sumber ataukah sebenarnya lebih merupakan saluran dari sumber legimitasi kekuasaan yang sesungguhnya? Apa ketentuan-ketentuan moral yang mendasari tiap kekuasaan? Dan bagaimana di-

64. Soemarsaid Moertono — *State and Statecraft in Old Java : A Study of the later Mataram Period, 16th to 19th century*. Monograph eries, Modern Indonesian Project, South-East Asian Program Dept. of Asian Studies, Cornell University, Ithaca, New York, 1968, No 43.

55. B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Vol. II, The Hague/Bandung W.v. Hoeve 1955.

selesaikan secara ideologis dan struktural jika terdapat konflik dan ketimpangan antara ajaran moral dan konvensi (jika tak prinsip), tentang dasar kekuasaan dengan realitas, dengan peristiwa historis? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dan lainnya, Moertono tidak hanya berhasil memberikan gambaran yang baik tentang struktur kenegaraan kerajaan Mataram, tetapi juga menerangi asumsi-asumsi dasar kebudayaan politik dan sikap politik di Indonesia. Dengan begini sejarah lokal yang otonom telah memberikan sesuatu bagi sejarah nasional.

Betapa pentingnya gagasan-gagasan struktural (dan kultural) dalam studi sejarah dapat dilihat hanya yang sangat baik dari Merle Rickleffs tentang masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I (Mangkubumi) di Yogyakarta.⁵⁶ Dalam studi yang mencoba bercerita (narrative) menguraikan peristiwa-peristiwa yang membawa proses pemecahan Mataram atas dua bagian, dan kemudian masing-masing bagian harus pula mengalami pembagian (Yogyakarta harus memberikan daerah untuk sebuah pusat kekuasaan baru, Pakualam dan Surakarta untuk Mangkunegara), Rickleff memperlihatkan bagaimana mungkin hal itu terjadi dilihat dari struktur Mataram (tidak hanya dari faktor adanya V.O.C.).

Corak studi ketiga lebih menekankan perkembangan suatu aspek sosial, suatu proses, sedangkan pencairan struktur lebih sadar dilakukan sebagai usaha untuk mengerti aspek yang diteliti itu. Inilah antara lain yang dilakukan oleh Ongkokham tentang kehidupan petani dan priyayi di Karesidenan Madiun pada abad 19.⁵⁷ Studi ini berdasarkan pada patokan bahwa daerah dan aspek yang diteliti tidak terlepas dari kon-

56. Rickleffs, — *Jogyakarta under Sultan Mangkubumi*.

57. Ongkokham, — "The Recidency of Madiun : Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century" New Haven. Ph.D. Thesis. Yale University. 1975.

teks politik dan gejala sejarah yang lebih luas. Madiun mulanya adalah daerah mancanegara dari Mataram kemudian, setelah perjanjian Giyanti, menjadi bagian dari Yogyakarta. Bertolak dari ini, maka Onghokham mencoba melihat corak hubungan antara kraton dan mancanegara dan, kemudian sikap Hindia Belanda terhadap daerah ini.

Karena perhatian lebih ditujukan kepada priyayi yang menduduki hierarki atas dalam masyarakat dan karenanya paling langsung berhadapan dengan kekuatan politik riil yang berada di luar daerah, dan petani yang merupakan sasaran terakhir dari kekuasaan, maka masalah tanah menjadi problem pokok. Struktur kekuasaan lama, yang bercorak patrimonial (raja dianggap sebagai sumber legitimasi kuasa dan harta) yang kini didukung oleh mesin kekuasaan yang lebih teratur dan rapi, bukan saja memperkuat kedudukan penguasa dalam berhadapan dengan rakyat. Tetapi membuka celah-celah dalam struktur yang memungkinkan timbulnya berbagai pemberontakan dan konflik sosial.

Beberapa contoh lain dari corak studi ini bisa studi disebut Elizabeth Graves.⁵⁸ tentang perkembangan pendidikan dan pengajaran di Sumatra Barat pada abad 19 dan awal abad 20 dan Thee Kian Wie yang menguraikan proses dan pola perdagangan ekspor di Sumatra Utara.⁵⁹ Walaupun dimaksud sebagai suatu studi ekonomi dengan memakai teori ekonomi tertentu, studi Thee Kian Wie dapat dianggap sebagai usaha awal dari sejarah ekonomi daerah di Indonesia secara terperinci.

58. Elizabeth Graves - "The Ever Vistotius Buffalo : How the Minangkabau solved their colonial problems", Madison -- Ph.D. Thesis University Wisconsin, 1971

59. Thee Kian Wie, - *Plantation Agriculture and Export Growth of Est Sumatra, 1863-1942* Jakarta LEKNAS-LIPI 1988

Sejarah kota telah pula dirintis oleh Abdurrachman Surjomihardjo⁶⁰ yang menguraikan perkembangan kota Jakarta yang bermula sebagai daerah kekuasaan kerajaan Taruma Negara Mitsuo Nakamura⁶¹ seorang antropolog, menguraikan sejarah sosial dari kota Gede (Yogyakarta) dengan mengambil Muhammadiyah dan proses pendalaman dan pelebaran pengaruh Islam sebagai fokus.

Dalam studi pada tingkat kota kecil ini Nakamura dapat meneliti jaringan sosial yang mengikat penduduk dan mencatat dengan baik perhatian mereka serta simbol dan idiom yang dipakai. Dengan begini ia melihat hal yang sama sekali telah dianggap berlalu oleh sebagian ahli-ahli sejarah dan sosiologi yaitu proses berlanjutnya Islamisasi. Dalam studi ini ia seperti kebanyakan ahli ilmu sosial Indonesia tetapi dengan dasar yang berbeda, menyangsikan kemampuan konsep variants – priyayi abangan, santri-dari Geertz.

Studi umum dari sejarah lokal, yang menguraikan sejarah suatu daerah dari masa mula sampai perkembangan mutakhir di kerajaan secara amaturnis. Pada umumnya apa yang telah dikerjakan sampai sekarang (1977), masih kurang memenuhi tuntutan ilmu sejarah. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Pengetahuan tentang sejarah umum banyak sekali tergantung pada studi-studi khusus yang pernah dilakukan. Tanpa studi khusus ini sukar untuk dibayangkan bagaimana suatu studi sejarah umum bisa dilakukan dengan baik. Dalam hal ini ternyata pengetahuan tentang aspek-aspek tertentu dan periode-periode tertentu dari praktis seluruh daerah di Indonesia (terlepas dari definisi apa yang mau diberikan

60. Abdurrachman Surjomihardjo – Pemekaran Kota Jakarta Penerbit Jembatan 1977.

61. The Crescent Over the Banyan Tree A Study of the – Muhammadiyah Movement in a Central Town, Ithaca, Ph.D.Thesis Cornell University.

kepada daerah) sangat fragmentaris atau serba terkeping ini disebabkan antara lain karena sumber-sumber sejarah sangat terbatas sifat ahistoris bangsa kita terutama menonjol pada kecenderungan untuk mengabaikan catatan sifat sumber, yang tidak terlalu mudah untuk diketahui apa yang di belakangnya, dan ketidak seimbangan perhatian para sejarawan yang meneliti. Hal yang belakangan ini sifatnya sangat manusiawi. Para sejarawan lebih tertarik kepada sesuatu yang bergerak, dinamis, moving, dan, tentu saja menggairahkan. Sayangnya tidak semua peristiwa dan situasi menggairahkan Akibat dari semua ini ialah belum dimungkinkannya rekonstruksi sejarah umum yang memadai.

Hal kedua, disamping pengetahuan yang fragmentaris, ialah, seperti telah juga disinggung di atas, lemahnya kerangka konseptual. Sejarah lokal, yang berpretensi sebagai sejarah daerah sering sekali mencampur adukan beberapa pengertian "daerah" dalam penulisan. Akibatnya terjadi pengaburan materi dan, tak jarang terjadi, pengambilan peristiwa dari konteks daerah etnis-kultural ke dalam konteks baru, yang bersifat administratif.

Disamping itu, adanya proyek penulisan "sejarah daerah" berdasarkan "pesanan", kadang-kadang lebih didorong oleh rasa nasionalisme, yang, harus dicatat, baik sekali untuk pendidikan generasi muda, tetapi, sering mengganggu perspektif sejarah Proyek penulisan sejarah daerah, yang disponsori oleh pemerintah daerah, sering didukung oleh keinginan memperlihatkan partisipasi daerah dalam sejarah perjuangan. Hal ini tidak salah, hanya saja juga tidak menyumbang banyak bagi pendalaman pengetahuan tentang sejarah lokal.

Faktor lain yang tak bisa dilupakan ialah keengganan para sejarawan yang berpengalaman untuk melibatkan diri dalam proyek penulisan ini. Maka jadilah penulisan sejarah

umum lokal ini lebih banyak dikuasai oleh para amatir atau bersifat amaturis.

Penulisan sejarah lokal umum yang termasuk baik sampai sekarang ialah tulisan M. Said tentang Aceh dan yang agak lumayan ialah hasil karya M.D. Mansur dkk. tentang sejarah Minangkabau⁶² dan T. Luckman Sinar tentang Serdang (Sumatra Utara).⁶³

Dari contoh-contoh penulisan di atas tampaklah betapa masih hampir tak terbatasnya kemungkinan dalam penulisan sejarah lokal. Jika dari sudut geografis kita tak akan henti-hentinya menyebut tentang tak diketahuinya sejarah daerah A, daerah B, kota A, kota B, dan seterusnya, dari sudut tema saja kemungkinan bagi pengerjaan sejarah lokal sungguh-sungguh menantang. Apakah umpamanya, yang kita ketahui tentang hubungan seni dan struktur sosial di daerah Pakualaman. Bagaimana pula dengan hubungannya dengan sikap terhadap tantangan dari luar? Semacam sejarah intelektual dari daerah atau lokasi tertentu belum digarap. Bagaimana pula hubungan antara pabrik gula dan pesantren di Jombang (Jawa Timur), arti penisi bagi perkembangan masyarakat Bugis - Makasar, dan sebagainya - kemungkinan yang nyaris Makasar, dan sebagainya - kemungkinan yang nyaris tanpa batas.

5. Isi Buku.

Dalam kumpulan tulisan ini diperkenalkan beberapa aspek dari sejarah lokal, sedangkan daerah yang dibicarakan lebih merupakan contoh dari problem yang ingin diutarakan.

62. M. Said / Aceh dari abad ke abad, Medan. n.p. 190. M.D. Mansur, dkk. sejarah Minangkabau, Jakarta, Bhadrata 1970.

63. T. Luckman Sinar / Sejarah Serdang, n.p., n.d.

Pada garis besarnya tulisan-tulisan yang dimuat dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu:

1. Contoh sumber primer (arsip, laporan perjalanan).
2. Contoh pengerjaan langsung dari sumber primer, dan
3. Contoh tema khusus dari penulisan sejarah lokal.

Walaupun sebenarnya perbedaan ketiga jenis ini tidaklah dilakukan secara tajam, dalam urutannya akan tampak bahan tulisan pertama sangat murni merupakan contoh sumber primer, sedangkan contoh tulisan terakhir (ke-delapan) jelas sekali bersifat contoh dari problem khusus. Jika salinan arsip tentang Sarekat Islam lokal yang dimuat adalah benar-benar merupakan bahan mentah dokumenter, maka tulisan yang ke-delapan bertolak dari suatu pertanyaan yang dengan tegas telah dirumuskan. Bukan hanya itu, tetapi pertanyaan itu juga bertolak dari kenyataan hari ini yaitu perbedaan antara Batak-Toba dengan Mandailing. Inilah yang membedakan tulisan tersebut dengan tulisan ke-enam, tentang Gorontalo, yang memulai pertanyaannya dari pengetahuan sejarah, bukannya dari tuntutan hari ini.

Begitulah berturut-turut dalam buku ini dimuat dua buah tulisan dari arsip Hindia Belanda mengenai Sarekat Islam, laporan Zwager tentang Kesultanan Kutai (Kalimantan) di abad ke-19; tulisan Steyn Parve tentang gerakan Padri di Sumatra Barat, tulisan Burger tentang desa Ngablak (Jawa Tengah); tulisan Bastiaan tentang Gorontalo-Limbotto (Sulawesi Utara); biografi Syekh Yusuf oleh Cense (Sulawesi Selatan); kupasan dari sudut hukum tentang Sumenep dan Panarukan, dan, terakhir tulisan Keuning tentang Toba-Batak dan Mandailing (Sumatra Utara).

Dari daftar ini tampak pula bahwa pemilihan artikel tidak hanya berdasarkan kaitannya dengan sumber sejarah tetapi

juga pada tema-tema tertentu dari penulisan sejarah. Demikianlah halnya jika dibandingkan tulisan pertama, yang membicarakan politik pada tingkat lokal dan dengan tulisan Burger, yang meninjau pertumbuhan sosial ekonomi dari suatu desa. Pada tulisan pertama kita berkenalan dengan akibat politis dari perkembangan sosial-ekonomi pada tingkat desa, sedangkan pada tulisan Burger kita berhadapan dengan perubahan struktural yang terjadi selama masa enam puluh tahun. Secara sepintas lalu Burger juga memberi contoh sederhana tentang pemakaian statistik dalam penelitian sejarah, dengan memperlihatkan antara lain jenis pekerjaan (profesi) dalam masyarakat. Jika Zwager menyampaikan laporan dari peninjauan ke kerajaan Kutai, yang menurutnya sedang berada dalam krisis politik, maka Steyn Parve, berdasarkan wawancara yang dilakukannya menguraikan pergolakan agama di Sumatra Barat. Agama sebagai faktor perubahan sosial, yang dalam hal ini didahului oleh apa yang sering dianggap sebagai krisis sosial, dibahasnya secara sepintas lalu. Cense tidak membicarakan suatu gerakan keagamaan tetapi biografi Syeh Yusuf, yang sampai kini masih meninggalkan pengaruh yang dalam di Sulawesi Selatan dan di Banten dan dikalangan masyarakat minoritas Melayu-Islam di Afrika Selatan. Dalam tulisan Bastiaan, tampaknya hal lain. Bukan saha kehidupan dari seseorang yang dihormati, kemudian berubah menjadi mitos, peristiwa yang dianggap merupakan asal-usul dari suatu tata sosial, juga bisa dikelilingi oleh mitos. Jadi dalam hal ini, artikel tentang Gorontalo-Limbotto ini kita bertemu dengan jenis lain dari sumber, yaitu mitologi. Khusus tentang soal kemungkinan pemakaian mitos dalam usaha rekonstruksi sejarah ini, Bastiaan sempat mengadakan perbandingan dengan sumber tertulis Belanda.⁶⁴ Masalah kekuasaan dan kedaulatan menjadi perta-

64. Contoh yang terakhir dan lebih memperhatikan masalah teoretis ialah tulisan-tulisan James J. Fox, tentang Roti, lihat umpamanya "A Rotinese Dynas-

nyaan pokok dari tulisan Resink tentang Madura, khususnya Sumenep dan Pamekasan. Dalam hal ini kita bertemu dengan pendekatan sejarah dari sudut ilmu hukum. Suatu pendekatan yang penting dalam mempersoalkan sejarah dan masalah hubungan antara negara. Akhirnya dari sudut pendekatan antropologi, Keuning berusaha menjelaskan proses, yang dianggap sedang terjadi, yaitu makin melebarnya jurang pemisahan di kalangan suku bangsa Batak, antara sub-suku Toba Batak dengan sub-suku Mandailing. Begitulah mudah-mudahan dari contoh yang diberikan dalam buku ini beberapa permasalahan pokok dari penelitian dan penulisan sejarah lokal di tanah air kita ini dapat kelihatan dengan jelas. Dan dari contoh-contoh ini dapat pula tampak betapa banyaknya sesungguhnya karya-karya permulaan yang telah dilakukan oleh para sarjana yang memakai bahasa Belanda.

Selanjutnya pada awal dari tiap-tiap artikel diberikan pengantar tentang latar belakang dan pentingnya masalah yang dibahas dilihat dari sudut sejarah dari daerah atau lokalitas yang dibicarakan dan dari sudut kemungkinan sumbangannya dalam usaha untuk mengerti sejarah Indonesia umumnya.

Dikutip dari Taufik Abdullah (ed.)
Sejarah Lokal di Indonesia

Yogyakarta: G.U. Press, 1979.

tic Genealogy : Structure and Event", dalam T.O. Beidelmand (ed.) *The Translation of Culture*, London Tavistock Publications, 1971, hal. 37-78, genealogi ternyata tak seluruhnya mithos, sejak 1660-an ternyata juga terdapat dalam laporan Belanda (dagregister).

BEBERAPA ASPEK PENELITIAN SEJARAH LOKAL

Oleh: Taufik Abdullah

I. PENGANTAR: DUA CONTOH

Mudah-mudahan saja saya bisa dimaafkan, karena saya ingin memulai pembicaraan saya dengan lebih dulu menyinggung dua studi tentang abad 14 Eropa. Barangkali kedengaran terlalu berlebih-lebihan, tetapi baik studi yang dilakukan oleh Le Roy Ladurie (1979) tentang desa terpencil Montaillou (di Pegunungan Pyrenees, dekat perbatasan Spanyol – Perancis), yang sekaligus menjadi judul bukunya, maupun oleh Barbara Tuchman (1979), yang memakai judul cukup puitis, *A Distant Mirror*, adalah contoh yang sangat baik tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa diberikan dari suatu studi "sejarah lokal".

Mungkin nasib baik yang menimpa Le Roy Ladurie yang dalam usahanya ingin meneliti bagaimana kehidupan "orang-orang biasa", yang terluput dari catatan kronikel ataupun sejarah, akhirnya menemukan bahwa pernah seorang uskup, Jacques Fournier (yang kemudian menjadi Paus yang bersemayam di Avignon sebagai Benediktus XII) mengadakan inquisisi di suatu daerah dalam keuskupannya. Inquisisi ini diadakan karena di daerah tersebut, khususnya di desa Montaillou, aliran keagamaan yang "sesat" (Albigensianisme) masih berpengaruh. Catatan dari inquisisi, yang dilakukan antara tahun 1318 dan 1325, inilah yang dipakai sebagai bahan oleh Le Roy Ladurie. Dan ia memakainya dengan sangat imajinatif. Hasil studi ini ialah seakan-akan mengajak kita "bertemu kembali" dengan orang biasa, yang mempunyai rasa salah, takut, dan tentu juga dorongan seksual. Le Roy Ladurie tak berhenti

hanya pada hal-hal yang menyangkut "human interest" saja. Lebih penting lagi ia menyoroti bagaimana berfungsinya organisasi sosial, corak hubungan sosial, hidup keagamaan dan sebagainya. Yang dilukiskan Le Roy Ladurie, berdasarkan dokumen yang ditinggalkan oleh uskup yang sangat aktif dari abad 14 itu, ialah suatu panorama kehidupan yang memberikan perspektif baru tentang hidup dan suasana dari abad Tengah, yang pernah disebut "gelap" itu.

Barbara Tuchman, bukan seorang profesional, jika kata ini harus dikenakan kepada mereka yang mempunyai ijazah dan bekerja di perguruan tinggi, tetapi dengan sangat cemerlang ia melukiskan suatu "epoch" yang penuh "kekalutan". Tidak seperti Le Roy Ladurie, penulis sejarah wanita Amerika ini memulai studinya dengan pertanyaan yang kedengarannya sederhana, "Apakah akibat wabah besar, **Black Death**, yaitu epidemi, yang terjadi pada tahun 1348 – 1350, yang konon telah memusnahkan sepertiga penduduk "antara India dan Islandia" terhadap kehidupan sosial?" Masalah yang dihadapi oleh Tuchman, bukan saja kurangnya minat para sejarawan terhadap periode ini, yang bahkan pernah disebut sebagai "masa terkutuk bagi kemanusiaan", tetapi, terutama bersifat metodologis. Apakah yang bisa dipakai sebagai fokus untuk memulai studi besar tentang periode besar dan melingkupi geografis yang sebesar benua ini? Dari sudut penanggalan waktu ia memperkirakan lima puluh tahun sebelum dan sesudah peristiwa itu adalah suatu periode yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu unit. Dan ia memperlihatkan keutuhan unit itu. Kemudian ia menemukan pula fokus yang akan jadi titik pusat dari penelitian, yaitu biografi seorang bangsawan, Enguerrand de Coucy VII, yang disebut sebagai pewaris dinasti besar yang berakhir dan terkenal dan mempunyai reputasi pada orang sezamannya sebagai "satria" (knight) yang pa-

ling berpengalaman dan terampil di seluruh Perancis". Dengan memakai pendekatan yang mula-mula bersifat biografi ini, Tuchman tentu harus lebih dulu mencari kaitan pribadi itu dengan "daerahnya", yaitu *estate* yang terletak di sebelah Selatan dari Paris, ibukota. Baik si bangsawan maupun *estate*-nya itu tidaklah berada dalam suatu dunia yang terisolasi. Keduanya terlibat dalam berbagai kaitan. Si bangsawan adalah keturunan dari suatu dinasti yang mempunyai ikatan kekeluargaan dengan berbagai dinasti kerajaan dan bangsawan Eropa. Sebagai suatu *estate* dalam sistem feodal Perancis, Cousy juga mengalami berbagai peristiwa yang menyentuh monarki. Maka dengan begini hampir pada setiap peristiwa penting baik si penguasa, tuan tanah Cousy itu, dan daerahnya terlibat. Atau dengan kata lain fokus itu menjalin titik-temu dengan "yang lain". Pada setiap titik-temu itu Tuchman tidak saja menceritakan apa "peristiwanya" tetapi juga menguraikan kaitan peristiwa itu dengan peristiwa lainnya. Kesemuanya kembali dicernakan ke dalam suatu *setting* atau kerangka waktu tertentu dan dalam suatu struktur atau kaitan peranan sosial tertentu pula. Dengan kata lain setiap titik-temu pada gilirannya merupakan suatu "*universe*" sejarah, yang di satu pihak otonom, tetapi di pihak lain terkait pada fokus utama. Dengan begini Tuchman dengan sangat berhasil telah menggambarkan suatu kurun zaman yang pernah dihantui oleh kematian yang mengancam.

Masalah yang dihadapi oleh kedua studi tersebut di atas berbeda-beda dan pendekatan mereka pun tak pula sama. Mungkin Le Roy Ladurie lebih "ilmuwan" dalam cara dan gayanya dan Tuchman lebih bersikap seorang "penyair", tetapi keduanya memperlihatkan kemahiran teknis yang sangat tinggi, dan imajinasi sejarah yang cemerlang. Barangkali benar juga Montaillou lebih memperlihatkan ciri-ciri "sejarah lokal"

yang murni, tetapi Tuchman menunjukkan apa yang bisa diharapkan dari suatu studi yang memakai sejarah lokal sebagai titik-tolak. Dengan pendekatan yang "langsung" kepada aktor dan didampingi oleh kesediaan untuk tidak harus terlena pada hal-hal yang serba bergejolak dan terjadi dalam waktu yang cepat — suatu kecanduan yang umum mempersona para sejarawan — kedua studi tersebut telah memberikan perspektif baru dalam usaha mengerti periode yang mereka bicarakan. Meskipun bukan merupakan satu "**breakthrough**" kedua studi itu memperlihatkan historiografi moderen dalam bentuknya yang terbaik. Dan betapa benar Hughes, ketika ia mengatakan bahwa "sejarah bisa bertambah ilmiah (**scientific**) — lebih sadar tentang asumsinya dan prosedur ilmiahnya — tanpa kehilangan kualitas estetikanya" (Hughes, 1964).

II. KE ARAH STUDI "SEJARAH LOKAL" MODEREN

Baiklah pujian itu tak usah berlebih-lebihan. Tentu saja keberhasilan keduanya tak pula terlepas dari berbagai faktor yang mendukung, seperti tradisi akademis yang terjaga rapih dan tersedianya bahan yang bisa dikerjakan serta segala macam soal "logistik" lain. Walaupun begitu, sebenarnya perhatian dan penghargaan pada apa yang kini disebut "sejarah lokal" itu masih berusia relatif muda. Bahkan abad 19 yang pernah disebut sebagai "zaman emas dari sejarah lokal", yang dimaksud dengan sejarah lokal itu tak lebih dari kronikel dan kisah-kisah yang mengasikkan yang ditulis oleh mereka yang mempunyai waktu luang. Dari sudut penulisan teknis-ilmiah apa yang dihasilkan itu barulah pada tahap "psendo-sejarah". Meskipun begitu tulisan-tulisan tersebut memuat informasi sejarah yang cukup kaya.

Bagaimanapun juga tulisan-tulisan itu sama sekali tak menarik perhatian para sejarawan profesional awal abad 20.

Mereka lebih menyibukkan diri pada hal-hal "besar dan penting" — orang besar dan peristiwa penting. Keduanya dalam konteks "nasional" atau supra-nasional, bahkan juga global (dari sudut Eropa). Bagi para sejarawan "profesional" itu sejarah lokal, yang masih bersifat "pseudo" itu, tak lebih daripada, jika boleh mengutip Goubert "a jumble of chance genealogies, usurped glories, proofless assertions". (Goubert, 1971: 115).

Namun sebenarnya kecenderungan intelektual baru telah mulai mempertanyakan keberlakuan tradisi pemikiran idealisme yang cukup berpengaruh. Dalam pemikiran sejarah (*historical thought*) terjadi pergolakan. Pemikiran idealisme, yang ingin menerangkan dinamik sejarah dari sudut pergumulan dan perhubungan ide-ide sebagai faktor utama dari sistem tindakan mulai digugah. Dunia yang idealistis itu dipertanyakan oleh pemikiran historis yang lebih menekankan pentingnya pengaruh struktur dalam kehidupan dan dinamik sejarah. Suatu perubahan dalam suatu aspek dari formasi sosial dapat membawa akibat terhadap aspek lainnya. Atau dengan lebih tegas lagi pemikiran ini, yang dirumuskan oleh Karl Marx, melihat bahwa masyarakat bukan saja ditdaklah merupakan suatu keutuhan yang homogen, tetapi terdiri dari kelas-kelas, yang masing-masing mempunyai keprihatinan intelektual yang berbeda-beda. Makin lebar jurang antara kelas itu, maka makin berbedalah cara mereka melihat realitas ini. (Gilber, 1971).

Apa yang diajukan oleh Karl Marx pada awalnya barulah suatu gugatan terhadap kecenderungan idealistik dalam pemikiran sejarah dan dalam usaha mencari keterangan-peristiwa-sejarah (*historical explanation*) dan kaitan kausalitas (*causality*). Terlepas dari program politik dan aksi sosial yang digerakkan oleh apa yang kemudian disebut Marxisme, gagasan ilmiah yang diajukan Marx memaksa para ahli sejarah untuk melihat

"peristiwa" dalam kaitan struktural secara lebih menyeluruh. Mereka mungkin dan bisa saja menolak kecenderungan deterministik Marx dalam menentukan kekuatan (**forces**) dalam sejarah, tetapi keterpukauan pada kisah (**narrative**) besar mulai dipermasalahkan. Tantangan ini menyebabkan apa yang selama ini dirasakan sebagai "kepastian" kini mulai membuyar. Dengan begini penelitian yang lebih terperinci tentang pola perilaku manusia dan sistem tindakannya makin diperlukan. Apalagi, dari sudut pengerjaan sejarah empiris, hasrat akan ketepatan rekonstruksi sejarah, seperti yang disuarakan Ranke ("Wie es eigentlich gewesen) — betapapun utopisnya — juga cukup merangsang.

Jika dalam sejarah intelektual tentang Marx ini menuntut **expose** yang jelas antara hubungan struktural dengan kesadaran atau ide, maka dalam sejarah politik hal ini mengharuskan perhatian yang lebih seksama terhadap berbagai kemungkinan faktor yang bisa diperkirakan merupakan "kekuatan" sejarah. Begitulah pentingnya sejarah sosial (yang tidak bersifat "semuanya dengan dikurangi politik", seperti yang pernah dipopulerkan di Inggris akibat pengaruh Trevelyan) dengan memperhitungkan kemungkinan perobahan struktur sosial — ekonomis makin dirasakan pula. Hal-hal ini adalah bagian dari sejarah historiografi. Di samping itu kemungkinan untuk mengetahui seluruh aspek kehidupan, yang tak hanya terbatas pada kisah kemenangan militer atau kegagalan diplomatik, tetapi menyangkut hidup keseluruhan ummat manusia makin pula dirasakan tak memadai lagi. Hasrat untuk mendekatkan diri kepada denyut kehidupan sesungguhnya makin dirasakan perlunya. Hanya saja, timbul pertanyaan, "bagaimanakah mungkin"? Betapa banyak masyarakat manusia dan betapa tanpa batasnya waktu yang dirasakan. Hambatan dari angka besar inilah akhirnya menyebabkan pula perhatian kembali ke sejarah lokal. (Goubert, 1971).

Secara simbolik dan, sekaligus methodologis, peralihan dari kecenderungan filosofis pada penekanan studi yang bersifat empiris tentang sejarah universal atau **global** dengan jelas diperlihatkan dengan permainan kata oleh Marc Bloch dan temannya, Lucien Febvre, dua pendiri majalah, dan "mazhab" sejarah, *Annales*. "Sudah dari dulu", kata Marc Bloch, "para pendahulu kita, Michelet atau Fustel de Coulanges, mengajar kita untuk menyadari bahwa sasaran sejarah sesungguhnya adalah manusia. Tetapi lebih baik kita sebut ummat manusia" (Manusia dalam jamak). Soalnya, katanya lagi, kata "manusia" menunjukkan "abstraksi", sedangkan dalam bentuk jamak — "ummat manusia" — ialah lebih sesuai dengan "ilmu tentang perubahan". (Bloch, 1955: 25 - 27). Dan sejarah, memang, menyangkut masalah perubahan, bukan situasi yang menetap. Lebih tegas lagi Febvre, malah seakan-akan berseru, "Bukan manusia, sekali lagi, tak pernah manusia, masyarakat-masyarakat manusia, kelompok-kelompok yang terorganisasi". (Febvre, 1973: 27 - 43). Pernyataan keras ini tidak berarti mengeluarkan individu dari sejarah, tetapi suatu penegasan bahwa yang terutama ingin dicapai suatu studi sejarah adalah ummat manusia yang berbuat dan bertindak di kelampauan. Dan memang dengan dasar ini pulalah Hobsbawm ingin mempertegas bahwa sejarah sosial (**social history**) itu sebenarnya harus disebut "sejarah dari masyarakat" (**history of society**) (Hobsbawm, 1971: 30 - 45).

Jadi dari sudut sejarah historiografi moderen perhatian pada sejarah lokal berasal dari keinginan untuk lebih mengetahui dinamik hari lampau pada tahap yang lebih intim. Pada tahap inilah berbagai dugaan historis, yang sering telah menjadi mithos, diuji dengan "realitas" yang sesungguhnya. Pada tahap ini pula realitas di-kelampauan itu lebih bisa "direkonstruksi" seteliti mungkin, sejauh **evidence** memungkinkannya. Jika generalisasi harus dibuat — dan memang harus di-

buat — maka ia tidaklah semestinya lagi berdasarkan pradugaan yang meta-historis, tetapi dari pengujian data yang **evident**. Setidaknya begitulah idealnya dan sekurangnya inilah program kerja yang paling awal untuk dipikirkan.

III. "SEJARAH LOKAL DALAM KONTEKS SEJARAH INDONESIA"

Tetapi apa sesungguhnya sejarah lokal? Sebagai permulaan, tentu saja ia adalah **sejarah** dan sebagaimana sejarah lainnya maka ia terlibat dan terkait dalam dimensi waktu. Kemudian karena terkait pada kata "lokal" maka sejarah ini dibatasi ruang lingkupnya pada daerah geografis tertentu yang relatif "kecil". Sejarah lokal bisa menyangkut suatu desa (jika mungkin) atau suatu wilayah yang mencakup berbagai desa (suatu kemungkinan yang lebih besar), atau bahkan lebih besar lagi, suatu propinsi umpamanya. Pada pokoknya yang dijadikan sasaran utama dari penelitian sejarah lokal ialah suatu komunitas dalam suatu daerah geografis tertentu (cf. Finberg & Skipp, 1973) yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan pertimbangan ilmiah si peneliti (Tentu saja dalam perhitungan ilmiah ini terpaut pertanggungjawaban akademis).

Jika hanya ini masalah tentu tidaklah terlalu berat. Bisa saja daerah dianggap "lokal", maka jika begini siapa pun akan sanggup beragumen dengan gaya sofististik alias debat kusir. Namun dalam pengerjaan sejarah lokal tak pula dapat dipisahkan pengertian "lokal" yang bagian dari suatu keseluruhan; atau dari sudut politik administratif "lokal" itu terjalin dalam hubungan subordinatif terhadap pusat. (cf. McVey, 1978: 8 - 9). Jadi tak mungkinlah, misalnya "sejarah lokal tentang Indonesia", dengan argumen "bukankah Indonesia sebagian dari Asia"? Tetapi, kita dapat menerima adanya sejarah lokal

tentang "Tegal", "Cibinong" dan mungkin "Maluku Utara". Dan begitulah seterusnya.

Kalau saja dalam pengertian sejarah lokal dalam konteks Indonesia diadakan pembatasan daerah geografis yang cukup sempit, umpamanya sebuah kota kecil atau suatu wilayah setingkat kecamatan, atau bahkan (untuk beberapa daerah tertentu), pada tahap kabupaten (jika dipakai perbatasan administratif), maka barangkali permasalahan metodologis tidaklah akan terlalu berat. Soalnya mungkin daerah penelitian yang telah dibatasi itu sudah sejak dulu sifatnya "lokal" dan berada dalam ikatan "subordinasi", baik dari sudut politik, maupun dalam pengertian Redfield yang lebih bersifat kultural. (Redfield, 1960). Dalam pengertian yang kedua ini lokal bisa dianggap sebagai "**little tradition**" dalam berhadapan dengan pusat, yang merupakan "**great tradition**". Mungkin dalam suatu bentukan yang "murni" dalam pengertian Weberian dapat dibayangkan bahwa "tradisi kecil" itu merupakan replika dari "tradisi besar". Tetapi bisa pula diperkirakan bahwa "tradisi kecil" itu mengandung anasir-anasir penentangan terhadap yang "besar" dan sebagai ini mempunyai potensi untuk menjadi calon pengganti "tradisi besar" itu. Tentu sebagaimana galibnya dengan bentukan tipe-ideal, yang cenderung mengadakan dikotomi itu, hal ini tidaklah mewakili realitas seutuhnya, tetapi lebih merupakan alat analitis. Dengan alat ini pula pengerjaan ilmiah dipermudah.

Tetapi jika seandainya pada pengertian lokal itu dikenakan pada suatu daerah yang cukup luas, umpamanya propinsi, seperti biasanya dilakukan, maka masalahnya akan lain. Problem pertama yang timbul ialah fakta sederhana bahwa hubungan subordinasi, baik politik, maupun kultural, antara lokal (katakanlah propinsi) dengan pusat atau nasional (Indonesia) adalah sesuatu yang bersifat historis. Artinya tidak se-

lamanya hubungan itu seperti itu. Apa yang lokal atau **periphery** sekarang belum tentu begitu pula keadaannya dahulu. Menjelang berakhirnya Perang Aceh – Belanda, sejarah Aceh adalah "sejarah nasional" bagi Aceh dan barulah ia terikat dalam kaitan subordinasi politik ketika Aceh telah dimasukkan ke dalam **pax Neerlandica**, yang kini menjadi pusat. Barulah setelah 1904 (resminya) "sejarah **nasional** Aceh" menjadi "**sejarah lokal**". Sebagai kesatuan historis, dari mulai masa "mula sejarah" (dengan memakai istilah Yamin) sampai periode kontemporer, "Jawa Tengah" atau "Jawa Timur" dari sudut akademis adalah suatu kemustahilan. Karena dalam suatu jangka panjang, bukan dalam pengertian **lounge duree**, yang menyangkut hubungan yang hampir menetap antara manusia dengan alamnya, tetapi pada tahap perobahan politik dan struktural (Braudel, 1980: 3 - 5) kita berhadapan atas beberapa irama dari pergantian "lokal" dan "pusat" dan bahkan akhirnya berpindahnya "pusat", setidaknya secara politik.

Mungkin saya telah agak jauh memasuki masalah metodologis yang barangkali tak terlalu urgent — jika urgensi harus diartikan "demi kerja lekas selesai". Namun hal ini perlu diingatkan lagi, justru di saat keinsyafan akan pentingnya sejarah nasional makin menaik. Tanpa menyadari hal-hal tersebut di atas kita tidak bakal mempunyai "sejarah nasional" tetapi hanyalah rentetan peristiwa yang dirasakan "**significance**" dari sudut nasional atau lebih jelek, ialah panorama peristiwa yang serba fragmentaris. Hal ini bisa dan telah terjadi.

Sejalan dengan cita-cita dan proses pembentukan bangsa maka dalam studi sejarah pun tampaknya proses inkorporasi dilakukan — peristiwa lokal "diangkat" ke tahap nasional. Proses ini dijalankan tidak selalu berdasarkan **significance** dari peristiwa itu dari sudut logika sejarah, tetapi terkaitkan

pada kenasionalannya dan, lebih sering pula sebagai pengisi waktu **linear** yang telah terentang. Jika 1900 adalah penting dari 1928 demikian pula, maka isilah di tengah-tengahnya. Tidak salah, barangkali, tetapi menimbulkan pertanyaan akan keabsyahannya. Selanjutnya karena kecenderungan berfikir yang teleologis — betapa tidak, bukankah seperti dengan jelas didengungkan Yamin bahwa seluruh peristiwa akhirnya menuju pada "detik Proklamasi"? (Yamin, 1958) — maka timbul pula kecenderungan untuk melihat suatu peristiwa "penting", berdasarkan ukuran "sekarang" sebagai bermula dari peristiwa mendahuluinya. Jika pergerakan "kebangsaan" dimulai oleh Budi Utomo (1908) maka puncaknya terjadi ketika meletus revolusi kemerdekaan (1945); bermula dari Pidie (konon kabarnya sudah sejak abad 1 Hijriah) maka Islam menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh Asia Tenggara. Bahwa adanya kemungkinan kekuatan-kekuatan lain, yang tak terikat dalam untaian (**sequence**) itu tidaklah terlalu penting, karena secara teleologis akhirnya sampailah rentetan peristiwa itu pada keadaan sekarang — sekarang yang maha menentukan. Maka sesungguhnya yang sering terjadi dalam pengerjaan sejarah nasional kita ialah suatu gabungan yang "menarik" antara prosedur uraian (**description**) dan keterangan (**explanation**) yang disebut Walsh (1958: 23) **colligation** (menerangkan dan menguraikan peristiwa dari sudut untaian peristiwa-peristiwa yang dianggap berkaitan) dengan strategi Perang Pasifik yang dijalankan oleh Mac Arthur, **leap frog** alias loncatan katak. Dalam kecenderungan seperti ini tak perlu terlalu heran, jika sekiranya berdirinya Sekolah Diniyah Putri (1915) di Padang Panjang, akan dijelaskan dan diterangkan lebih dulu dari sudut kebangkitan wanita, yang dimulai oleh Kartini. Tidak perlu dipermasalahkan apakah si pendiri sekolah wanita tersebut pernah mendengar nama Kartini ketika ia memulai usahanya. Yang pasti ialah dalam

untaian peristiwa itu Kartini telah lebih dulu muncul. Ini hanya contoh, dan contoh-contoh lain bisa diajukan.

Berbagai penilaian moral bisa diberikan terhadap kolonialisme tetapi, seperti yang pernah juga saya katakan pada kesempatan lain, yang jelas sekali ialah bahwa peristiwa ini merupakan suatu intervensi historis terhadap dinamik kehidupan dari masyarakat yang mengalaminya. Karena intervensi inilah, umpamanya, pertumbuhan organik dari berbagai masyarakat yang semula merupakan suatu "kesatuan historis", dalam arti kaitan "pusat" dan "lokal", menjadi mencair. Apapun kemungkinan yang terlekat pada kesatuan itu maka dengan intervensi ini menjadi buyar — antara "kemungkinan" dan "aktus" telah terbentang suatu jurang yang tak terjembatani. Dengan intervensi ini pula perubahan yang diperkenalkan dari luar tak selalu bisa menemukan pasangannya di dalam terhadap masyarakat jajahannya. Karena itu terjadilah berbagai macam ketidakselarasan dalam perkembangan sosial dan selanjutnya bermacam jurang struktural pun terbentang pula. Dengan pengalaman historis ini maka makin jelas pula betapa telah terkacaunya pengertian lokal dan nasional dalam pengerjaan sejarah dan terbaur serta terkabur pulalah pengertian tradisi "kecil" dan "besar" itu. Berbagai corak pluralisasi yang bermula dari suatu proses diskontinuitas sejarah pun terjadilah.

Sebab itu dalam pengerjaan sejarah lokal — apapun daerah perbatasannya — mau tak mau kita harus menghadapkan diri pada waktu, yang merupakan wadah dari peristiwa yang kadang-kadang bisa dirasakan bersifat "tirani" itu. Konsep "waktu" memang ambivalen, di satu pihak ia adalah riil, objektif, tetapi sekali ia adalah pula subjektif, kultural. Jika yang pertama adalah waktu historis — "17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamkan" — maka yang kedua adalah suasana hati — "maka berakhirlah 350 tahun pen-

jajahan". Jika yang pertama ialah peristiwa yang bertanggal, maka yang kedua adalah konsepsi aktor terhadap waktu. (Berkhofer, 1969: 211 - 269). Jika untuk pertama objektif, yang kedua subjektif, yang bertolak dari pra-anggapan atau suasana hati tertentu. Kesadaran akan variasi dari konsepsi waktu adalah keharusan tetapi pengaburan dari bermacam variasi itu hanyalah memperkenalkan absurditas dalam sejarah. Dan percampuran-adukan dimensi waktu seperti yang terjadi dalam berbagai usaha pengerjaan sejarah lokal adalah contoh dari kekacauan atas pengertian dimensi waktu ini.

Telah cukup panjang juga pembicaraan saya tentang masalah apa yang pernah disebut Halecki oleh "batasan dan pembagian" dalam sejarah ini. Padahal maksud saya hanyalah mengajukan masalahnya tanpa memberikan penyelesaiannya, tetapi bukankah pernah seorang ahli sejarah berkata, "Pertanyaan harus diajukan, tetapi berbahaya untuk menjawabnya". Ia tentu saja tak terlalu bersungguh-sungguh, tetapi ternyata tak pula terlalu salah.

Namun dari keseluruhan pembicaraan di atas saya harap saya telah menjelaskan bahwa sejarah lokal, seperti halnya dengan sejarah nasional, pada dasarnya bersifat otonom. Otonominya tidak tergantung pada daerah atau lokalisasi itu, tetapi dalam pengerjaan studi sejarah. Ukuran **significance** dan **relevance** dari suatu data (artinya bahan mentah bagi suatu peristiwa atau **event** untuk bisa lulus seleksi menjadi fakta) ditentukan seluruhnya oleh logika dari dinamik lokalitas tersebut.

Tidak bisa suatu peristiwa dianggap penting berdasarkan ukuran yang diberikan oleh logika sejarah dari daerah lain atau bahkan dari sudut pertimbangan sejarah nasional. Hal ini telah saya bicarakan akan panjang lebar (Taufik Abdullah, 1979) tetapi baiklah saya ambil contoh kecil. Pernah para tokoh PKI di

tahun 1925 mengadakan rapat di Prambanan. Dalam rapat itu mereka memutuskan akan memulai "revolusi" melawan kolonialisme Belanda. Akhirnya meletuslah apa yang disebut "pemberontakan komunis" itu di beberapa tempat di Banten, di sekitar Jakarta, dan di Silungkang (Sumatra Barat). Sekarang timbul pertanyaan apakah peristiwa Prambanan itu "**significance**", penting, dari sudut logika sejarah lokal Jawa Tengah? Dari sudut sejarah nasional, memang. Tetapi dari segi sejarah lokal?

IV. BERBAGAI ASPEK METODOLOGIS

Sekarang baiklah saya mengajukan beberapa masalah metodologis dalam pengertian sejarah lokal, yang otonom dalam pengerjaannya, tetapi bersifat subordinasi dalam status lokalitasnya itu. Jika seandainya yang diteliti adalah suatu peristiwa selintas, suatu **nouvelle sounante**, kata Braudel, dengan mengutip istilah lama, yaitu letupan seketika yang terjadi dalam waktu selintas (Braudel, 1980: 27), maka secara metodologis masalahnya tidaklah terlalu berat. Bahkan sebagian besar artikel sejarah bersifat seperti ini — satu peristiwa menarik terjadi pada suatu waktu dan di suatu tempat. Sering masalahnya dihentikan sampai di sana saja. Entong Gendut memimpin perlawanan terhadap tuan tanah di Condet; Haji Hasan menolak menyerahkan padi di Garut; beberapa orang yang menyebut diri "Raden Gunawan" memimpin pemberontakan di beberapa tempat di Keresidenan Jambi dan lain sebagainya. Tetapi ada kalanya dan bahkan sering pula peristiwa seketika itu ditinjau dalam suatu kerangka waktu (**setting**) tertentu dan dikaitkan dalam untaian peristiwa-peristiwa lain. Dalam hal ini dua kemungkinan biasa dilakukan. Pertama, letupan sekejap atau **nouvelle sounante** itu dijadikan fokus untuk menerangkan situasi historis dalam kurun waktu yang

telah ditentukan itu. Inilah umpamanya yang dijalankan oleh Sartono dengan studi "klasik"-nya tentang pemberontakan Cilegon, yang hanya berlangsung beberapa hari itu. (Sartono, 1966). Kemungkinan kedua ialah peristiwa seketika itu dijadikan sebagai salah satu mata rantai dari peristiwa-peristiwa lain. Maka dari padanya kita akan mendapatkan suatu panorama peristiwa; yang satu diikuti oleh yang lain. Beberapa studi yang berjudul "perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme" adalah contoh yang cukup menyolok dalam hal ini. Pada yang kedua kita tak memerlukan masalah metodologis — metodologi apa yang diperlukan bagi suatu daftar peristiwa, selain ketelitian? — sedangkan pada yang pertama, yang menjadikan peristiwa seketika sebagai fokus dalam usaha untuk menerangkan situasi sosial maka semacam kerangka konseptual yang jelas diperlukan.

Tentu saja yang pertama teringat adalah sentilan Fischer tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebutnya **interminable fallacy**, kesalahan memperpanjang cerita kecil, atau sebaliknya, dan, yang lebih mungkin, **fallacy of prosentism**, kesalahan menerangkan peristiwa dari sudut akibatnya (Fischer, 1970: 135 - 140; 147 - 150). Tetapi biarlah segala macam "kekonyolan sejarawan" (**historians' fallacies**), yang dibicarakan Fischer ini sebagai peringatan saja. Ia sendiri telah membuat daftar jenis "kekonyolan itu", jika saya tak salah hitung, jumlahnya sebanyak 112, yang terdiri atas sebelas kategori, yang dikelompokkan atas tiga tema besar. Soalnya ialah bahwa dalam setiap pengerjaan sejarah yang dituntut bukan saja kehati-hatian, tetapi terutama adanya kerangka konseptual yang kuat. Tanpa ini maka beragam "kekonyolan" bisa terjadi.

Apakah kita akan memakai pendekatan yang bertolak dari suatu peristiwa, sebagai fokus, atau ingin mengerjakan

suatu **total history**, "sejarah umum", maka suatu model struktural sangat diperlukan. Model struktural inilah yang dipakai untuk menentukan penting atau tidaknya peristiwa ("fakta-historis") dan dengan ini pula masalah kausalitas dapat dipertimbangkan, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan model struktural itu? Untuk mudahnya tentu bisa saja kita mengambil salah satu dari berbagai macam model yang telah tersedia. Baca saja buku-buku teori dan carilah yang sesuai di hati. Tetapi resiko dari prosedur kerja ini ialah terjadinya pemaksaan konsep atau model yang berasal dari konteks historis yang lain dari bertolak keprihatinan intelektual (**intellectual concern**) yang lain pula pada sasaran penelitian daerah sendiri dan (semestinya) bertolak pula dari suatu **concern** yang berakar dari kesadaran filosofis sendiri (sebutlah itu patriotisme atau cita-cita Pancasila).

Sebab itu, cara kedua, sebaiknya model itu dicari dengan lebih dulu menentukan prosedur kerja. Setelah kerja heuristik dan berbagai macam kritik, yang merupakan persyaratan elementer dari penelitian sejarah itu dilakukan maka yang perlu dibuat lebih dahulu ialah semacam "skenario percobaan" dari penulisan sejarah. Berdasarkan percobaan inilah model itu dibuat dan ditest. Jadi prosedur kerja bersifat dialektik yaitu dari "fakta-sejarah" (yang masih sementara) dibuat suatu model (juga masih sementara), kemudian model tersebut dikenakan lagi kepada "fakta". Sebagai contoh empiris dari hal inilah kategori "kerajaan maritim dan agraris" dari van Leur, atau yang lebih rendah daerah jangkauannya dan lebih bertolak dari situasi lokal ialah usaha saya memperkenalkan konsep "schakel society" dalam menerangkan corak hubungan kolonial.

Tentu masalah perlunya suatu **structural model** dalam penulisan sejarah tidak harus menyangkut sejarah lokal saja.

Tetapi, justru karena sifat ambivalen dari ejarah lokal, yang otonom dalam pengerjaannya, tetapi terikat pada kaitan subordinasi dalam sistem yang lebih besar, maka masalah model ini makin diperlukan. Jika tidak, maka sejarah yang akan didapatkan hanyalah suatu kronikel yang merembes ke kiri ke kanan, tetapi tak mempunyai kedalaman dan keutuhan logika.

Karena sejarah lokal lebih mendekatkan kita kepada dunia aktor sejarah maka beberapa pertimbangan lain perlu diperhatikan juga. Pertama, masalah kategori dalam sejarah. Penulisan sejarah tidaklah mungkin tanpa pemakaian kategori, seperti juga dalam bahasa kita tak akan mungkin berkomunikasi tanpa adanya abstraksi dari satuan-satuan konkrit (Kita katakan "kursi", padahal yang riil sesungguhnya ialah "kursi ini", "kursi itu"). Dengan kategori inilah kita bisa mengatakan, "petani", bukannya pak Amat, pak Badu, dan tak terhitung bapak-bapak petani lagi; dengan kategori pula, kita bisa membedakan "pemberontakan", "perampokan", "perlawanan", dan seterusnya. Kategori bermula dari perbandingan sejarah. Perbandingan sejarah tidaklah berarti bahwa sejarah satu negeri harus dibanding dengan negeri yang lain yang diperkirakan "seimbang", seperti yang pernah diajukan oleh seorang tokoh. Jika ini yang dilakukan memang "kekonyolan sejarawan" telah terjadi. Tetapi perbandingan sejarah yang syah haruslah bertolak dari unit analisa yang telah dirumuskan. Perbandingan baru bisa dilakukan jika pertanyaan pokok telah dipadukan. Dengan prosedur perbandingan seperti ini, maka meskipun "event", sebagai "peristiwa" yang utuh bersifat unik dan tak-terulang, namun terhadap corak dari "setting" atau kerangka-waktu peristiwa semacam generalisasi bisa dilakukan. Dengan begini kita bisa berbicara tentang meletusnya "Revolusi Tiongkok", "Revolusi Indonesia" atau bahkan "Revolusi Industri", dan tentu saja "Revolusi Sex". Semuanya berbeda,

tetapi dengan perbandingan dari unit-unit analisa yang telah dirumuskan suatu "kategori" terhadap peristiwa atau gejala sosial bisa diberikan.

Demikian pula halnya dengan pemakaian kategori-kategori sosial, tidaklah terlalu sukar, umpamanya bagi kita untuk mengatakan bahwa "tuan A adalah tokoh kelas atas" dalam masyarakat tertentu yang sedang diteliti. Dari sudut ilmu sosial pernyataan ini mungkin tak perlu terlalu dimasalahkan. Semacam pengertian umum tentang "kelas" boleh dikatakan telah didapatkan. Tetapi dalam konteks lokal, masalahnya mungkin berbeda. Soalnya ialah bahwa "kelas" bukanlah suatu kelompok yang terisolasi tetapi terikat dalam hubungan sosial, baik horizontal, maupun vertikal. Maka kalau begitu, adalah tugas peneliti sejarah lokal untuk memberi "isi" atau "substansi" yang jelas terhadap kategori "kelas" tersebut. Demikian pula, umpamanya, "ulama". Tampaknya sederhana, tetapi dari corak hubungan sosial akan ternyata isi dari pemakaian kategori ulama "di sana", belum tentu sama dengan yang "di sini". Jadi meskipun kita bisa memakai kategori yang telah tersedia, namun perbedaan ataupun nuansa yang mungkin terdapat dalam isi atau substansi dari kategori itu pada daerah penelitian kita benar-benar jelas.

Ketepatan "isi" atau "substansi" kategori yang dipakai sebagai akibat langsung dari fakta bahwa sejarah lokal pada galibnya "memperendah" tingkat abstraksi dan generalisasi yang bisa dilakukan, diikuti pula masalah kedua. Yang menyangkut soal diferensiasi struktural dalam perobahan sosial. Kita kembali sebentar kepada konsep Redfield yang telah disinggung di atas. Apakah perobahan intelektual, misalnya, pada tingkat "pusat", atau lebih tepat "kota", memberikan pantulan pada tingkat "desa"? Atau, jika memakai pendekatan pelapisan sosial, apakah perobahan sikap terhadap sesuatu

hal yang baru di tingkat "atas" adalah "wakil" dari apa yang terjadi pada tingkat "massa"? Baiklah saya ambil contoh yang sederhana. Sudah lama juga para guru dan pegawai, yang telah mengecap sekedar pendidikan Belanda, menganjurkan agar rakyat di pedesaan Sumatra Barat menerima saja rencana pemerintah Hindia Belanda untuk memperkenalkan belasting sebagai pengganti monopoli kopi. Dari sudut perhitungan ekonomis hal ini akan lebih menguntungkan dan akan baik jadinya bagi "anak negeri" — bisa bersekolah dan negeri akan tambah maju. Tetapi reaksi anak negeri? "Bayar belasting pada orang kafir"? "Bagaimana dengan Plakat Panjang"? "Kafir hukumnya yang mengakui pemerintah kafir" dan pemberontakan serta huru-hara yang merata pun terjadi di penggalan pertama tahun 1908 itu.

Intervensi historis — dengan adanya kota, sekolah, sistem kepegawaian, *pakhuis* — telah menyebabkan terjadinya dua corak pengalaman historis, yaitu dialami mereka di kota (mereka yang lebih *exposed* terhadap inovasi dari luar) dan yang di desa atau di negeri-negeri (yang masih secara riil mempertahankan ilusi sebagai orang yang merdeka). Perbedaan pengalaman historis menyebabkan pula berbedanya kesadaran historis. Jika yang tinggal di kota mengatakan "sekolah akan tambah banyak", yang di negeri mengatakan bahwa kalau harus bayar belasting "terpaksa harus pindah ke bulan" artinya lebih baik mati.

Jika contoh ini bisa dilanjutkan, maka dalam situasi ini pulalah perobahan sikap dalam kehidupan beragama yang diperkenalkan oleh para ulama muda, yang kemudian dikenal sebutan "Kaum Muda", memperlihatkan pula perbedaan yang telah terjadi. Sementara mereka yang di kota, terutama para pedagang, lebih terbuka terhadap keharusan berlanjutnya proses ke arah skriptualisasi, sebagaimana Geertz menyebutkan,

(Geertz, 1968), maka penduduk di negeri masih lebih terikat pada kecenderungan kehidupan agama yang "*popular*" (sebagai lawan *official*, ajaran yang sesuai teks-teks doktrin) (Waardenburg, 1979).

Tentu saja masalah ini masih bisa dilanjutkan dengan mempersoalkan, umpamanya, terjadi atau bertambah jelasnya diferensiasi struktural dalam masyarakat sebagai akibat perobahan sosial-ekonomis, baik yang datang dari luar, maupun yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dari sudut pendekatan struktural-fungsional yang dipakai Geertz, mungkin ia benar juga bahwa kecenderungan "*involusi pertanian*" di Jawa sebagai akibat perkembangan yang statis, bahkan menimbulkan apa yang disebut *shared poverty*, kemiskinan yang sama dipikul. Jika tidak, bagaimana masyarakat akan berfungsi? (Geertz, 1963). Tetapi sudut pendekatan lain bisa mempertanyakan bukankah perbedaan yang makin menajam dari kedudukan ekonomis itu malah menimbulkan kelas dan karenanya lebih mengancam apapun kestabilan sosial yang pernah ada (Lyon, 1971). Perdebatan bisa berlanjut, tetapi penyelesaian hanya bisa dicapai dengan penelitian empiris yang teliti. Dan karena itu pula, sekali lagi kerangka konseptual yang jelas makin diperlukan.

Seperti telah disinggung beberapa kali, meskipun sejarah lokal dari sudut logika sejarah haruslah bersifat otonom, dalam kenyataannya ia juga terkait dalam sistem yang lebih besar. Maka semacam jembatan yang bisa menghubungkan yang otonom itu dengan sistem yang lebih luas perlu pula dicari. Makin rendah tingkat lokal yang dijadikan sasaran penelitian makin diperlukan *unifying factor* itu (Baer, 1969 : 30-61). Ongkokham mungkin menemukan dalam mata-rantai kepriyayan ketika ia membicarakan Madiun dan mengkaitkannya dengan sistem yang semula Mataram, kemudian Hindia

Belanda (Onghokham, 1975). Siegel mendapatkannya pada peranan sosial para ulama Aceh yang "in" kalau berhadapan dengan sistem yang lebih besar. (Siegel, 1968). Dan sebagainya.

V. PENUTUP

Dengan menyadari hal-hal metodologis di atas kita bisa berharap bahwa sejarah lokal tidaklah hanya merupakan versi lokal dari sejarah nasional -- seperti yang telah dan terus dilakukan dan barangkali kita tak perlu pula harus selalu disibukkan oleh pencarian "jasa daerah" terhadap negara nasional. Contoh dua buku penting dari penulis asing dan tentang negeri asing di atas memperlihatkan bahwa apapun yang diinginkan dari sejarah lokal, dari sudut ideologis ataupun politis, masalah yang paling pokok diletakkan lebih dahulu ialah pertimbangan akademis. Apakah "sejarah lokal" hanyalah akan dipakai sebagai bahan untuk penulisan "sejarah nasional" atau untuk mengetahui corak dinamik dari berbagai masyarakat etnis-kultural kita sifat akademis yang otonom dari sejarah lokal adalah suatu keharusan. Dengan begini sejarah lokal, yang mungkin hanya memberikan sekedar perspektif baru dan sekedar akumulasi pengetahuan baru tentang lampau, akan dapat memaksa kita meninjau kembali pengertian kita tentang hari lalu itu. Dan, bukankah peninjauan pada hari lampau itu, tak obahnya dengan kunjungan seketika di negeri lain? Dalam kunjungan seketika itu kita tak akan mengerti benar tentang negeri asing itu, tetapi, suatu proses terbalik terjadi. Kita rasanya makin "tahu" negeri sendiri. Analogi ini tidak orisinal dari saya, tetapi dari Braudel. Tetapi betapa benarnya dia. Dan siapa yang tidak mengalaminya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa berbagai harapan bisa dikenakan pada penulisan sejarah -- mulai dari keinginan un-

tuk mendapatkan "album keluarga" (ingin melihat wajah sendiri atau kelompok sendiri yang cerah dalam uraian sejarah) sampai dengan keinginan moralistis yang luhur, yaitu untuk mendidik patriotisme generasi muda – tetapi pembagian kerja harus ada. Dan cangkir kopi saya adalah dalam lapangan yang diuraikan di atas. Yang lain tak jelek dan juga mungkin tak salah etis, tetapi pendekatan akademis, dengan segala tuntutan etis yang tanpa ampun dan kemampuan teknis yang harus selalu disempurnakan, saya anggap saja adalah dasar yang paling kokoh.

Jakarta, 10 Nopember 1981.

SEBUAH CATATAN TENTANG BAGAIMANA LOKALNYA SEJARAH LOKAL

Oleh : T. Ibrahim Alfian

Di Bukittinggi, sejak 22 Oktober 1981 yang lalu, untuk beberapa hari, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan semua Panglima Daerah Militer se Indonesia membahas Program ABRI Masuk Desa. Dalam kesempatan itu KSAD, Jenderal Poniman melontarkan, apakah tidak sebaiknya nanti ABRI juga masuk lingkungan RT/RW di kota-kota, terutama untuk mempertinggi kesadaran nasional masyarakat kota. Ia menilai kesadaran masyarakat kota itu menurun dibanding masyarakat pedesaan. Sebagai contoh ia tunjukkan sikap masyarakat yang seenaknya terhadap lagu kebangsaan yang diperdengarkan sewaktu pertandingan tinju Thomas Americo serta pembukaan PON X di Senayan Jakarta.¹

Kejadian di suatu lokaliti seperti dikemukakan di atas ternyata tidaklah lokal, tetapi mempunyai aspek yang lebih luas dan harus bisa dilihat dalam perspektif yang lebih luas pula. demikianlah suatu kejadian di sebuah lokaliti dapat bergema ke luar lokaliti itu hingga dapat berkembang menjadi suatu masalah nasional, bahkan adakalanya internasional.

Pada bulan November 1883, sebuah kapal Inggris, *Nisero*, tersangkut di negeri Teunom, pantai Aceh Barat. Raja Teunom, Teuku Imum Muda, memerintahkan agar isi kapal *Nisero* itu disita dan awak kapalnya ditangkap.² Pihak

¹ Kompas, 24 Oktober 1981: VIII.

² Lihat W. Bradley, *The Wreck of the Nisero and Our Captives in Sumatra*, 1884. H.C. van de Wijck, *De Niserozaak*, 1884. W.Ph. Coolhaas, *De Nisero-kwestie*, Professor Harting en Gladstone, 1964.

Belanda menuntut agar awak kapal itu dibebaskan oleh pihak Aceh, akan tetapi Raja Teunom menuntut uang tebusan yang amat tinggi. Pihak Belanda enggan membayarnya. Inggris kemudian mengirimkan kapal perangnya, *Pegasus*, menuju Teunom dengan tugas dari Pemerintah Inggris untuk langsung, tidak melalui Belanda, mengadakan hubungan dengan Raja Teunom guna membebaskan para sandera itu. Gubernur Belanda di Aceh, Laging Tobias, dengan pahit terpaksa membiarkan tindakan Inggris itu guna menghindari kesulitan-kesulitan dengan kerajaan Inggris. Usaha Inggris melalui kapal perangnya tidak memberi hasil apa-apa dalam membebaskan sandera-sandera itu.

Pada 4 Januari 1884 Belanda mengirimkan sepasukan tentaranya ke Teunom. Pasukan ini gagal juga, oleh karena para sandera telah dibawa masuk lebih jauh ke pedalaman oleh Teuku Imum Muda. Juga kedatangan W.E. George Maxwell, anggota Dewan Jajahan Inggris dari Singapura ke Teunom untuk membebaskan para sandera mengalami kegagalan, oleh karena tuntutan uang tebusan yang diajukan oleh Raja Teunom terlalu tinggi.³ Setelah itu Gubernur Laging Tobias meminta pertolongan pada T. Umar, yang sementara itu sudah berbaik-baik dengan Belanda, untuk mengusahakan agar para tawanan tersebut dapat dibebaskan. Pada 3 Juli 1884, Umar dengan 32 orang anak buahnya dikirim ke Teunom melalui jalan laut. Sebelum sampai ke tempat tujuan, T. Umar mene-waskan pendayung-pendayung sampan yang membawanya dan menguasai senjata dan amunisi Belanda serta melarikan diri.⁴

Setelah mengetahui, bahwa Belanda sama sekali tidak berdaya menghadapi persoalan ini, Pemerintah Inggris tidak saja

³ E.B. Kielstra, "Atjeh onder het Bestuur van den Gouverneur Laging Tobias," *IMT* (1887), hlm. 541.

⁴ *Ibid.*, hlm. 521.

ingin campur tangan agar awak kapal **Nisero** itu dibebaskan, tetapi pada umumnya juga supaya keadaan perang di Aceh berakhir.⁵ Hal ini ditolak oleh Belanda. Belanda setuju mengadakan hubungan dengan raja Teunom bersama-sama dengan Inggris dan untuk itu ditugaskanlah Laging Tobias dan Maxwell. Akhirnya raja Teunom setuju untuk menukar tawanan tersebut dengan tebusan 100.000 ringgit dan disamping itu blokade Belanda terhadap pelabuhan Teunom dicabut oleh pihak Belanda.⁶

Pertulisan dari suatu lokaliti, baik besar maupun kecil, tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor luar yang mempengaruhinya, dengan perkataan lain, dapat terlihat bahwa baik "aspek nasional" maupun "aspek internasional" tercermin dalam dinamik lokal.

Terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam suatu lokaliti dapat timbul berbagai macam interpretasi situasi dari pihak pelaku sejarah sendiri. Amat menarik untuk dilihat, seperti dikemukakan oleh Clifford L. Lord, bagaimana sejarah lokal itu dapat memberi gambaran perihal orang hidup bersama, bekerja bersama, bersesuaian paham atau tidak bersesuaian paham dalam pekerjaan, dalam politik, perdagangan, pemerintahan dan dalam tujuan-tujuan sosial dan kultural.⁷

Teungku Chik di Tiro Syaikh Muhammad Saman, dalam usaha memobilisasi kekuatan untuk memerangi Belanda yang melakukan agresinya terhadap kerajaan Aceh pada 1873, tidak hanya menulis surat-surat kepada para pemimpin adat di Aceh

⁵ *Ibid.*, hlm. 545.

⁶ J. Kreemer, *Atjeh*, I, 1922, hlm. 24. Cf., KV, 1884. Kielstra, *op. cit.*, hlm. 545.

⁷ Philip D. Jordan, *The Nature and Practice of State and Local History*, 1958, hlm. 14.

supaya tetap ingat pada jalan Allah, akan tetapi juga mengadakan surat-menyurat dengan pihak Belanda, bukan untuk berkompromi, tetapi untuk menarik garis pemisah antara pihak Belanda yang dianggapnya kafir yang hendak menjajah dengan orang Islam yang ingin merdeka. Masalah terpenting yang di kemukakannya adalah agar pihak Belanda bersedia memeluk agama Islam.

Pada 1885 Tgk. Chik di Tiro tersebut di atas menulis surat kepada asisten residen Belanda di Kutaraja dan menyarankan bahwa setahun sebelumnya, yakni pada 1884, ia pernah mengirim surat kepada pihak Belanda mengenai masalah perdamaian. Ulama ini mengemukakan bahwa perdamaian baru tercapai setelah gubernur Belanda mau memeluk agama Islam, tetapi pihak Belanda tidak memberi jawaban terhadap usulnya itu.⁸ Dalam surat tahun 1855 itu, Tgk. Chik di Tiro menyatakan lagi, antara lain sebagai berikut:

... jika boleh tuan-tuan masuk agama Islam dan menurut syariat Nabi itulah yang terlebih baik atau tuan-tuan sejahtera dunia dengan tiada aib keji lari pontang-panting tiap-tiap sawah dan serokan dan hutan dan jalan ... dan yang terlebih jahat lagi itu siksa akhirat, dalam neraka jahanam dengan hukum Tuhan yang amat kuasa maka jika tuan-tuan masuk Islam sama-sama orang Aceh maka kami harap kepada Tuhan seru sekalian alam terpelihara daripada nyawong [nyawa] dan darah dan arta dan megah dan terpelihara daripada aib keji tangkap dibawa ke mana-mana atau terbunuh dengan kehinaan barangkali jika tuan-tuan dengar dan turut seperti nasehat kami ini dapat untung baik dapat kemegahan jadi tuan akan kepala kami dan dapat arta ...⁹

Tiga tahun lamanya, rupanya, surat Tgk. di Tiro ini ibarat batu jatuh ke lubang, senyap, tiada mendapat tanggapan dari pihak Belanda.

⁸ Surat Tgk. Chik di Tiro pada Asisten Residen di Kutaraja, 16 Zulhijjah 1302 K [6 Oktober 1885], Cod. Or. 7321, UBL. Dalam surat ini Gubernur Belanda disebut dengan istilah Tuan Besar.

⁹ Verb. 1888 H, 12.

Kemudian pada bulan Mei 1888 Tgk. di Tiro melayangkan lagi sepucuk surat dari benteng Aneuk Galong kepada pihak Belanda di Kutaraja, yang menyatakan bahwa sudah sekitar enam belas tahun Kompeni memerangi Negeri Aceh, yang menurut Tgk. di Tiro "sangat kecil lagi dhaif raja dan hina rakyat"nya, berapa sudah serdadu mati, berapa sudah uang Kompeni yang rugi, berapa pedagang menjadi untung, rugi dan berapa sudah rakyat Aceh dan kampung-kampung yang binasa. Ia seterusnya bertanya, mengapa Gubernur Belanda tiada berfikir dengan matahari mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, yang laba dan yang rugi, dan jalan hidup dan mati, karena tiap-tiap anak Adam itu ada matahari yang terang. Pihak Aceh dan pihak Belanda berasal dari anak cucu Adam, anak Nuh 'alaihi wasallam, akan tetapi berlainan sedikit siapa yang menjadi ikutan mereka: rasul pihak Aceh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam pesuruh Allah Ta'ala, dan di pihak Belanda Nabi Allah Isa yang roh Allah dan pesuruhnya.¹⁰

Kemudian sambungnya:

... Kompeni perang Negeri Aceh dan negeri lain-lain syari'at siapa Kompeni ikut dan adat mana Kompeni turut dan patut siapa Kompeni perbuat hingga berapa ribu meliun [sic!] orang Aceh dan orang lain-lain Kompeni aniaya dengan tiada salah suatu jua ... hendaklah Tuan Besar harus pikir dan habis sawab [pertimbangan] jika Allah subhanahu wa Ta'ala tunjuk akan Tuan Besar jalan yang betul ... Tuan Besar masuk agama Islam mengucap dua kali-mah syahadat Insya Allah sampailah Tuan dunia akhirat, sempurna dunia dapat kerajaan [memerintah] dengan senang, boleh Tuan Besar perintah atas Negeri Aceh ini, dengan suka kami sekalian dan sempurna akhirat masuk surga baik banyak takhta dan bertambah-tambah rahmat selama-lamanya ...¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Van Teijn dalam surat jawabannya sependapat dengan Tgk. Chik di Tiro bahwa yang sebaiknya adalah supaya perang dapat segera berakhir, karena telah cukup banyak orang-orang yang mati, kampung-kampung yang rusak dan hancur dan telah cukup banyak pula uang keluar untuk itu dengan tiada guna dan karena itu diperlukan perdamaian sebagai penggantinya. Van Teijn mengharapkan pendapat Tgk. di Tiro untuk membina kesejahteraan rakyat Aceh, tanpa dengan itu merusak agama dan melanggar adat Aceh. Selanjutnya ia mengusulkan untuk dapat saling bertemu dengan Tgk. di Tiro, agar ulama ini memilih tempat di Kutaraja atau tempat lain yang disukainya, dan kalah hal ini disetujui oleh Tgk. di Tiro maka Belanda akan membangun sebuah rumah untuknya dan dapat bekerja dengan tenteram asal saja tidak untuk menjatuhkan kewibawaan Van Teijn dan memerangi pemerintah Hindia Belanda. Mengenai pandangan Tgk. Chik di Tiro agar pihak Belanda masuk agama Islam untuk memulihkan ketenteraman di Aceh tidak dapat disepakati oleh Van Teijn, oleh karena Pemerintah Hindia Belanda tidak melakukan perang agama.¹²

Sudah barang tentu Tgk. Chik di Tiro tiada berkenan akan jawaban Van Teijn itu. Ulama ini mengemukakan dalam surat balasannya bahwa tidak mungkin ada perdamaian dengan Kompeni selagi kafir masih berada dalam Negeri Aceh.¹³

Menteri Jajahan Belanda Keuchenius turut memberi reaksi atas ajakan masuk Islam dari Tgk. di Tiro. Ia menulis kepada Gubernur Jenderal di Betawi supaya menginstruksikan kepada Gubernur Van Teijn untuk menjawab surat Tgk. Chik di Tiro dengan mengemukakan bahwa tuntutan

¹² Missive GBA, 28 Mei 1888 (17 Ramadhan 1305), dalam Verb. 1888 H, 12.

¹³ Surat Tgk. di Tiro, 29 Ramadhan 1305 H (7 Juni 1888). Kab. Geheim 7 Februari 1890 L 1.

ulama ini agar pihak Belanda masuk Islam adalah tidak adil dan Tgk. di Tiro harus memperhatikan Surah al-Baqarah ayat 257 yang antara lain berbunyi bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Seterusnya Menteri Jajahan itu menulis agar diusahakan meyakinkan orang Aceh bahwa Pemerintah Belanda tidak bermaksud menjalankan paksaan dalam agama, tetapi dengan sungguh-sungguh menginginkan terciptanya kedamaian, ketertiban, kesejahteraan dan keadilan di kalangan orang-orang Aceh.¹⁴

Terhadap pernyataan Belanda ini, Tgk. Chik di Tiro mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

... dari hal tuan suruh usaha yang memberi selamat negeri dan makmur serta tuan sebut tiada sekali-sekali tuan maksud huru-hara negeri, maka yang demikian itu sangat mustahil pada akal dan pada hakikat oleh karena dalam negeri ini sekarang dalam berlawanan hari dengan malam, matahari dan bulan, perempuan dengan jantan, kelam kabut dengan terang, air dengan api, munafik dengan mukmin, kafir dengan Islam, raja kafir dengan raja Islam, dunia dan akhirat, surga dan neraka, nikmat dengan azab, sakit dengan mangat, selama kekal dalam berlawanan, sekali-kali tiada boleh mupakat ijma' maka jika tiada mupakat ijma' huru-haralah selama-lama. Insya Allah Ta'ala yang harap kami kepada Allah Ta'ala itu binasalah yang satu dalam keduanya yakni yang **zallamah** dan yang batal.¹⁵

Usaha Tgk. Chik di Tiro untuk menghentikan peperangan dengan taktik membawa Belanda kepada agama Islam tiada berhasil. Demikian pula Belanda tiada berhasil membawa Tgk. di Tiro berdiam di Kutaraja dan berdamai dengan Belanda.¹⁶

¹⁴ Surat Menteri Keuchenius, Kab. H 12/no. 50, 15 Agustus 1888, **Verb. 1888, H 12**. Keuchenius tidak secara lengkap mengutip seluruhnya ayat itu. Ia hanya menulis sebagai berikut: "Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus ...".

¹⁵ Surat Tgk. di Tiro, 23 Sya'ban 1306 H (24 April 1889), Lamp. C dari surat GBA, 26 September 1889, no. 209/K, dalam **Kab. Geheim 7 Februari 90 L I. Zallamah** artinya yang dianggap zalim.

¹⁶ Telegram Gub, Van Teijn pada GJHB, **Kab. 2 Mei 1891, C 6**.

Bila fokus penelitian ditujukan pada aspek tertentu dari Sejarah Lokal, yang tampak menonjol adalah hal-hal yang lebih detail yang terjadi dalam sejarah lokal itu, sedangkan yang bersifat nasional ditempatkan pada posisi latar belakang. Dalam upaya menulis sejarah nasional, detail yang terjadi dalam suatu lokaliti atau daerah tertentu yang tidak bertautan dengan aspek tertentu yang dianggap dominan, tidak akan mendapat tempat dalam penulisannya. Hanya bahan-bahan yang esensial saja bagi suatu generalisasi yang akan dirakit dari sejarah lokal oleh sipeneliti sesuai dengan pendekatan atau kerangka referensi atau orientasi yang ada padanya.

Catatan Singkat Tentang Konsep Sejarah Lokal

Oleh: Teuku Ibrahim Alfian

Merumuskan sebuah konsep berarti memperinci pengertian yang akan digunakan terhadap suatu kata tertentu. Terbuka bagi setiap orang untuk menyatakan apa yang dipahaminya tentang suatu kata selama ada hubungan arti yang jelas terhadap apa yang dinyatakannya itu. Idee yang tersimpul dibelakang pernyataan itu yang dimaksudkan sebagai alat dari pada pikiran manusia harus berisi pengertian mengenai fenomena yang ada pertaliannya secara essensiil dan dapat dibedakan pula secara essensiil dari pada fenomena yang lain.

"Lokal" sebagai kata sifat adalah posisi dalam ruang dan dapat diartikan dengan setempat; "daerah" dalam catatan ini adalah posisi dalam ruang yang dihubungkan dengan pembahagian ketatanegaraan setingkat propinsi.¹ Bila kita menyeidiki sejarah daerah Jawa Tengah, maka yang dimaksudkan adalah sejarah daerah swatantra tingkat I Jawa Tengah, sedangkan sejarah lokal adalah sejarah dari pada unit-unit yang lebih kecil dari suatu daerah administrasi ketatanegaraan tingkat propinsi yang terdiri dari sejarah kabupaten, kota dan desa. Pusat perhatian sejarah lokal adalah lingkungan sekitar, neighborhood. Konsep neighborhood ini kita pinjam dari Philip D. Jordan yang menyatakan bahwa kata ini disamping berarti distrik atau lokaliti (locality, localiteit) berarti juga lembaga-lembaga politik, ekonomi dan sosial yang beroperasi di dalam lokaliti itu.² Jadi neighborhood itu tidak hanya sebuah desa, kota kecil, kotamadya, tetapi dapat juga perkumpulan ke-toprak, sebuah institut keguruan, epidemi, pengangguran,

dan sebagainya. Pendek kata menurut Jordan, lingkungan sekitar merupakan fakta dan simbol; segala hal yang dapat dijadikan topic dalam penyelidikan sejarah lokal itulah yang diartikannya dengan konsep neighborhood itu.³

Ada berbagai aspek dari pada sejarah lokal yang dapat diselidiki, misalnya aspek politis, ekonomis, sosial dan kebudayaan. Sejarawan dapat menulis misalnya tentang perkembangan seni tari di Yogyakarta, tentang kegiatan orang-orang China di Semarang, tentang kehidupan dan kebiasaan orang-orang Tengger, tentang sejarah kota Pekalongan, dan sebagainya. Clifford L. Lord menulis bahwa: "the study of history at the local level – the study of people – reveals how things really happen; how things act and react, how the wheels and gears of history mesh and cog with one another".⁴ Lord yang menggarap sejarah lokal itu dengan approach sosiologis menambahkan bahwa sejarah lokal memberi gambaran bagaimana orang hidup bersama, bekerja bersama, bersesuaian paham atau tidak bersesuaian paham dalam pekerjaan, dalam politik, perdagangan, pemerintahan dan dalam tujuan-tujuan sosial dan kulturil.⁵

Sejalan dengan beredarnya waktu sejarah lokalpun berubah pula; sejarah lokal makin berkurang kelokalannya. Suatu daerah geografis yang dahulunya sedemikian terisolasinya hingga ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, menanam bahan makanan secara lokal, pemasarannya dilakukan secara lokal, pendeknya semuanya bersifat lokal, kini sudah tidak demikian lagi. malah dengan Neil Armstrong menjejakkan kakinya di bulan, manusia memasuki babakan baru dalam sejarahnya dan janganlah haram jika kelak sejarah ummat manusia di bumi ini akan menjadi sejarah lokal pula.

Karena setiap lokaliti baik kecil maupun besar senantiasa mendapat pengaruh dari faktor-faktor luar lokaliti itu, maka

dalam artian sesungguhnya sejarah lokal itu sebetulnya tidak ada. Bukanlah lokal itu senantiasa merupakan bahagian dari sesuatu yang lebih besar? Meskipun demikian suatu peristiwa yang terjadi disuatu lokaliti itu dapat mempengaruhi perkembangan sejarah nasional suatu bangsa. Masalahnya terletak pada titik berat perhatian dari pada sipeneliti.

Bila ia menyelidiki sejarah nasional ia berusaha mendapatkan pandangan yang menyeluruh, sedangkan detail yang terjadi disuatu daerah yang tidak bertautan dengan persoalan yang lebih luas tidak akan mendapat tempat dalam penulisannya. Demikian pula dalam penulisan sejarah daerah yang tampak menonjol adalah persoalan-persoalan daerah itu secara keseluruhan, sedangkan yang bersifat nasional hanya merupakan backgroundnya saja. Kemudian dalam menghadapi sejarah lokal, maka lensa research diarahkan untuk memajukan kedepan suatu detail dengan menempatkan detail yang lain pada posisi latar belakang.⁶

Meskipun banyak hal tidak bisa ditulis secara eksklusif dari sudut lokal⁷, seorang peneliti tidak dapat lepas dari bahan-bahan suatu lokaliti bila hal itu merupakan bahan yang essensiil bagi generalisasi yang harus dicapainya.⁸

C A T A T A N

1. Sebuah propinsi dapat memiliki lebih dari satu wilayah (area) kebudayaan, misalnya di daerah Aceh ada wilayah kebudayaan Gayo-Alas dan ada wilayah kebudayaan Aceh. Yang dimaksud dengan area (wilayah) kebudayaan ialah suatu wilayah yang pola-pola atau elemen-elemen kebudayaan tertentu yang dimilikinya sedemikian menonjolnya sehingga dapat dibedakan dari wilayah-wilayah yang lain. Lihat Lewry Nelson, *Rural Sociology* (1948), hlm. 8.
2. Philip D. Jordan, *The Nature and Practice of State and Local History*, (1958), hal. 17.
3. Ibid.
4. Stevens, et. al., *Making Our Heritage Live*, hal. 133, dalam Jordan, *op. cit.*, hal. 14.
5. Ibid.
6. Ibid. hal. 8.
7. Lihat misalnya John R.W. Smail, *Bandung in the Early Revolution, 1945-1946; A Study in the Social History of the Indonesia Revolution* (1964).
8. Lihat misalnya Sartono Kartodirdjo, *Pergerakan Sosial dalam Sejarah Indonesia* (1967).

Dikutip dari: LEMBARAN SEJARAH
No. 6, 1970, hlm. 43-4.

SEJARAH LOKAL

Oleh: Onghokham

Ketika saya diminta untuk berbicara dalam pannel "Sejarah Lokal" dari seminar sejarah ini maka saya tidak dapat menghindarkan diri seperti lazimnya untuk menanyakan apa sejarah lokal itu? Siapa yang menulis sejarah lokal? Memang disertasi saya adalah mengenai "Madiun dalam abad ke-19" akan tetapi ada sub-judulnya yang agak umum yang berbunyi: "Priyayi dan Petani dalam abad ke-19". Taufik Abdullah, Sartono Kartodirdjo, Yang Aisyah, dan beberapa lagi menulis secara berturut sejarah Masyarakat Minangkabau dalam abad ke-20,¹ Pemberontakan di Banten dalam tahun 1882,² Pemberontakan di Jambi pada permulaan abad ke-20 dan seterusnya.³ Apa karya-karya ini dimaksudkan sebagai sejarah lokal? Bagaimana dengan karya Alfian mengenai Aceh dan Belanda pada akhir abad ke-19?

Karena persoalan-persoalan di atas ini maka saya akan mengajukan berbagai observasi teoritis mengenai penulisan sejarah lokal dan arti sejarah lokal serta sejarah lokal apa yang saya rasa memiliki relevansi bagi kita, atau adalah benar-benar sejarah. Yang terakhir ini berlainan dengan berbagai hasil sejarah lokal. Dengan ini saya mungkin akan menduplisir atau mengulangi apa-apa yang akan dikatakan dalam tinjauan umum mengenai sejarah lokal yang dibawakan Dr. Taufik Abdullah. Bila demikian maafkan saya dan lupakan saja bagian ini.

Baru dalam bagian ke-dua paper saya maka saya akan mengutarakan dorongan dan isi dari "Keresidenan Madiun. Priyayi dan Petani dalam abad ke-19"⁴ yaitu disertasi saya

yang dalam bentuk singkat terbit sebagai *The Inscrutable and the Paranoid.: "An Investigation onto the Sources of the Brotodiningrat Affair"* dalam buku yang di-edit oleh Dr. Ruth McVey *Southeast Asian Transitions. Approaches Through Social History*, terbitan Yale Univ. Press, New Haven 1978. Buku mana diterbitkan sebagai kenang-kenangan bagi almarhum Profesor H.J. Benda.

Dalam arti klasik sejarah lokal adalah sejarah daerah dengan perhatian khusus pada daerah tersebut. Biasanya sejarah lokal ini ditulis oleh orang-orang yang amatir-bukan sejarawan profesional-akan tetapi orang-orang yang enthusias mengenai daerah dan keanehan ke-anehannya atau hasil-hasilnya. Mereka agak chauvinis mengenai daerah dan memang ingin menonjolkan daerah. Namun penonjolan daerah ini dilakukan tanpa bersifat terlalu agresif atau menyinggung perasaan daerah orang lain sebab penulisan sejarah daerah insyaf bahwa dia menulis mengenai sesuatu yang terbatas dan sifatnya polos lain dari pada para penulis sejarah "nasional" (pusat) yang sering agresif dan dapat menyinggung perasaan karena kesombongan mereka.

Bagaimana juga sejarah lokal semacam ini memiliki prestige yang rendah sebab sifatnya adalah lebih antikwaris (antiquair) daripada sejarah. Penulis-penulis sejarah lokal banyak memberikan informasi dari yang detail sampai yang aneh tanpa dapat menghubungkan yang satu dengan yang lain dan sama sekali tidak melihat kerangka kerangka yang lebih besar. Kecuali mungkin memberikan keinsyafan keistimewaan daerah dan sering inipun tidak sebab ke-istimewaan daerah hanya dapat dilukiskan dalam rangka keseluruhan atau dalam perbandingan dengan daerah lain. Sedikit sekali kegunaan sejarah daerah seperti dilukiskan diatas. Sering kali dalam sejarah-sejarah daerah (lokal) semacam demikian dongeng

rakyat (floklore), adat istiadat, archeologi, pra-sejarah dan lain-lain dimasukkan didalamnya. Pun dari sejarah-sejarah lokal ini tidak dapat disusun sejarah nasional atau daerah-daerah lebih luas. Sebab kuriositas lebih mendominir sifat sejarah lokal tersebut daripada proses perkembangan yang menjadi obyek sejarawan. Disamping tidak ada sikap kritis maupun kritik terhadap masa lampau dari sejarawan lokal, yang sebenarnya merupakan syarat sejarawan dalam arti sebenarnya. Sejarawan lokal hanya memiliki rasa kagum.

Dilain pihak sejarawan lokal ini sangat berjasa terhadap pengawetan yang kuno di daerah dan dengan demikian dapat mempertinggi kesadaran sejarah. Mereka juga sangat aktif. Mengenai yang terakhir ini yaitu aktivitas mereka ada contoh-contoh dari yang tradisional, yang kolonial sampai kini. Contoh-contoh tradisional adalah Babad Babad Daerah seperti Babad Banyumas, Babad Ponorogo, Babad Pacitan dan lain-lain, (Bukan Babad yang berasal dari kraton raja seperti Babad Tanah Jawi, Babad Sengkala dan lain-lain). Dalam Babad-Babad daerah tersebut keluarga bupati yang diperhatikan pusat hanya disebut sebagai asal keturunan, perkawinan dan persaudaraan dari keluarga bupati setempat. Kadang-kadang pusat disebut sebagai raja yang mengangkat bupati setempat atau sebagai sumber suatu peristiwa seperti peperangan saudara, pemberontakan dimana bupati setempat ikut serta.

Tidak berbeda dari ini adalah sebenarnya sejarah-sejarah lokal masa kini dengan contoh klasik, seri Republik Indonesia yang melukiskan riwayat daerah-daerah Republik Indonesia dari kira-kira zaman pergerakan nasional sampai tahun penerbitannya yaitu pertengahan 1950-an yang terdiri dari sebanyak jilid seperti jumlah propinsi Republik Indonesia pada waktu itu (Irian Jaya maupun Timtim belum termasuk). Juga dalam

karya ini kecuali dalam jilid **Jakarta** gerak gerik sejarah pusat sedikit disebut kecuali proklamasi/Republik Indonesia-nya dari mana legalitas perkembangan daerah didasarkananya.⁶

Perkembang-biaknya penulisan sejarah lokal sebenarnya adalah zaman kolonial yaitu dari kira-kira abad ke-19 sampai 1942. Contoh-contoh sejarah lokal ini kita ketemukan dalam majalah-majalah seperti *Verhandeligen Batavia-asch Genootschap*, *Tijdschrift Bat. Genootschap TLV*, *TNI*, *Indische Gids*, dan akhirnya majalah-majalah semi kolonial pribumi seperti *DJAWA*, *Penerbitan Kiertya Lieftrinck*, *Cultureel Indie*, *Indie Oud en Nieuw*, dan lain-lain. Residen lokal-Kontrolir Lokal, dan lain-lain dengan semangat besar ingin memperkenalkan daerah-daerah masing-masing. Beberapa babad lokal ditulis atas anjuran para pejabat Belanda ini antara lain **Babad Kediri** (1835).

Kalau diatas saya agak negatif mengenai sejarah lokal dalam arti klasiknya maka sebenarnya sejarah lokal seperti dilukiskan diatas sangat berguna melatih mahasiswa-mahasiswa sejarah dalam disiplin ilmu sejarah dan menjadi sejarawan profesional. Khususnya di Indonesia lapangan ini harus dipertimbangkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada seperti kepustakaan, penulisan mengenai sejarah serta hal-hal lain. Juga sejarah lokal mungkin kurang kontroversiil namun dapat lebih menambah kesadaran akan sejarah daripada yang bersifat pusat. Selain itu peneliti sejarah lokal dapat diperkenalkan dengan persoalan-persoalan seperti demografi pengaruh-pengaruhnya, mata pencaharian perubahan lalu lintas, produksi setempat dan lain-lain persoalan sejarah sosial. Unsur-unsur yang akhir-akhir ini sangat mendominasi penelitian-penelitian sejarah masa kini.

Kalau diatas disebut bahwa prestige dari sejarah lokal sebenarnya rendah dan orang lebih memperhatikan sejarah pusat/nasional atau bahkan sejarah peradaban-peradaban

kalau tidak sejarah dunia maka akhir-akhir ini ada berbagai sejarawan Indonesia muncul seperti Sartono Kartodirdjo (pemberontakan di Banten 1882), Taufik Abdullah dengan penelitian-penelitiannya mengenai masyarakat Minangkabau. Yang Aisyah Mutalib dengan disertasi pemberontakan di Jambi, Kunto Wijoyo dengan sejarah Madura⁷, Ibrahim Alfian mengenai perang Aceh (yang sifat 'lokal'-nya kita bisa ragu-kan), dan lain-lain, dan lain-lain. Masih ada beberapa disertasi dalam persiapan seperti sejarah kota Semarang, (Joko) Peristiwa Tiga Daerah, Sejarah Solo dalam revolusi dan lain-lain. Ah, hampir lupa disertasi saya sendiri mengenai keresidenan Madiun.

Apa arti gejala ini? Mengenai disertasi-desertasi sejarah kota dan lain-lain yang sedang dipersiapkan saya tidak tahu sifatnya sebab hasilnya belum ada. Selain itu Ibrahim Alfian yang diundang ke pannel sejarah lokal ini. Apa sebenarnya desertasinya mengenai perang Aceh dapat digolongkan dalam sejarah lokal. Aceh dalam zaman yang dibicarakan Ibrahim Alfian adalah suatu negara berdaulat dan Perang Aceh bukan suatu pemberontakan akan tetapi suatu konflik internasional antara dua negara. Baru kemenangan Hindia Belanda terhadap Aceh menjadikan senasib dengan bagian-bagian lain dari Indonesia.⁸

Namun apakah sebenarnya Sartono Taufik Abdullah, Yang Aisyah atau saya entah bagaimana Kunto Wijoyo sebab saya belum membaca desertasinya adalah sejarawan yang menulis mengenai sejarah lokal. Judul-judul disertasi/artikel dan lain-lain penerbitan dari yang disebut diatas memang kelihatannya demikian akan tetapi sebenarnya isi dan isu-isu yang dikemukakan bukanlah demikian. Ada satu persamaan menurut saya dari karya-karya sejarah yang disebut diatas semua karya tersebut memfokuskan pada persoalan "perubahan

sosial” (social change), Manusia dalam perubahan sosial dan reaksinya terhadap hal tersebut. Karya-karya sejarah diatas lebih merupakan apa yang oleh orang Amerika disebut **case-studies** (penelitian kasus) untuk mengerti keseluruhan atau isyu-isyu ilmu-ilmu sosial seperti perubahan sosial, masuknya sistim moneter, eksploitasi ekonomi, masuknya ide-ide baru dan lain-lain, dan lain-lain. Sejarah lokal seperti ini adalah sejarah yang merupakan bagian dari sesuatu yang lebih luas dan tunduk pada yang lebih luas tersebut sedangkan lebih menjelaskan yang luas yaitu dapat disebut nasional untuk mudahnya, dan sebaliknya yang nasional ini menjelaskan proses lokal. Sejarah-sejarah lokal yang disebut dalam rangka ini bukan sejarah lokal dalam arti murni akan tetapi hanya suatu metodologi untuk mendekati yang umum. Mungkin ini yang dimaksudkan dengan sejarah lokal dalam konferensi ini. Sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar/umum.

Akan tetapi bagaimanapun juga penelitian sejarah lokal seperti diatas oleh Sartono dan lain-lain telah berakar sebagai suatu bidang sejarah di Indonesia seperti kita melihat dari berbagai penelitian dibidang ini. Selain itu beberapa atau sebenarnya banyak sekali skripsi baik mengenai zaman pendudukan Jepang sampai revolusi dan yang mengenai abad ke-19 berdasarkan penelitian-penelitian regional tersebut seperti kita semua akan melihatnya dalam seminar ini karena banyak sarjana yang baru akan mengemukakan ringkasan penelitian masing-masing.

Kecenderungan penelitian sejarah lokal ini sebenarnya tidak saja terdapat di Indonesia akan tetapi sebenarnya dipelopori oleh penelitian-penelitian semacam demikian di Barat dari mana disiplin ilmu sejarah berasal. Gejala penelitian sejarah lokal di mulai di Perancis dengan karya-karya seperti dari

G. Lefebvre, *Lo Paysan du Nord* (Petani di Perancis Utara selama jaman revolusi) E. Le Roy Ladurie, *Montaillou*, dan *Carnival des Romans*, dan lain-lain, dan lain-lain. Para sejarawan tersebut sering digolongkan dalam sekolah penulisan sejarah yang disebut sekolah *Annales* mungkin salah satu sekolah sejarah yang paling berpengaruh khususnya dalam bidang sejarah sosial ekonomi masa kini. Melalui golongan *Annales* ini penelitian sejarah dengan metodologi penelitian sejarah lokal menyebar.

Tekanan pada sejarah lokal dari sekolah *Annales* ini dengan sendirinya mempunyai fungsi dan tujuan tertentu yang sebenarnya kita juga melihat dalam karya-karya para sejarawan Indonesia yaitu pemindahan fokus ke-peranan rakyat (masyarakat) biasa seperti petani dan bukan raja, para bupati dan pangreh praja dan bukan Hindia Belanda, buruh perkebunan dan bukan perusahaan perkebunan dan seterusnya atau pada manusia/masyarakat dalam perubahan sosial atau dalam menghadapi modernisasi. Yang terakhir ini bila dibandingkan dengan yang pertama dapat lebih menjurus ke fokus perubahan sosial itu sendiri dan bukan pada peranan rakyat/masyarakatnya sehingga dapat menyebabkan kadang-kadang mengakibatkan beberapa sejarawan Indonesia demikian kedengaran sebagai ahli sosiologi. Sesuatu yang dapat disayangkan sebenarnya sebab dapat merugikan disiplin dan fokus sejarah sendiri yaitu peranan manusia.⁹ Perhatian terhadap peranan rakyat/manusia biasa digolongkan didaerah-daerah luar Perancis dalam sekolah sejarah yang disebut **New History**. Fokus para sejarawan *New History* pada rakyat dengan sendirinya membawa akibat-akibat pada pergeseran perhatian sejarah dari isu-isu seperti politik luar negeri, kepentingan nasional, perluasan ataupun pembentukan nasional dan negara ataupun dari soal-soal filsafat sejarah ke soal struktur masyarakat, peranan golongan-golongan didalamnya kepersoalan demo-

grafi, ekologi dan lain-lain. Dengan singkat ada pergeseran perhatian dari penulisan sejarah yang "agung", "besar" atau metaphysik kepersoalan detail dan ilmiah. Fokus para sejarawan New History yang terakhir inilah yang menyebabkan penelitian penelitian ke-sejarah lokal sebab melalui lokal ini dapat dicakup yang dibidang-bidang yang menjadi perhatian sekolah New History.

Residensi Madiun. Priyayi dan Petani dalam Abad ke-19.

Untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang saya katakan diatas maka mungkin saya dapat memberi contoh mengenai karya sendiri.

Dari permulaan saya bermaksud untuk menulis mengenai masyarakat Jawa yaitu mengenai golongan-golongan masyarakat yang paling menonjol: priyayi dan petani-nya, hubungan-hubungan antara mereka dan dinamika perkembangan serta dengan sendirinya peranan dan jawaban golongan-golongan tersebut terhadap perkembangan sejarah. Dari permulaan saya dihadapi dengan tidak saja banyaknya bahan-bahan di arsip-arsip kolonial akan tetapi keaneka-ragamannya yang ada hubungan dengan daerahisme di Jawa. Ada daerah-daerah kraton (**Vorstenlanden**) ada pasisiran yang secara relatip lebih lama dibawah pengaruh langsung Belanda dari pada daerah pedalaman, ada Jawa Barat, daerah Sunda, Banten, ada mancanegara Barat/Timur, daerah Timur dari Jawa Timur (**Oosthoek**) Madura dan seterusnya. Kalau ada sejarawan yang mengira bahwa sejarah-sejarah berbagai macam daerah ini akan dapat merupakan suatu sejarah Jawa pada umumnya, jadi bahwa bagian-bagian memungkinkan kita menulis totalitas, maka itu suatu ilusi yang menyalahi realitas sejarah. Tidak ada suatu pusat Mataram, Majapahit ataupun Hindia Belanda sampai mungkin akhir abad ke-19 dengan alat-alat kekuasaannya

seperti birokrasi, militer dan lain-lain ataupun dalam cita-citanya yang ingin atau dapat menguasai dan mengintegritas seluruh Jawa. Cita-cita nasional semacam demikian itu baru akhir-akhir ini saja dan merefleksikan keinginan tersebut kedalam masa lampau dapat menyalahi perkembangan penulisan sejarah. Dengan menyadari hal-hal demikian maka untuk mendekati sejarah Jawa orang terpaksa memilih salah satu daerah dan karena berbagai sebab saya memilih keresidenan Madiun.

Melalui penelitian terhadap suatu daerah tersebut maka orang dapat melihat hubungan antara daerah, antara daerah dan pusat. Orang dapat melihat bagaimana dinamika disuatu daerah dapat mempengaruhi dinamika dipusat dan sebaliknya. Suatu case-study kalau orang Amerika mengatakannya. Memang kita tidak mungkin meneliti pusat tanpa daerah-daerahnya dan sebaliknya. Hal ini tentu berlaku juga bagi Batavia atau Hindia Belanda sampai abad ke-20.

Kalau Sdr.-Sdr. melihat berpuluhan meter arsip yang merupakan dokumen-dokumen mengenai satu daerah Jawa saja khususnya mengenai daerah-daerah penting seperti daerah kraton atau pasisiran maka sdr. akan insyaf bahwa penelitian sejarah atas dasar arsip yang mencakupi seluruh Jawa akan menemui kesukaran. Dengan singkat penelitian sejarah yakni melalui arsip, suatu metode baru dan yang paling modern, harus terbatas pada salah satu daerah dengan harapan bahwa daerah ini dapat mengungkapkan persoalan Jawa sebagai keseluruhan atau paling sedikit membuka isu-isu sejarahnya. Dalam hal ini saya kira studi saya berhasil. Metode yang saya pakai adalah meneliti sejarah ini melalui peristiwa yang merupakan gejala-gejala konflik serta perkembangan-perkembangan jangka panjang (satu abad).

Di mana mungkin untuk lebih menghidupkan kisah sejarah maka peristiwa dilukiskan di sekitar tindak-tanduk tokoh-

tokoh sejarah. Contoh dari yang terakhir ini terdapat dalam tulisan saya mengenai konflik antara bupati Madiun, R.M.A. Brotodiningrat dengan Residen Madiun dalam tahun 1900¹⁰ ?

Persoalan-persoalan yang saya sebenarnya ingin kemukakan adalah sistim patron-client di Madiun antara bupati dan penduduk setempat bupati dan anggota-anggota pangreh-prajanya, perkembangan kedudukan bupati (priyayi) sepanjang abad ke-19, dan akhirnya perluasan kekuasaan Hindia Belanda serta pengaruhnya terhadap kedudukan tradisional para priyayi di daerah. Semua ini saya gambarkan melalui konflik dua pribadi yang eksentrik-sang residen yang sombong (pompous) dan sang bupati yang arogan yang menurut beberapa orang terbaca sebagai suatu cerita detektif sebab konflik khususnya disebabkan secara langsung oleh pencurian di rumah residen, pejabat Hindia Belanda yang tertinggi di Madiun.

Demikian juga umpamanya dalam desertasi¹¹ saya sendiri lemah dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Mataram pada permulaan abad ke-19 dapat ditunjukkan melalui ambisi-ambisi para bupati setempat, intrik-intrik dari suatu keluarga bupati di Pacitan atau pemberontakan pangeran Ronggo dari Madiun dan lain-lain. Dengan singkat riwayat tokoh-tokoh, daerah dapat menghidupkan sejarah. Namun hal ini harus dilakukan dengan penelitian-penelitian mengenai struktur sosial-ekonomi, sistim konsep-konsep para priyayi mengenai kedudukan mereka, mengenai arti kekuasaan, mengenai sistim eksploitasi dan lain-lain.

Konklusi.¹²

Mungkin untuk jelasnya kita secara singkat dapat mengulangi apa yang dikatakan di atas. Ada beberapa jenis sejarah lokal:

1. Sejarah lokal yang paling klasik adalah sejarah yang memfokuskan diri pada daerah demi penonjolan daerah tersebut. Sejarah semacam ini biasanya bersifat anti quaris atau semacam buku petunjuk mengenai daerah. Manusia dan masyarakat sedikit sekali mendapat sorotan. Sejarah lokal klasik ini juga dapat disebut sejarah lokal sempit.

2. Sejarah lokal yang ditulis sebagai case study dan contoh terbaik dari ini adalah karya-karya Sartono Karto-disurdjo, pemberontakan di Banten, 1888 dan juga Rural Protest Movements-beliau bersifat demikian.

Dalam rangka ini ada berbagai karya "sejarah lokal" yang memfokuskan pada manusia dan masyarakat dalam perubahan dan karena itu memiliki relevansi yang lebih luas. Sejarah lokal di sini harus dilihat sebagai pertemuan Timur-Barat, daerah dalam rangka keseluruhan atau dalam rangka isu-isu umum lainnya.

3. Sejarah "daerah" yang sebenarnya merupakan suatu kesatuan politik tertentu seperti Aceh sebelum abad ke-20 yang merupakan negara berdaulat. Dalam rangka persoalan mengenai sejarah daerah dan nasional, peristiwa Perang Aceh misalnya dapat dikategorikan dalam case-study konflik antara Belanda (Imperialisme) dan suatu kerajaan Indonesia. Hal ini untuk mencari jalan tengah, pemecahan antara daerah vs. nasional.

4. Bila ada orang yang mengira bahwa tumpuhan sejarah-sejarah lokal/daerah dapat merupakan sejarah nasional maka itu suatu ilusi dan tidak berdasarkan realitas sejarah. Sebab sebelum abad ke-20 tidak ada kekuasaan pusat yang berhasrat, ataupun mampu untuk mengintegrir daerah-daerah.

5. Sejarah sosial-ekonomi baik dari suatu lokalitas maupun secara umum hanya dapat didekati melalui sejarah lokal

namun yang lokal itu harus dapat menerangkan yang umum sehingga yang lokal itu adalah bagian (subordinated) pada yang umum.

Bibliografi Terpilih:

1. Taufik Abdullah, "Modernization in the Minangkabau World" dalam **Culture and Politics in Indonesia** Claire Holt et.al. (eds.) Cornell Univ. Press, 1972.
2. Sartono Kartodirdjo, **The Peasant Revolt of Banten in 1888**, Amsterdam 1966.
3. Jang Aisyah Muthalib, "The Jambi Revolt" (Unpubl. Diss. Columbia Univ. 1975).
4. Onghokham, "The Residency of Madiun. Priyayi and Peasant during the nineteenth Century" (Unpubl. Diss. Yale Univ. 1975).
5. Onghokham, "The Instrutable and the Paranoid. An Investigation into the Sources of the Brotodiningrat Conflict" dalam: **Southeast Asian Transitions. Approaches through Social History**, R.T.McVey (ed.) Yale Univ. Press. 1975.
6. Seri penerbitan ini sebenarnya bukan dimaksudkan sebagai buku sejarah namun sifatnya demikian sehingga dapat dikategorikan demikian. Daerah demi daerah diceritakan riwayatnya dari 1945 sampai. . . sedangkan kadang-kadang zaman Jepang disinggung semua sampai zaman pergerakan nasional.
- 6A Tijdschrift voor de Taal-Land en Volkenkunde,
- 6B Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie.
7. Kuntowijoyo, "Social Change in an Agrarian Society. Madura 1850 — 1940" (Unpubl. Diss. Columbia Univ. 1980).
8. G.J.Resink, **Indonesia between the Myths**, The Hague, 1967.
9. M.Bloch, **The Historian's Craft**, A Vintage Book, New York, 1953.
10. Onghokham, "The Inscrutable and the Paranoid"

11. Onghokham, Diss.
12. H.P.R.Finberg & V.H.T. Skipp, **Local History, Objective and Pursuit.** Great Britain, 1973.
13. G. Lefebvre, **Reflexions sur l'histoire**, Paris 1978.

Lampiran I

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26/A.1/1981**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN SEMINAR KESEJARAHAN DI JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah mengadakan Seminar Kesenjaraan di Jakarta;
- b. bahwa untuk dapat tercapainya trtib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan di Jakarta".
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1981;
- c. Nomor 47 Tahun 1979;
- d. Nomor 237/M Tahun 1978;
- e. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- b. Nomor 0122/P/1981 tanggal 7 April 1981;
3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1981/1982 Nomor 462/XXIII/3/1981 tanggal 12 Maret 1981.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Membentuk "Panitia Pengarah Seminar" dengan tugas mengarahkan serta menyelesaikan sesuatu agar penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan mencapai hasil yang diharapkan.
2. Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai anggota sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan yang bertugas mengadakan persiapan pelaksanaan dan penyelesaian Seminar Kesenjaraan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Seminar Kesenjaraan yang namanya seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam DIP Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 12 Maret 1981 Nomor 462/XXIII/3/1981.

- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan Seminar Keajarahan telah selesai, Panitia Seminar dianggap bubar, dan mewakilkan Ketua Panitia Seminar menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan ini berlaku selama 3 bulan mulai 1 Agustus 1981.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 1981.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123

SALINAN KEPUTUSAN INI

Disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri Koordinator,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P. dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.
9. Kepala BP3K Dep. P. dan K.,
10. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
11. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam Lingk. Dep. P dan K.,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
14. Semua Kepala Kanwil Dep. P. dan K. di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I.,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P. dan K.
18. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Ybs. untuk seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana
Direktorat Jenderal Kebudayaan,

ttd

Sutarso, SH
NIP. 130186291

LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 26/A.1/1981
Tanggal : 17 Juli 1981.

**Daftar Susunan Keanggotaan Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab
Penyelenggaraan Seminar Kesejahteraan di Jakarta**

PELINDUNG:

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Sebagai Pelindung;

PANITIA PENGARAH:

1. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. S. Budhisantoso — Sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Drs. Anhar Gonggong — Sebagai Sekretaris;
4. Prof. Dr. Nugroho Notokusanto — Sebagai Anggota;
5. Dr. R.P. Suyono — Sebagai Anggota;
6. Drs. Bastomi Ervan — Sebagai Anggota;
7. Drs. Buchari — Sebagai Anggota;
8. Drs. Uka Tjandrasasmita — Sebagai anggota;
9. Drs. Abdurachman Surjomihar-
djo : Sebagai anggota.
Sutrisno Kutouo — Sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 1981
**DIREKTUR JENDERAL KEBU-
DAYAAN**

ttd.

Sutarso S.H.
NIP. 130186291

ttd

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

Lampiran II

DAFTAR PESERTA EMINAR SEJARAH NASIONAL III.

I. PANITIA PENGARAH

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Prof. Dr. Haryati Soebadio | — Pelindung |
| 2. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo | — Ketua/Anggota |
| 3. Dr. S. Budhisantoso | — Wakil Ketua/anggota |
| 4. Drs. Anhar Gonggong | — Sekretaris |
| 5. Prof. Dr. Nugroho Notokusanto | — Anggota |
| 6. Dr. R.P. Suyono | — Anggota |
| 7. Drs. Bastomi Ervan | — Anggota |
| 8. Drs. Buchari | — Anggota |
| 9. Drs. Uka Tjandrasasmita | — Anggota |
| 10. Drs. Abdurrahman Suryomihardjo | Anggota |

II. PANELIS

1. Dr. S. Budhisantoso
2. Dr. Taufik Abdullah
3. Dr. Kuntowijoyo
4. Dr. Edi Ekadjati
5. Drs. Amir Ruchiatmo
6. Prof. Dr. Mattulada
7. Dr. Nico Kana
8. Drs. Mudardjito
9. Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar
10. Dr. Steve Jawanao
11. Dr. T. Ibrahim Alfian
12. Dr. Onghokham
13. Dr. Yang Aisyah
14. Prof. Dr. Nugroho Notokusanto
15. Dra. Mona Lohanda
16. Dra. Sumartini
17. Prof. Dr. Sulastin Sutrisno
18. Dr. Sri Wulan Rudjiati
19. Dr. Ayat Rochaeddy
20. Drs. F.X. Sutjipto
21. Dr. Nico L. Kalangie

III. Seksi-Seksi:

Seksi Pra Sejarah

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. R.P. Suyono | — Ketua |
| 2. Drs. Goenadi Nitihaminoto | — Anggota/pembawa naskah |
| 3. Drs. Hary Truman Simanjuntak | : Anggota/pembawa naskah |
| 4. Drs. D. Suryanto | — Anggota/pembawa naskah |
| 5. Drs. Haris Sukendar | — Anggota/pembawa naskah |
| 6. D.D. Bintarti | — Anggota/pembawa naskah |
| 7. Dr. R.P. Suyono | — Anggota/pembawa naskah |
| 8. Drs. Santoso Soegondo | — Anggota/pembawa naskah |
| 9. R. Budi Santosa Azis | — Anggota/pembawa naskah |

10. Ny. Nios A. Subagus — Anggota/pembawa naskah
11. J. Ratna Indraningsih Panggabean : Anggota/pembawa naskah
12. Drs. I Made Sutaha — Anggota/pembawa naskah
13. Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata — Anggota/pembawa naskah
14. Dra. Ayu Kusumawati — Anggota/pembawa naskah
15. Dra. Sumiati Atmosudiro

Seksi Sejarah Kuno

16. Drs. Buchari — Ketua
17. Drs. I Gde Semado Astra — Anggota/pembawa naskah
18. Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo — Anggota/pembawa naskah
19. Dra. Ricadiana Kartakusumah — Anggota/pembawa naskah
20. Drs. Bambang Budi Utomo — Anggota/pembawa naskah
21. Dra. Sri Soejatmi Satari — Anggota/pembawa naskah
22. Drs. Moh. Umar — Anggota/pembawa naskah
23. Drs. Yanto Ditjosuwondo — Anggota/pembawa naskah
24. Drs. Nur Abbas — Anggota/pembawa naskah
25. Edhie Wuryantoro — Anggota/pembawa naskah
26. D.S. Setya Wardhani — Anggota/pembawa naskah
27. Drs. Buchari — Anggota/pembawa naskah
28. Drs. Rusyai Padmawidjaja — Anggota/pembawa naskah

Seksi Sejarah Pasca Kuno

29. Drs. Uda Saputrasasmita — Ketua
30. Drs. P.J. Suwarno, SH — Anggota/pembawa naskah
31. Ahmad Adaby Dahlan — Anggota/pembawa naskah
32. Sagimun M.D — Anggota/pembawa naskah
33. Tawalinuddin Haris — Anggota/pembawa naskah
34. H. Abdullah Tayib, BA — Anggota/pembawa naskah
35. Drs. H. Ramli Nawawi — Anggota/pembawa naskah
36. Drs. Fendy E.W. Parengkuan — Anggota/pembawa naskah
37. Drs. Aminuddin Kasdi — Anggota/pembawa naskah
38. Drs. A.A. Gde Putra Agung — Anggota/pembawa naskah
39. Dra. Marledily Asmuni — Anggota/pembawa naskah
40. M. Th. Naniek Harkantningsih — Anggota/pembawa naskah
41. Drs. Moch. Huda — Anggota/pembawa naskah
42. Drs. Ma'mun Abdullah — Anggota/pembawa naskah
43. Drs. E. Kosim — Anggota/pembawa naskah
44. Drs. Sa'uki Hadiwardoyo — Anggota/pembawa naskah
45. Drs. Da'ud Limbu Gau — Anggota/pembawa naskah
46. Drs. G. Moedjahto, MA — Anggota/pembawa naskah

Seksi Sejarah Penjajahan Kolonial

47. Drs. Dpt Sirkira/Dr. T. Ibrahim Alfian — Ketua
48. Drs. Suhartono — Anggota/pembawa naskah

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 49. Firdaus Burhan | — Anggota/pembawa naskah |
| 50. Drs. Nasief Chatib | — Anggota/pembawa naskah |
| 51. Drs. Imam Hilman | — Anggota/pembawa naskah |
| 52. Ida Bagus Sideman | — Anggota/pembawa naskah |
| 53. Drs. H. Siahhaan | — Anggota/pembawa naskah |
| 54. Drs. A.A. Bagus Wirawan | — Anggota/pembawa naskah |
| 55. Drs. Suwardi, MS | — Anggota/pembawa naskah |
| 56. Dra. Tiurma L. Tobing | — Anggota/pembawa naskah |
| 57. Drs. Hollius Syamsuddin, MA | — Anggota/pembawa naskah |
| 58. Drs. R.Z. Leirissa | — Anggota/pembawa naskah |
| 59. Dra. Julianti Parani | — Anggota/pembawa naskah |
| 60. Drs. Didi Suryadi | — Anggota/pembawa naskah |
| 61. Drs. M. Idwar Saleh | — Anggota/pembawa naskah |
| 62. Drs. Rosad Amidjaja | — Anggota/pembawa naskah |
| 63. A.M. Djulianti Suroyo | — Anggota/pembawa naskah |
| 64. Moh. Noor ARS | — Anggota/pembawa naskah |
| 65. Drs. Djoko Utomo | — Anggota/pembawa naskah |

Sekal Sejarah Pergerakan Nasional

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 66. Drs. Abdurrahman Suryosura- | |
| ba | — Ketua |
| 67. Tengku Lukman Sinar, SH | — Anggota/pembawa naskah |
| 68. Dra. Soekesi Soemoatmodjo | — Anggota/pembawa naskah |
| 69. Wardiningsih Soerjohardjo | — Anggota/pembawa naskah |
| 70. Drs. Rusdi Sufi | — Anggota/pembawa naskah |
| 71. Drs. Mardanas Safwan | — Anggota/pembawa naskah |
| 72. Drs. Yusmar Basri | — Anggota/pembawa naskah |
| 73. Dra. Irna Hanny Hadisuwito | — Anggota/pembawa naskah |

Sekal Sejarah Mutakhir

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 74. Prof. Dr. Nugroho Notosu- | |
| santo | — Ketua |
| 75. H.A.M. Effendy, SH | — Anggota/pembawa naskah |
| 76. Drs. Gazali Usman | — Anggota/pembawa naskah |
| 77. I Gde Putu Gunawan | — Anggota/pembawa naskah |
| 78. Drs. Suranto Sutanto | — Anggota/pembawa naskah |
| 79. J.R. Chaniago, Drs | — Anggota/pembawa naskah |
| 80. Drs. Adisusilo S.J. | — Anggota/pembawa naskah |
| 81. Ariwiadi | — Anggota/pembawa naskah |
| 82. Tri Wahyuning Mahrus | |
| Irsyam, SS | — Anggota/pembawa naskah |
| 83. Husain Haikal | — Anggota/pembawa naskah |
| 84. Drs. Sutopo Sutanto | — Anggota/pembawa naskah |
| 85. Tanu Suherly | — Anggota/pembawa naskah |
| 86. J. Yogaswara | — Anggota/pembawa naskah |
| 87. Drs. Anhar Gonggong | — Anggota/pembawa naskah |
| 88. Susanto Zuhdi | — Anggota/pembawa naskah |
| 89. Amrin Imran | — Anggota/pembawa naskah |
| 90. Saleh A. Djamhari | — Anggota/pembawa naskah |
| 91. Masfar R. Hakim | — Anggota/pembawa naskah |
| 92. M. Idwar Saleh | — Anggota/pembawa naskah |
| 93. Moela Marboen | — Anggota/pembawa naskah |

Lampiran III

LAPORAN HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL. III

PENGANTAR

Seminar Sejarah Nasional III dengan tujuan memasyarakatkan kesadaran bersejarah melalui penggalakan penelitian, penulisan, dan publikasi sejarah secara baik telah diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1981 di Jakarta.

Seminar telah membahas 17 makalah dalam sidang-sidang panel dan 86 dalam sidang-sidang seksi, dengan perincian sebagai berikut:

A. SIDANG PANEL

Sidang-sidang panel telah membahas:

1. *Etnohistori* dengan 4 makalah yang terdiri dari:
 - a. "Etnohistori Sebagai Pendekatan Sejarah di Indonesia", oleh Dr. S. Budhisantoso.
 - b. "Studi Kasus Komunitas Sebagai Pendukung Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. N.S. Kalangie
 - c. "Pengkajian Teks Lisan Sebagai Sumber Sejarah" oleh Dr. Stephanus Djawanai.
 - d. "Etnoarkeologi: Perannya dalam Pengembangan Arkeologi Indonesia", oleh Drs. Mündardjito.

Kesimpulan: Mengingat keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia dan jangkauan masa sejarah yang sangat luas, sementara itu tradisi tulis menulis dan sumber sejarah masih sangat terbatas, maka dirasa perlu untuk mengembangkan konsep-konsep, metodologi dan cara pengumpulan data yang mampu menggali dan memanfaatkan berbagai sumber sejarah yang tidak tertulis baik yang berupa teks lisan maupun lain-lain.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka pendekatan etnohistori perlu diselenggarakan secara terarah, khususnya dalam mengungkapkan sejarah kelompok etnis sebagai bagian dari masyarakat-masyarakat bangsa.

Sedang etnoarkeologi dirasa perlu dalam usaha memahami sejarah asal-usul, perkembangan, persebaran dan pembauran kebudayaan bangsa di masa lampau sebagaimana tercermin dalam kebudayaan materiil.

2. Historiografi Tradisional dengan 5 makalah yang terdiri dari:
 - a. "Struktur Politik dan Historiografi Tradisional" oleh Drs. F.A. Sutjipto.
 - b. "Kebudayaan Setempat dan Historiografi Tradisional" oleh Dr. Sri Wulan Rüdjiati Mulyadi.
 - c. "Sastra dan Historiografi Tradisional" oleh Prof. Dr. Sulastin Sutrisno.
 - d. "Tokoh dan Historiografi Tradisional: Studi Kasus Tokoh Dipati Ukur" oleh Dr. Edi S. Ekajati.
 - e. "Peranan Benda Purbakala dalam Historiografi Tradisional" oleh Dr. Ayatrohaedi.

Kesimpulan: Historiografi Tradisional sebagai satu jenis penulisan sejarah yang disusun secara tradisional, berbeda dengan historiografi modern, karena ia berlandaskan pada pengertian dan pandangan penulis tentang sejarah dan kebudayaannya. Oleh karena itu pengkajian tulisan

sejarah tradisional yang penting artinya bagi penulisan sejarah nasional, khususnya dalam mengungkapkan nilai-nilai budaya, gagasan utama dan keyakinan yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa sejarah.

3. *Sejarah Lokal* meliputi 3 makalah, yaitu:
 - a. "Di sekitar Sejarah Lokal di Indonesia" oleh Dr. Taufik Abdullah.
 - b. "Sebelah catatan Tentang Bagaimana Lokalnya Sejarah Lokal" oleh Dr. Ibrahim Alfian.
 - c. "Sejarah Lokal" oleh Dr. Onghokham.

Kesimpulan: Penulisan sejarah lokal sangat penting artinya dalam menyusun sejarah nasional mengingat perkembangan masyarakat yang beragama sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang pernah berkembang dan banyaknya masyarakat kesukuan serta perkauman yang mengalami sejarah di lokalitas masing-masing, memerlukan pendekatan penulisan sejarah yang lebih banyak memperhatikan keadaan setempat dengan dinamikanya masing-masing.

4. *Sejarah Lisan* meliputi 3 makalah yang terdiri dari:
 - a. "Wawancara Simultan: Suatu Experimen Dalam Sejarah Lisan" Oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
 - b. "Sumber Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Kontemporer Indonesia" oleh Dra. Mona Lohanda.
 - c. "Kegunaan Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. Kuntowijoyo.

Kesimpulan: Kelangkaan sumber dokumenter mendorong sejarawan untuk mencari sumber lisan. Untuk penulisan sejarah mutakhir terutama sejarah revolusi, pengumpulan sumber lisan sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena semakin jauh jarak waktu yang semakin surut usia serta daya ingat para pelaku sejarah, akan semakin sukarlah penggaliannya. Dikhawatirkan bahwa sumber sejarah lisan itu akan punah sebelum berhasil direkam.

B. SIDANG SEKSI

Sidang-sidang seksi telah membahas:

1. *Prasejarah* yang meliputi 14 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
 2. *Sejarah Kuno*: meliputi 12 makalah (lihat lampiran daftar makalah)
 3. *Sejarah Abad XVI — XVIII* meliputi 15 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
 4. *Sejarah Abad XIX — Masa Perlawanan Terhadap Penjajah*, meliputi 16 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
 5. *Sejarah Awal Abad XX — Perguruan Nasional* meliputi 10 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
 6. *Sejarah Mutakhir* meliputi 19 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
- C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sidang-sidang seksi telah menyimpulkan bahwa jarak antara Seminar Sejarah Nasional II dan III terlalu jauh, sehingga tampak adanya kesenjangan mutu antara makalah yang ditulis oleh para peserta Senior dan peserta yunior.

Adapun kesimpulan dari masing-masing seksi ialah sebagai berikut:

1. PRASEJARAH

- a. Beberapa makalah mengungkapkan data baru yang penting untuk melengkapi sejarah manusia dan kebudayaannya. Pada masa prasejarah di Indonesia.
- b. Sebagian makalah membahas keadaan masyarakat masa kini yang masih hidup dengan tradisi prasejarah (etnoarkeologi).
- c. Dari pembahasan ternyata terdapat kesinambungan unsur-unsur kebudayaan prasejarah yang melintasi batas kurun waktu Indonesia-Hindu, Indonesia Islam dan berlanjut sampai masa kini.

2. SEJARAH KUNA

- a. Tampak kemajuan dalam penelitian Sejarah Kuna, ternyata dibahasnya temuan-temuan baru, dan munculnya tafsiran-tafsiran baru atas sumber yang telah tersedia.
- b. Munculnya muka-muka baru yang di antaranya baru pertama kali tampil dalam forum nasional, tetapi telah menunjukkan karya ilmiah yang cukup bermutu.
- c. Adanya beberapa makalah yang mutunya agak kurang, yang diajukan oleh peserta dari daerah, yang rupa-rupanya amat kekurangan sumber kepustakaan sebagai bahan referensi.
- d. Nampak kurangnya perhatian terhadap penggunaan sumber-sumber naskah kuna, baik yang membahas segi-segi prosesusual, maupun segi struktural Sejarah Kuna Indonesia.
- e. Dari makalah-makalah yang diajukan tampak bahwa para peneliti sejarah kuna dihambat oleh kurang tersedianya hasil-hasil penelitian filosofis, khususnya, mengenai naskah-naskah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum, keagamaan, peraturan tentang tingkah laku bagi golongan-golongan masyarakat, dan lain-lain.

3. SEJARAH ABAD XVI — XVIII

- a. Di antara 14 makalah, hanya ada lima yang mengungkapkan data-data baru yang penting bagi memperkaya pengetahuan Sejarah Indonesia, yaitu mengenai masuk dan proses perkembangan Islam di Bima, Lombok, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali.
- b. Masuk dan proses perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan perubahan sosial-budaya dan pergeseran kekuasaan. Walaupun demikian tetap terdapat kesinambungan sosial-budaya yang berdiri Indonesia.

4. SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

Minat dan peran-serta dalam penulisan dan pembahasan sejarah abad XIX sangat besar, namun demikian kritisisme historis belum mendapat perhatian yang serius. Di samping itu masalah pendekatan atau kerangka acuan masih belum mendapat tempat dalam sebagian besar makalah.

5. SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL

Beberapa makalah yang dibahas mengenai sejarah awal abad XX dan Pergerakan Nasional menunjukkan adanya penguasaan metodologis dan kemampuan penulisannya.

6. SEJARAH MUTAKHIR

Nampak besarnya minat masyarakat terhadap sejarah kutakhir, sehingga menuntut kecermatan dan peningkatan kemampuan metodologis dalam penelitian dan penulisan sejarah.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka diajukan saran-saran

num sebagai berikut:

- a. Agar Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan secara bersinambung sekurang-kurangnya 4 tahun sekali.
- b. Agar topik yang hendak dibahas ditentukan terlebih dahulu, sehingga masalahnya lebih terpusat dan lebih banyak waktu untuk pembahasan. Selanjutnya saran dari masing-masing saksi ialah sebagai berikut:

1. **PRASEJARAH**

- a. Untuk menyempurnakan/memantapkan kronologi prasejarah Indonesia, penggunaan metode pertanggalan radiometris sangat diperlukan.
- b. Untuk menyusun perkerangkaan prasejarah Indonesia berdasarkan pada sosial ekonomi, diperlukan peningkatan penelitian paleo-ekologi yang terpadu.
- c. Penyebarluasan pola sosial ekonomi dalam perkerangkaan prasejarah Indonesia perlu ditingkatkan pola pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

2. **SEJARAH KUNA**

- a. Diharapkan kepada pemerintah, cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyediakan perpustakaan yang memadai bagi Universitas dan Institut yang mempunyai jurusan Sejarah dan Arkeologi, khususnya majalah-majalah ilmiah dalam kedua bidang tersebut. Baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Disarankan agar pemerintah memberi rangsangan bagi para ahli filologi untuk menggarap naskah-naskah kuna sebagai sumber informasi bagi penelitian dan penulisan sejarah dan arkeologi Indonesia.

3. **SEJARAH ABAD XVI — XVIII**

Peningkatan penelitian sejarah abad XVI — XVIII dirasa perlu untuk dilakukan secara lebih mendalam dengan memperhatikan sumber-sumber informasi dan metodologi yang sesuai, sehingga dapat mengungkapkan sejarah secara objektif.

4. **SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH**

- a. Dirasa perlu peningkatan penelitian dan penulisan sejarah perlawanan terhadap penjajah dari seluruh daerah di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dipetik untuk dijadikan bahan guna menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air bagi segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan penyusunan bibliografi yang menyangkut sejarah dan kebudayaan dari setiap daerah yang antara lain memuat daftar makalah yang terdapat dalam majalah-majalah seperti *IMT*, *TNI*, *TBG*, *BKI*, dan lain-lain.
- c. Hendaknya diusahakan pula bahan-bahan arsip yang penting untuk penulisan sejarah suatu daerah.

5. **SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL**

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

6. **SEJARAH MUTAKHIR**

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Jakarta, 13 Nopember 1981

Tim Perumus Seminar Sejarah Nasional III

Lampiran IV

Daftar Masalah Sumber Sejarah Nasional III

I. MAKALAH SEKSI PRA SEJARAH:

1. Tradisi Megalitik pada Makam Islam/Asta Tinggi Sumenep, oleh Drs. Goenadi Nitihaminoto.
2. Tradisi Masa Perundagian pada Masyarakat Batak, oleh Drs. Harri Truman Simanjuntak.
3. Watu Kandang Matesih: Arti pentingnya dalam Masa Perundagian, oleh Drs. D. Suryanto.
4. Peninggalan Megalitik khususnya tentang kubur Batu Megalitik Terjan, oleh Drs. Haris Sukendar.
5. Moko sebagai salah satu unsur penting masa perundagian, oleh DRA. D.D. Bintarti.
6. Masalah-masalah kronologi Prasejarah Indonesia, oleh Dr. R.P. Suyono.
7. Awal perdagangan gerabah di Indonesia, oleh Drs. Santoso Soegondo.
8. Tinjauan tentang tradisi kapal perimbas-penetak di Indonesia, oleh Drs. R. Budi Santosa Azis.
9. Tradisi serpih bilah di Indonesia, oleh Dra. Ny. Nies A. Subagus.
10. Situs kubur tempayan di Anyer, Jawa Barat, oleh Drs. J. Ratna Indraningsih.
11. Bentuk-bentuk megalit di Pura Bukit Mentik di desa Buwahan Kintamani, Bangli, oleh Drs. I Made Sutaba.
12. Pola penguburan sarkofagus di desa Tigawasa Buleleng, oleh Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata.
13. Peninggalan tradisi masa perundagian di Sumba Timur, oleh Drs. Ayu Kusumawati.
14. Tradisi masyarakat bercocok tanam di Liwolere, Lantoka, Nusa Tenggara Barat, oleh Dra. Sumiati Atmosudiro.

II. MAKALAH SEKSI SEJARAH KUNO

1. Teori tentang asal usul Ratu Qi Sang Ajnadevi, oleh Drs. Gde Made Astra.
2. Betulkah Artasura Ratu Bumi Banten seorang raja Bali yang murka dan hina oleh Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo.
3. Rakryan Sanjiwana, oleh Dra. Richadiana Kartakusumah.
4. Timbul dan berlanjutnya pemukiman di daerah Kedah, oleh Drs. Bambang Budi Utomo.
5. Sejarah Batang Kuno dan sekitarnya. Studi wilayah Sejarah Lama, oleh Drs. Moh. Omar.
6. Mithos Ratu Adil Jawa sebagai usaha motivasi penyatuan kembali Kerajaan Jenggala, oleh Drs. Yanto Dirjosuwondo.
7. Peninggalan Hinduisme di Aceh, oleh Drs. Nur Abbas.
8. Wanua I Tpi Siring, data prasasti jaman Balitung, oleh Drs. Edhi Wurjantoro.
9. Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu, oleh Dra. D.S. Setya Wardani.
10. Ulah pemungut pajak dalam masyarakat Jawa Kuno (Faudulent tax officials in ancient Javanese Society), oleh Drs. Buchari.
11. Candi Canguang dan permasalahannya, oleh Drs. Rusyay Padmawidjaja.
12. Kerajaan Kuantan, oleh Dra. Marlaily Asmuni.

III. MAKALAH SEKSI SEJARAH ARAB KE-16 -- 18

1. Sejarah Kauman Yogya. Sebuah Studi perubahan Sosial, oleh Ahmad Adaby Darban.
2. Sombaopu, Bungaya dan beberapa kesalahan dalam penulisan sejarah, oleh Sugimun M.D.
3. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Lombok, oleh Tawalinuddin Haris.
4. Sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Bima, oleh H. Abdullah Tayib, B.A.
5. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan sampai akhir abad ke-18, oleh Drs. H. Ramli Mawawi.
6. Pengaruh penyebaran agama Islam terhadap kehidupan sosial politik di daerah Sulawesi Utara, oleh: Drs. Fendy E.W. Parengkuan.
7. Peranan kepurbakalaan Islam untuk memahami kedatangan dan persebaran Islam di Jawa, oleh Drs. Aminuddin Kasdi.
8. Sejarah masuknya Islam di Karangasem Bali, oleh Drs. A.A. Gde Putra Agung.
9. Faham keislaman dan perkembangan politik dalam masa kerajaan Islam di Demak, oleh Drs. Moch Hudan.
10. Catatan singkat tentang Masyarakat kota Banten Lama abad ke-16, oleh Dra. M. Th. Naniek Harkantiningih.
11. Masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Sumatera Selatan; suatu tinjauan historis, oleh Drs. Ma'mun Abdullah.
12. Pertumbuhan idem kekuasaan Jawa: Studi kasus Kerajaan Matram pada masa pertengahan abad XVIII, oleh Drs. Sauki Hadiwardoyo.
13. Masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, oleh Drs. Daud Limbu Gau.
14. Pergeseran kekuasaan dalam sejarah Mataram, oleh Drs. G. Moedjanto, MA.

IV. MAKALAH SEKSI MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

1. Bekal dan Gerakan sosial: Kasus Srikaton Surakarta 1888, oleh Drs. Suhartono.
2. Interpretasi positif atas pengaruh Inggris Bengkulu, oleh Firdaus Burhan.
3. Perlawanan Sutan Mangkurat terhadap Belanda di Mandiling, oleh Drs. Nazief Chatib.
4. Peristiwa pembunuhan Asisten residen Nagel tahun 1845, oleh Drs. Imam Hilman.
5. Perang Kusamba 24-Mei 1949, oleh Ida Bagus Sidemen.
6. Keterlibatan Belanda dalam percaturan politik di Kalimantan Barat pada abad ke-19, oleh Drs. H. Siahaan.
7. Puputan Klungkung 28 April 1958. Perlawanan terhadap penjajah, oleh Drs. A.A. Bagus Wirawan.
8. Perlawanan Raja Haji Marhum Telok Ketapang-Malaka menghadapi Belanda (1782 — 1784), oleh Drs. Suwardi MS.
9. Pengkristenan Tanah Batak pertemuan dua kepentingan (Usaha mempertahankan Hababatahon dan kolonialisme Belanda) oleh Drs. Tiurma L. Tobing.
10. Perang Ngali dan Perang Sapugara di pulau Sumbawa tahun 1908, oleh Drs. Helius Syamsuddin, M.A.
11. Raja Jailolo (1811 — 1932). Gerakan Nativisme di Maluku, oleh Drs. R.Z.

Leirisso.

12. Tradisi lokal dan penulisan sejarah Buton, Dra. Julianti Prani.
13. Pemberontakan Petani di Tangerang 1924, Drs. Didi Suryadi.
14. Wajib kerja di Karesidenan Kedu pada abad ke-19, oleh A.M. Djulianti Suroyo.
15. Pangeran Parigi dari Kerajaan Pasir, oleh Noor Ars.
16. Pemogokan Buruh ten. di Yogyakarta tahun 1882, oleh Drs. Djoko Utomo.

V. MAKALAH SEKSI PERGERAKAN NASIONAL.

1. Tuhan Sang Nahualu Raja Siantar, oleh Tengku Lukman Sinar S.H.
2. Sekolah Kartini suatu usaha untuk menyebarkan dan meningkatkan kecerdasan wanita pada permulaan abad ke XX, oleh Drs. Sukesi Soemoatmodjo.
3. Dua Radicale Concentric; Sebuah perbandingan, oleh Wardiningsih Soerjohardjo, SS.
4. Pengaruh Pendidikan Barat terhadap kedudukan ekonomi Uleebalang di Aceh oleh Drs. Rusdi Sufi.
5. Beberapa pengalaman wawancara untuk menulis sejarah perintis kemerdekaan oleh Drs. Mardanan Safwan.
6. Pelaksanaan Sejarah Lisan dalam penelitian sejarah pemberontakan De Zeven Provincien, oleh Drs. Yusmar Basri.
7. Soewardi Soerjaningrat dalam pengasingan, oleh Dra. Irna Hanny Hadi Soewito.
8. Peranan Inlandsche Matine Bond (IMB) dalam pemberontakan di atas kapal De Zeven Provincien, oleh Rochmani Santosa.
9. Mangkunegaran dan Nata Surata, oleh Dra. Darsiti Suratman.
10. Suatu Pendekatan Sejarah Sosial Kota Yogyakarta akhir abad ke-19 awal abad ke-20.

VI. MAKALAH SEKSI SEJARAH MUTAKHIR

1. Kapan lahirnya Pancasila, oleh R.A.M. Effendy, SH
2. Pengaruh persetujuan Linggarjati terhadap perjuangan ABRI Divisi IV, Periode revolusi Fisik 1945 — 1949, oleh Drs. Gazali Usman.
3. Usaha Petani dalam mempertahankan hidup. Kisah pendudukan Jepang di Madiun, oleh Drs. I Ode Putu Gunawan.
4. Pemberontakan PKI Mr. Mohammad Joeseoph tahun 1946 di Cirebon, oleh Drs. Soeranto Soetanto.
5. Wajah dua muka sebuah kekuatan politik. Badan Pekerja KNIP periode Jakarta, oleh Drs. J.R. Chaniago.
6. Pengaruh Rasionalisme terhadap Badan-badan Perjuangan dan TNI (1947 — 1950), oleh Drs. Ariwiadi.
7. Cina Islam di Indonesia (Pengenalan awal terhadap PITI) oleh Tri Wahyuning Mahrus Irsyam, SS.
8. Minoritas Tionghoa dalam sastra Indonesia, oleh Husain Raikal.
9. Pemerintahan Nasional kota Jakarta, oleh Drs. Soetopo Soetanto.
10. Kekuatan Gerilya di daerah Priangan pada waktu Divisi Siliwangi hijrah 1948, oleh Drs. Tanu Suherly.
11. Lahirnya Badan-badan Perjuangan dan BKR di kota Bandung sampai timbulnya MDPP/MPPP, oleh Drs. J. Jogaswara.
12. Qahhar Mudzakkar: Pergumulan dalam siri, Suatu Sisi situasi gerakan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Pada 1950 — 1965, oleh Drs. Anhar Gonggong.

- 13. Bogor Shu pada masa pendudukan Jepang (1942 — 1945) oleh Sumanto Zuhdi**
- 14. Markas Besar Komando Sumatera 1948 — 1949, oleh Drs. Amrin Imran.**
- 15. Kekuatan-kekutan revolusi di Surabaya (1945), oleh Saleh S. Djamhuri.**
- 16. Operasi lintas laut menembus blokade Belanda (1946 — 1949), oleh Drs. Masfar R. Hakim.**
- 17. Sejarah pembentukan UUD '45 dan pengesahannya, oleh Drs. Moela Marbun.**
- 18. Sumbangan Prof. Dr. Soepomo terhadap perumusan Dasar Negara dan UUD 1945, oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.**
- 19. Perkembangan Peranan Ulama Dalam Arena Politik di Aceh Utara, oleh Drs. P.J. Suwarno, SH.**
- 20. Rakyat dan Tentara di Bibis 1949, oleh Drs. Adisusilo S.J.**

**Panitia Seminar Sejarah
Nasional III**

Perpustakaan
Jenderal